



PT JAMKRIDA JABAR ANNUAL REPORT 2022

**Penjaminan Kredit yang Kuat
untuk UMKM Tangguh**

**Strong Credit Guarantee
for Resilient MSMEs**



PT Jamkrida Jabar terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



info@jamkrida-jabar.co.id



www.jamkrida-jabar.co.id



[jamkridajabar](https://www.instagram.com/jamkridajabar)



[Jamkrida Jabar](https://www.facebook.com/JamkridaJabar)



KATA PENGANTAR

PREFACE

Tentang Laporan Tahunan

About Annual Report

PT Jamkrida Jabar melalui kegiatan usaha penjaminan, turut serta mendukung perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Keberadaan Lembaga Penjamin seperti PT Jamkrida Jabar akan meningkatkan akses permodalan/pembiayaan bagi UMKM. PT Jamkrida Jabar meyakini bahwa potensi pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan sektor UMKM ini sangat besar. Dengan dukungan yang tepat dari produk dan layanan penjaminan yang ditawarkan oleh PT Jamkrida Jabar, sektor UMKM khususnya di Jawa Barat diharapkan dapat tumbuh lebih pesat dan berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian daerah.

PT Jamkrida Jabar adalah salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang penjaminan baik kredit maupun non kredit. PT Jamkrida Jabar telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan Pasal 28 Ayat (1) bahwa Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan/atau laporan lain kepada OJK. Dan, sesuai Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin Pasal 59 Ayat (1) bahwa Lembaga Penjamin wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara lengkap kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

Laporan Tahunan ini merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih PT Jamkrida Jabar dalam setahun. Dalam Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar ini termuat informasi kinerja keuangan dan hasil kegiatan usaha berdasarkan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan atas Laporan Keuangan Perseroan. Selain itu juga termuat informasi-informasi lainnya yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan pernyataan data historis.

Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko serta ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut, termasuk yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik, dan sosial Indonesia.

Demikian Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun Anggaran 2022 ini kami susun dan sampaikan. Semoga PT Jamkrida Jabar dapat terus menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, serta membantu mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin. **Penjaminan Kredit yang Kuat untuk UMKM Tangguh. Aamiin.**

PT Jamkrida Jabar through its guaranteed business activities supports the development of the micro, small, and medium enterprises (MSMEs) sector which continues to grow in line with regional and national economic growth. The existence of Guarantee Institutions such as PT Jamkrida Jabar will increase access to capital/financing for MSMEs. PT Jamkrida Jabar believes that the potential for economic growth for the community through the development of the MSME sector is enormous. With proper support from guaranteed products and services offered by PT Jamkrida Jabar, the MSME sector, especially in West Java, is expected to grow more rapidly and contribute more to the regional economy.

PT Jamkrida Jabar is a Business Entity Owned by the Government of West Java Province and is a non-bank financial institution engaged in guarantees, both credit and non-credit. PT Jamkrida Jabar has been registered and supervised by the Financial Services Authority (OJK).

According to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 concerning Guarantees Article 28 Paragraph (1) that Guarantee Institutions are required to submit monthly reports, annual financial reports that a public accountant has audited, and other reports to OJK. In addition, according to OJK Regulation No. 2/POJK.05/2017 Concerning the Implementation of Guarantee Agency Business Article 59 Paragraph (1) that Guarantee Institutions are required to submit complete annual financial reports that have been audited by a public accountant to the OJK no later than 4 (four) months after the end of the financial year.

This Annual Report is a report on the progress and achievements achieved by PT Jamkrida Jabar in a year. The Annual Report of PT Jamkrida Jabar contains information on financial performance and results of business activities based on audit results by Hertanto, Grace, and Karunawan Public Accounting Firm on the Company's Financial Statements. In addition, it also contains other information that contains projections, plans, strategies, and objectives that are not statements of historical data.

Forward-looking statements contain risks and uncertainties regarding outcomes and events that may differ materially from what is expected and stated in the statements, including those caused by changes in Indonesia's economic, political, and social environment.

Thus we have compiled and submitted the Annual Report of PT Jamkrida Jabar for the 2022 Fiscal Year. Hopefully, PT Jamkrida Jabar can continue to be a trusted credit guarantee company that contributes to regional economic growth, as well as helps to make West Java a Born and Inner Champion. **Strong Credit Guarantee for Resilient MSMEs. Aamiin.**



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

Daftar Isi

Table of Contents

i	KATA PENGANTAR PREFACE	41	Sekilas Jamkrida Jabar About Jamkrida Jabar
iii	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS	41	Legalitas Usaha Business Legality
I	IKHTISAR KINERJA 2022 2022 PERFORMANCE OVERVIEW	43	Peraturan Perundang-undangan Lembaga Penjamin Guarantee Institution Regulation
1	Ikhtisar Kinerja Operasional Operational Performance Highlights	43	Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Tata Kelola Governance Implementation Regulation
5	Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Highlights	44	Visi dan Misi Vision and Mission
10	Peristiwa dan Kinerja Penting Important Events and Performance	45	Nilai-Nilai Perusahaan Corporate Values
17	Tingkat Kesehatan Keuangan Financial Soundness Level	46	Produk dan Layanan Products and Services
18	LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT	47	Informasi Modal dan Pemegang Saham Information About Capital and Shareholders
18	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	48	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioner Profile
26	Laporan Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory Report	52	Profil Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory Profile
31	Laporan Direksi Board of Directors Report	56	Profil Direksi Board of Director Profile
40	Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2022 Responsibility for The 2022 Annual Report	60	Data Demografi Sumber Daya Manusia Human Resources Demographic Data
41	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		

62	Struktur Organisasi Organizational Structure	119	TATA KELOLA PERSEROAN CORPORATE GOVERNANCE
63	Tim Kami Our Team	119	Komitmen Penerapan GCG GCG Implementation Commitment
66	KINERJA PERSEROAN COMPANY PERFORMANCE	119	Tujuan Penerapan GCG Purpose of GCG Implementation
66	Tinjauan Ekonomi Economic Review	120	Dasar Penerapan GCG Base of GCG Implementation
68	Tinjauan Prospek Masa Depan Future Business Prospects	120	Struktur dan Mekanisme GCG GCG Structure and Mechanism
71	Tinjauan Bisnis Business Review	122	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders
73	Tinjauan Keuangan Financial Review	124	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders
73	Laporan Posisi Keuangan Statement of Financial Position		
77	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income	125	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders Circular
81	Tinjauan Operasional Operational Review	126	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors
81	Aspek Penjaminan Guarantee Aspect		
87	Aspek Manajemen Risiko Risk Management Aspect		
90	Aspek Klaim dan Subrogasi Claim and Subrogation Aspect	130	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners
93	Aspek Sumber Daya Manusia Human Resources Aspect		
99	Aspek Umum General Aspect		
100	Aspek Sistem Manajemen Informasi Information Management System Aspect	134	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Sharia Supervisory
104	Aspek Pengawasan Supervision Aspect		
105	Unit Usaha Syariah Sharia Business Units		

137	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris Completeness and Implementation of Duties of Company Committees Under the Board of Commissioners	175	Rencana Strategis Perusahaan Corporate Strategic Plan
154	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Direksi Completeness and Implementation of Duties of Company Committees Under the Board of Directors	179	Pengungkapan Kepemilikan Saham Disclosure of Share Ownership
158	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal Implementation of Compliance, Internal Auditors, and External Auditors	180	Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Disclosure of Financial Relationships and Family Relationships
169	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi Implementation of Risk Management, Internal Control Systems, and Information Technology Governance	183	Pengungkapan Hal Penting Lainnya Other Important Disclosures
171	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Implementation of Remuneration Policy and Other Facilities	187	LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT
175	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Conditions	191	LAPORAN AUDIT AUDIT REPORT
		192	Surat Pernyataan Direksi Directors' Statement Letter
		194	Laporan Auditor Independen Independent Auditor's Report
		197	Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2021-2022 Consolidated Financial Statements 2021-2022



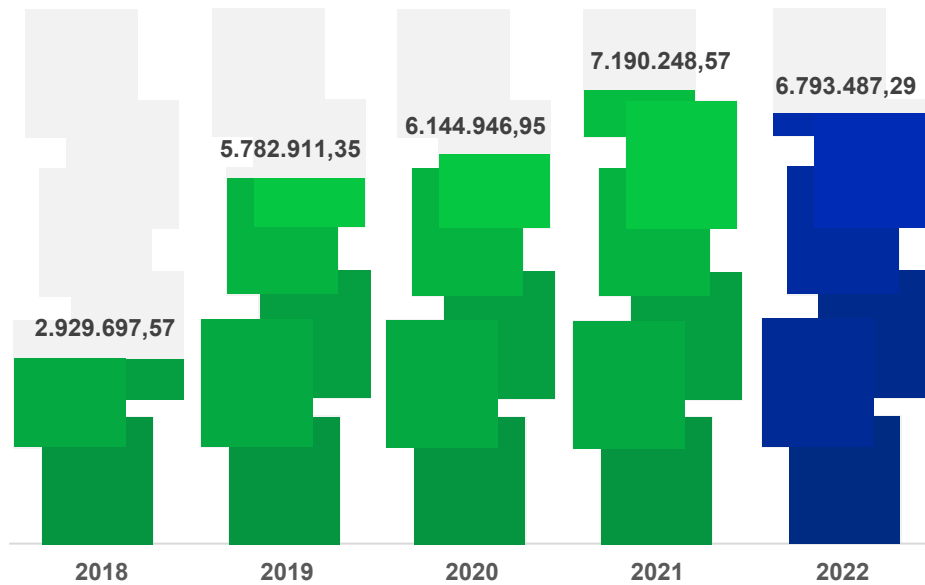
IKHTISAR KINERJA 2022

2022 PERFORMANCE
OVERVIEW

IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL

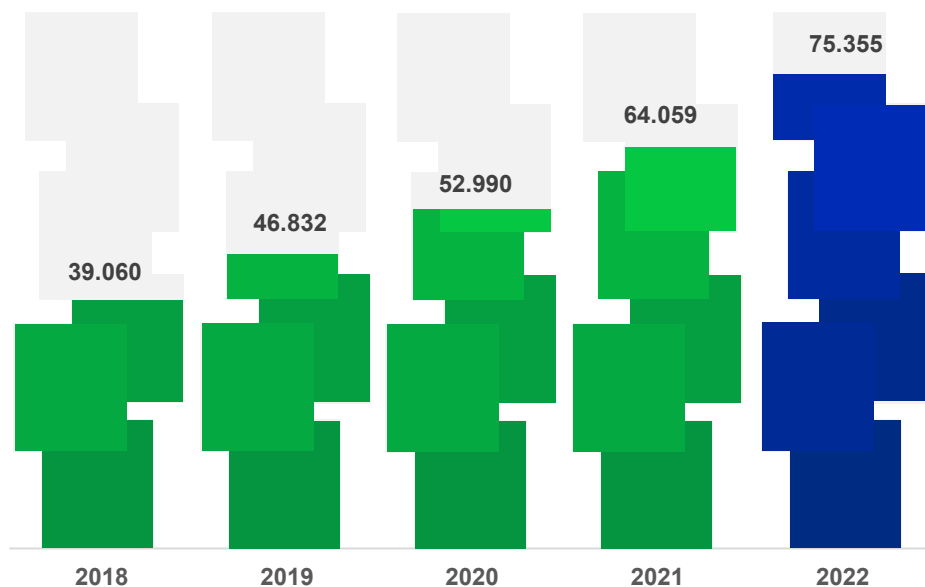
Operational Performance Highlights

Volume Penjaminan
Guarantee Volume



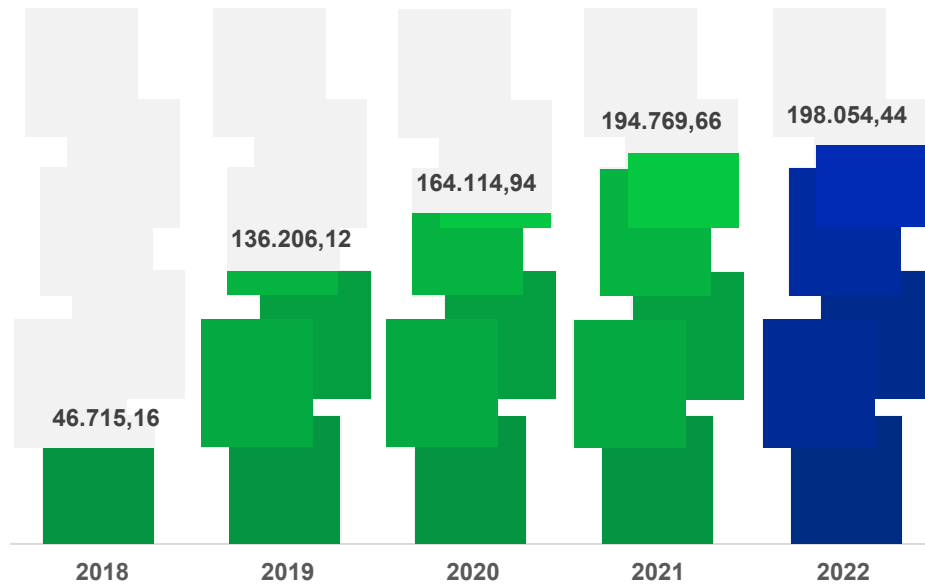
dalam jutaan rupiah/in million of Rupiah

Jumlah KUMKM
Number of CMSMEs



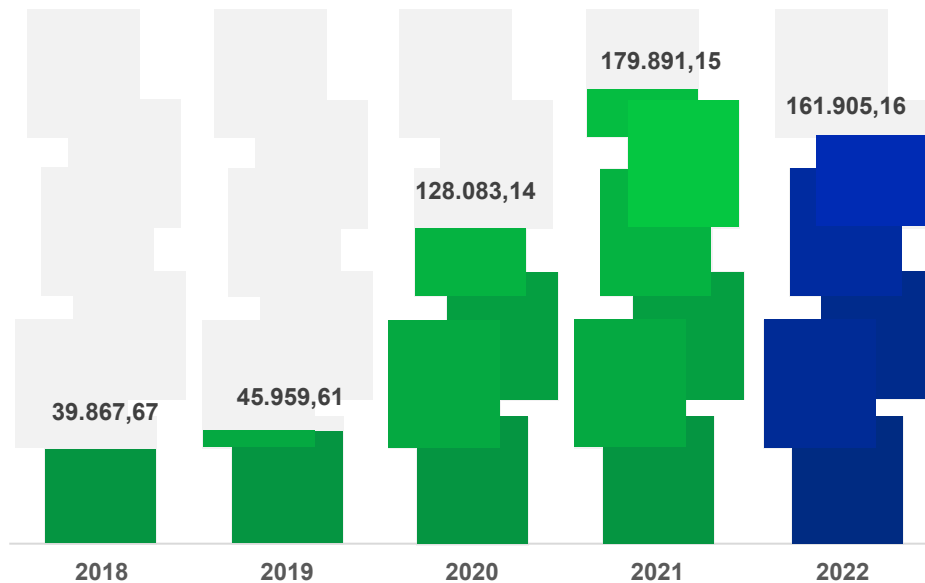
dalam satuan unit/in units

Imbal Jasa Penjaminan Cash Basis
Guarantee Fee on a Cash Base



dalam jutaan rupiah/in million of Rupiah

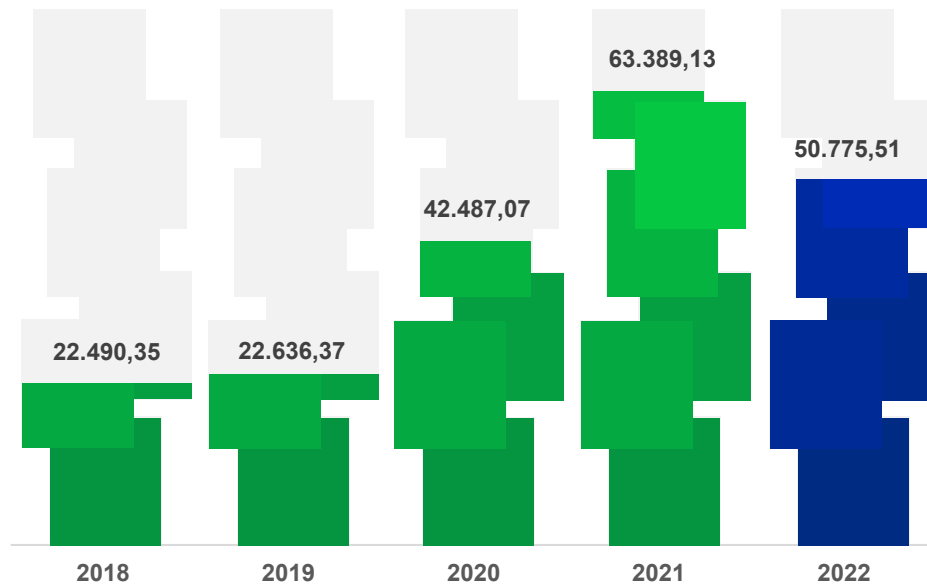
Imbal Jasa Penjaminan Accrual Basis
Guarantee Fee on an Accrual Base



dalam jutaan rupiah/in million of Rupiah

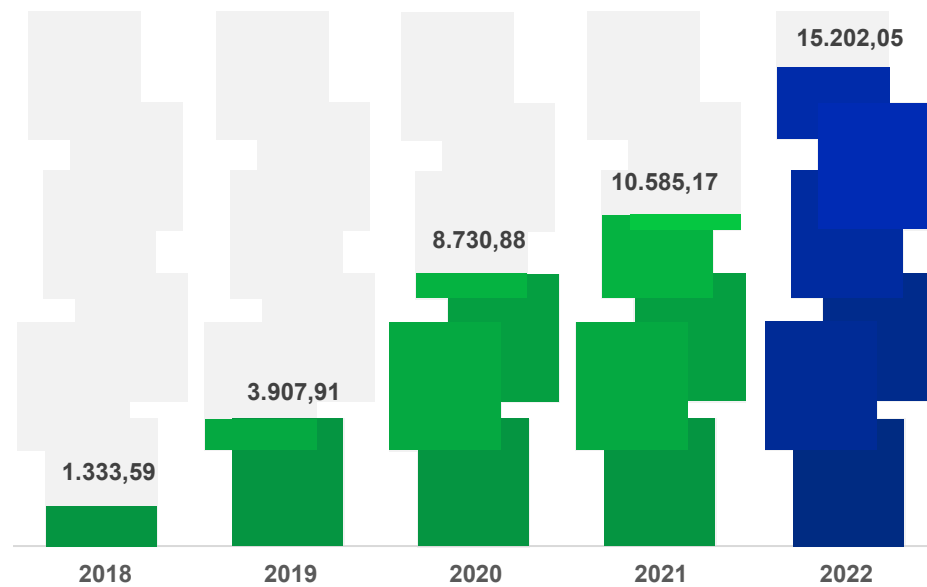
termasuk restitusi IJP/include Guarantee Fee of Restitution

Beban Klaim
Claim Expenses



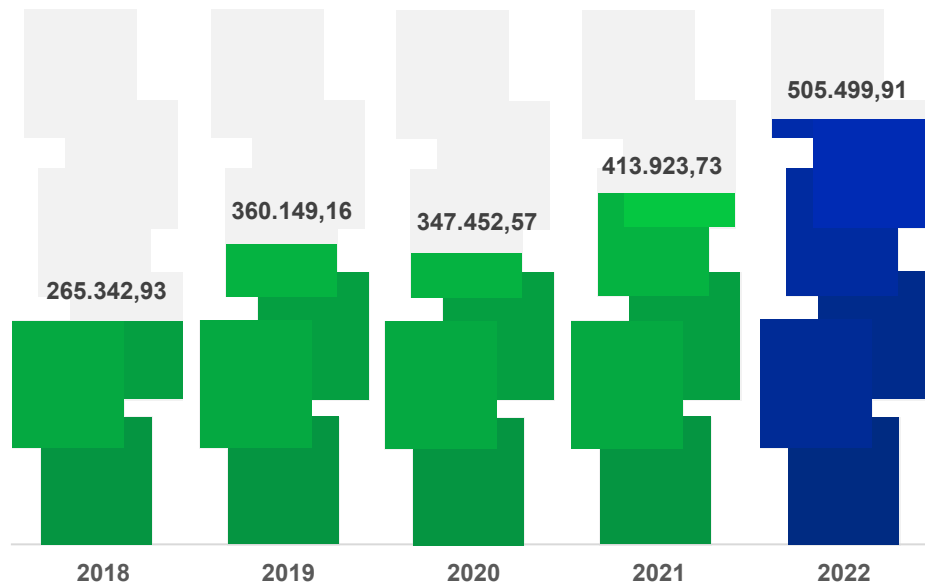
dalam jutaan rupiah/in million of Rupiah

Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Earnings After Tax



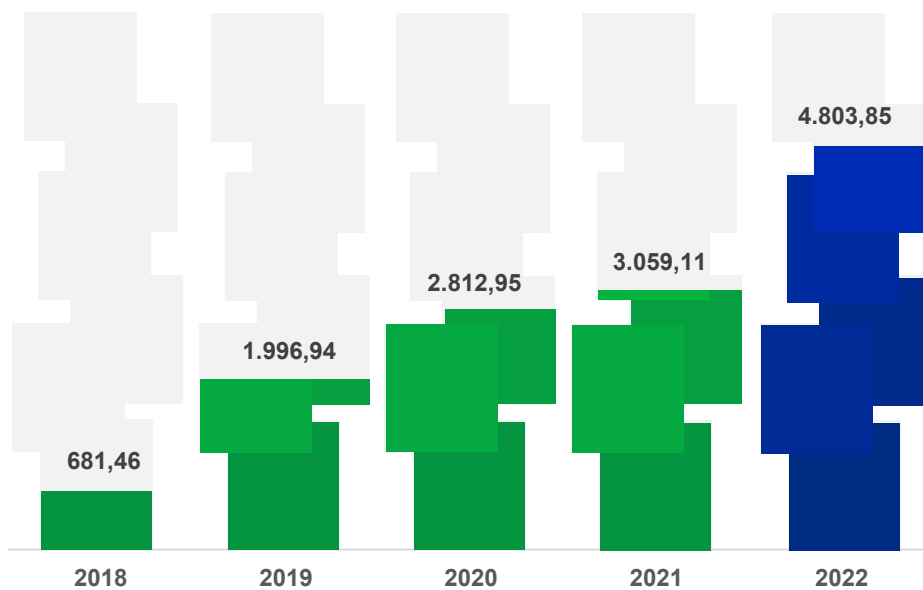
dalam jutaan rupiah/in million of Rupiah

Jumlah Aset
Total Assets



dalam jutaan rupiah/in million of Rupiah

Dividen
Dividend



dalam jutaan rupiah/in million of Rupiah

IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

Financial Performance Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2022

AS OF DECEMBER, 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2019	2020	2021	2022
ASET					
ASSETS					
ASET LANCAR					
CURRENT ASSETS					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	139.780,66	171.333,69	187.692,64	156.208,33	191.272,94
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	-	(13.497,57)	(4.405,11)	(878,88)
Surat Berharga Marketable Securities	42.117,68	49.163,25	63.482,84	78.971,23	104.755,20
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	-	(1.563,07)	(136,84)	(20,86)
Piutang Re/Cogaransi Re/Co-Guarantee Receivables	8.000,29	3.455,04	8.784,56	63.283,02	83.488,98
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	-	-	(4.560,60)	(5.226,12)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Income	659,58	1.089,87	1.306,36	12.815,54	10.024,53
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	-	-	(852,51)	(213,56)
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Advances and Prepaid Expenses	11.669,51	18.399,38	16.840,15	20.439,93	23.747,69
Piutang Lain-Lain Other Receivables	99,03	123,39	79,18	152,34	672,90
Properti Investasi Investment Property	2.445,00	2.472,00	2.495,10	2.495,10	2.495,10
JUMLAH ASET LANCAR TOTAL CURRENT ASSETS	204.771,76	246.036,61	265.620,18	324.410,43	410.117,93

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2022
AS OF DECEMBER, 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2019	2020	2021	2022
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS					
Beban Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	40.751,57	94.168,00	56.017,39	65.501,96	75.907,55
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	12.246,52	12.325,18	13.337,30	13.246,95	13.361,22
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	6.856,02	7.270,57	12.325,18	10.534,79	5.840,94
Aset Lain-Lain Other Assets	717,05	348,81	152,52	229,61	272,28
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR TOTAL NON-CURRENT ASSETS	60.571,17	114.112,55	81.832,39	89.513,31	95.381,98
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	265.342,93	360.149,16	347.452,57	413.923,73	505.499,91
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS LIABILITIES					
LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT TERM LIABILITIES					
Utang Pajak Taxes Payable	275,36	383,57	390,48	502,23	1.251,73
Utang Re/Cogaranansi Re/Co-Guarantee Payable	3.289,61	4.572,29	6.553,05	43.040,33	38.197,73
Utang Klaim Claim Payable	-	-	1.914,59	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	1.267,54	898,40	377,24	514,27	4.158,53
Penampungan Sementara Temporary Shelter	3.048,70	4.008,55	6.133,52	11.793,69	17.652,89
Utang Lancar Lainnya Other Current Payables	65,47	12,89	5,25	0,24	33,24
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	23.943,19	32.073,36	31.261,35	35.709,29	37.521,72
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK TOTAL SHORT TERM LIABILITIES	31.889,88	41.949,07	46.635,50	91.560,06	98.815,95

LAPORAN POSISI KEUANGAN
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DESEMBER 2022
AS OF DECEMBER, 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2019	2020	2021	2022
LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG TERM LIABILITIES					
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	70.909,00	151.295,08	91.805,86	98.071,34	128.048,37
Cadangan Klaim Claim Reserve	3.192,04	4.050,46	6.482,60	18.908,36	15.062,09
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Employee Benefits Liabilities	1.266,83	1.776,03	2.347,15	2.126,35	1.975,74
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LONG TERM LIABILITIES	75.367,87	157.121,57	100.635,61	119.106,06	145.086,20
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	107.257,75	199.070,65	147.271,11	210.666,11	243.902,15
EKUITAS EQUITY					
Modal Capital Stock	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	203.200,00
Cadangan Umum General Reserve	3.761,25	4.094,65	35.601,30	40.139,07	44.817,71
Saldo Laba Retained Earnings	1.333,59	3.907,91	8.730,88	10.585,17	15.202,05
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga The difference in The Fair Value of Securities	(66,00)	87,16	2.927,57	(569,21)	(1.340,13)
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja The difference in Remeasurement of Post-Employee Benefits Liability	(143,66)	(211,20)	(278,28)	(97,40)	(281,87)
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	158.085,18	161.078,51	200.181,46	203.257,62	261.597,76
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	265.342,93	360.149,16	347.452,57	413.923,73	505.499,91

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
 The accompanying notes form an integral part of these financial statements

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER, 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2019	2020	2021	2022
PENDAPATAN PENJAMINAN GUARANTEE INCOME					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah Guarantee Fee	41.301,95	47.732,91	130.550,63	183.093,49	166.944,97
Beban Akuisisi Acquisition Expenses	(5.414,68)	(6.835,63)	(22.669,04)	(30.728,20)	(24.228,09)
Restitusi IJP Guarantee Restitution	(1.434,28)	(1.773,30)	(2.467,49)	(3.202,34)	(5.039,82)
Manajemen Fee Management Fee	744,03	3.219,84	7.397,62	17.534,90	19.458,76
Beban Regaransi Re-Guarantee Expenses	(11.580,81)	(14.268,88)	(57.600,88)	(90.364,19)	(73.770,80)
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN TOTAL GUARANTEE INCOME	23.616,21	28.074,93	55.210,84	76.333,65	83.365,03
KLAIM CLAIM					
Beban Klaim Claim Expenses	(22.490,35)	(22.636,37)	(42.487,07)	(63.389,13)	(50.775,51)
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim Recovery (Establishment) in Reserve Claim	265,77	(858,42)	2.725,39	(3.637,83)	625,62
JUMLAH KLAIM TOTAL CLAIM	(22.224,58)	(23.494,80)	(39.761,68)	(67.026,97)	(50.149,90)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH GUARANTEE INCOME - NET	1.391,63	4.580,13	15.449,16	9.306,69	33.215,14
PENDAPATAN INVESTASI INVESTMENT INCOME	13.359,58	14.935,39	17.265,45	14.965,35	13.279,74
PENDAPATAN SUBROGASI SUBROGATION INCOME	3.231,63	3.218,32	1.815,94	2.621,93	1.924,57
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN- LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)	(1.649,13)	(2.379,18)	(13.257,26)	3.522,75	1.543,40
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES					
Beban Operasional Operating Expenses	(1.580,91)	(2.001,36)	(1.379,40)	(2.872,88)	(3.936,84)
Beban Sumber Daya Manusia Human Resource Expenses	(11.074,81)	(11.415,12)	(11.817,03)	(10.514,47)	(18.966,64)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER, 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2018	2019	2020	2021	2022
Beban Administrasi & Umum General and Administrative Expenses	(2.846,27)	(3.422,31)	(3.883,75)	(5.301,95)	(6.574,67)
JUMLAH BEBAN USAHA TOTAL OPERATING EXPENSES	(15.501,98)	(16.838,79)	(17.080,18)	(18.689,30)	(29.478,16)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK EARNINGS BEFORE TAX	831,73	3.515,88	4.193,11	11.727,41	20.484,68
BEBAN PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX EXPENSES					
Beban Pajak Kini Current Income Tax Expenses	-	-	-	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan Deferred Tax Benefits	501,86	392,04	4.537,77	(1.142,25)	(5.282,63)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN TOTAL INCOME TAX EXPENSES	501,86	392,04	4.537,77	(1.142,25)	(5.282,63)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN EARNINGS AFTER TAX	1.333,59	3.907,91	8.730,88	10.585,17	15.202,05
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME	117,19	85,61	2.675,05	(3.315,90)	(955,39)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)	1.450,78	3.993,52	11.405,92	7.269,27	14.246,66

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
 The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PERISTIWA DAN KINERJA PENTING

Important Events and Performance



16 Desember 2022
Desember 16, 2022

Kegiatan Focus Group Discussion dan Bimbingan Teknik Penyaluran Dana Bergulir yang diselenggarakan oleh LPDB-KUMKM.

Focus Group Discussion and Technical Guidance for the Distribution of Revolving Funds organized by LPDB-KUMKM.



07 Desember 2022
Desember 07, 2022

Rapat Kerja dengan Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dengan Agenda Evaluasi Kinerja terkait Penyertaan Modal Daerah.

Working Meeting with Commission III of Regional People's Representative Council of West Java Province, with a Performance Evaluation Agenda related to Regional Equity Participation.



06 Desember 2022
Desember 06, 2022

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Analisis Kebutuhan dari BSrE BSSN terkait Perseroan mengimplementasikan Sertifikat dan TTE.

Technical Guidance and Needs Analysis activities from the Electronic Certification Center National Cyber and Crypto Agency for the Republic of Indonesia (BSrE BSSN) related to the Company implementing Electronic Certificates and Signatures."



05 Desember 2022
Desember 05, 2022

Focus Group Discussion dengan Komite IV DPD Republik Indonesia dengan Tema "Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan".

The Board of Directors attended a Focus Group Discussion with Committee IV DPD Republic of Indonesia with the theme "Improving the Effectiveness of Financial Services Consumer Protection".



30 November 2022
November 30, 2022

Pertemuan bisnis antara PT Jamkrida Jabar dengan PT Bahana TCW Investment dan PT Bahana Kapital Investa.

Business meeting between PT Jamkrida Jabar and PT Bahana TCW Investment and PT Bahana Kapital Investa.



28 November 2022
November 28, 2022

Rapat Umum Pemegang Saham RKAP PT Jamkrida Jabar Tahun 2023.

General Meeting of Shareholders PT Jamkrida Jabar Business Plan for 2023.



24 November 2022
November 24, 2022

Penandatanganan MoU antara PT Jamkrida Jabar, PT Jamkrida Kalsel, PT Jamkrida Kaltim, dan PT Jamkrida Kalteng tentang Sinergi Penjaminan Bersama atas Produk Penjaminan.

The signing of the MoU between PT Jamkrida Jabar, PT Jamkrida Kalsel, PT Jamkrida Kaltim, and PT Jamkrida Kalteng concerning Co-Guarantee Synergy for Guarantee Products.



21 November 2022
November 21, 2022

Pra Rapat Umum Pemegang Saham RKAP PT Jamkrida Jabar Tahun 2023.

Pre-General Meeting of Shareholders PT Jamkrida Jabar Business Plan for 2023.



07 November 2022
November 07, 2022

Peluncuran "Pion Jabar" (Platform Penjaminan Online) yang merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Peruri dan PT Solusi Penjaminan Aman.

Launch of "Pion Jabar" (Online Guarantee Platform) which is a collaboration of the West Java Provincial Government with Peruri and PT Solusi Penjaminan Aman.



01 November 2022
November 01, 2022

Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022 PT Jamkrida Jabar dengan Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat.

PT Jamkrida Jabar Performance Evaluation Meeting for Quarter III 2022 with BUMD, Investment, and Development Administration Bureau of West Java Province.



27 Oktober 2022
October 27, 2022

Direksi PT Jamkrida Jabar menghadiri Kegiatan Focus Group Discussion dan Rapat Direksi ASPENDA.

The Directors of PT Jamkrida Jabar attended the Focus Group Discussion Activities and the ASPENDA Directors Meeting.



25 Oktober 2022
October 25, 2022

Penandatanganan PKS Penjaminan Bersama (Kogaransi) antara PT Jamkrida Jabar dengan PT Jamkrida Jateng.

The signing of the Joint Guarantee (Co-Guarantee) Cooperation Agreement between PT Jamkrida Jabar and PT Jamkrida Jateng.



20 Oktober 2022
October 20, 2022

Rapat Pembahasan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD untuk APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat.

Meeting on Discussion of Regional Equity Participation in Regional-Owned Enterprises for the West Java Provincial Expenditure Revenue Budget for the 2023 Fiscal Year with the Budget Agency of the Regional People's Representative Council of West Java Province.



04 Oktober 2022
October 04, 2022

PT Jamkrida Jabar menyelenggarakan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.

PT Jamkrida Jabar held Islamic Financial Literacy and Inclusion Activities..



03 Oktober 2022
October 03, 2022

Peringatan Hari Ulang Tahun PT Jamkrida Jabar ke-10

Commemoration of the 10th Anniversary of PT Jamkrida Jabar.



30 September 2022
September 30, 2022

Kunjungan Kerja Direksi PT Jamkrida Sumsel dalam rangka inisiasi kerja sama penjaminan bersama (kogaransi).

Work Visit of the Board of Directors of PT Jamkrida Sumsel in the context of initiating co-guarantee cooperation.



23 September 2022
September 23, 2022

Kunjungan Kerja Komisaris Utama
PT Jamkrida Jabar ke PT Jamkrida Jakarta.

Working Visit of the Chief Commissioner of
PT Jamkrida Jabar to PT Jamkrida Jakarta.



19 September 2022
September 19, 2022

Exit Meeting Pemeriksaan Unit Usaha Syariah
PT Jamkrida Jabar Tahun 2022 oleh
Departemen Pengawasan IKNB 2A Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).

PT Jamkrida Jabar Sharia Business Unit
Inspection Entry Meeting in 2022 by the IKNB
2A Supervision Department of the Financial
Services Authority.



12 September 2022
September 12, 2022

Entry Meeting Pemeriksaan Unit Usaha Syariah
PT Jamkrida Jabar Tahun 2022 oleh
Departemen Pengawasan IKNB 2A Otoritas
Jasa Keuangan (OJK).

PT Jamkrida Jabar Sharia Business Unit
Inspection Entry Meeting in 2022 by the IKNB 2A
Supervision Department of the Financial
Services Authority.



01 September 2022
September 01, 2022

Rapat Pembahasan Usulan Penyertaan Modal
Daerah (PMD) bersama DPRD Provinsi Jawa
Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

Discussion Meeting on Proposals for Regional
Capital Participation (PMD) with the West Java
Regional House of Representatives for Regional
Owned Enterprises (BUMD).



29 Agustus 2022
August 29, 2022

Rapat Evaluasi Kinerja PT Jamkrida Jabar Semester I Tahun 2022 dengan Biro BIA Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

PT Jamkrida Jabar Performance Evaluation Meeting for Semester I of 2022 with the BIA Bureau of the West Java Provincial Government.



02 Agustus 2022
August 02, 2022

Rapat Konsultasi dengan Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Rencana Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Consultation meeting with Commission III of the West Java Regional House of Representatives regarding the Plan for Regional Capital Participation (PMD) for Regional Owned Enterprises (BUMD).



19 Juli 2022
July 19, 2022

Direktur Utama PT Jamkrida Jabar berpartisipasi sebagai pemateri dalam Acara Forum Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat.

The President Director of PT Jamkrida Jabar participated as a speaker at the West Java Regency/City Assistant Economic and Development Assistant Forum Event.



12 Juli 2022
July 12, 2022

Direksi melakukan kunjungan bisnis dalam rangka optimalisasi kerja sama penjaminan pembiayaan antara PT Jamkrida Jabar dan Bank bjb Syariah.

The Directors conducted a business visit to optimize the financing guarantee cooperation between PT Jamkrida Jabar and Bank bjb Syariah.



24 Juni 2022
June 24, 2022

Audiensi Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Jabar dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat.

An audience of the Commissioner and Director of PT Jamkrida Jabar with the Head of Regional 2 West Java Financial Services Authority (OJK).



16 Juni 2022
June 16, 2022

Kegiatan Inklusi Keuangan PT Jamkrida Jabar dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Jawa Barat pada Festival Jagad UMKM Tahun 2022.

PT Jamkrida Jabar's Financial Inclusion Activities with Micro, Small, and Medium Enterprises in West Java at the 2022 Jagad UMKM Festival.



03 Juni 2022
June 03, 2022

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun Buku 2021.

Annual General Meeting of Shareholders of PT Jamkrida Jabar Fiscal Year 2021.



27 Mei 2022
May 27, 2022

Pra Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun Buku 2021.

Pre Annual General Meeting of Shareholders of PT Jamkrida Jabar Fiscal Year 2021.

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Financial Soundness Level

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, berikut hasil penilaian tingkat kesehatan keuangan PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2022:

Based on Circular Letter of Financial Service Authority (SEOJK) No. 18/SEOJK.05/2018 about Guarantee Agency's Soundness Level, the following are the results of the assessment of the Financial Soundness Level of PT Jamkrida Jabar as of December 31, 2022:

INDIKATOR INDICATOR	HASIL RESULT	KATEGORI SKOR SCORE CATEGORY	NILAI KOMPOSIT COMPOSIT VALUE
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio	415,03%	1	0,10
Gearing Ratio	26,16 Kali 26,16 Times	1	0,35
Rasio Rentabilitas Rentability Ratio			
a. Return On Asset	4,43%	2	0,11
b. BOPO Operational Costs on Operational Revenues	79,42%	1	0,12
c. Rasio Klaim Terhadap Pendapatan IJP The Ratio of Claim to Guarantee Fee Revenue	60,16%	1	0,12
Self Assessment GCG	Sangat Baik Very Good	1	0,20
TOTAL NILAI KOMPOSIT COMPOSITE TOTAL VALUE		1,00	
TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN FINANCIAL SOUNDNESS LEVEL		SANGAT SEHAT VERY HEALTHY	



LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners Report



Dini Rosdini
Komisaris Independen
Independent Commissioner

M. Taufiq Budi Santoso
Komisaris Utama
President Commissioner

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan-Nya kepada kita semua.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami selaku Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar ("Perseroan") menyampaikan laporan pengawasan Dewan Komisaris atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sebagai pertanggung-jawaban Dewan Komisaris atas amanah yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dewan Komisaris bersama Komite dibawah Dewan Komisaris secara periodik, telah menyampaikan arahan dan nasihat kepada Direksi untuk tetap berkomitmen menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas internal control dalam setiap aktivitas Perseroan, termasuk pada konsistensi pencapaian target RKAP Tahun 2022, implementasi strategi Perseroan, dan prospek usaha yang disusun Direksi.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Direksi dalam mengelola tantangan yang ada hingga akhirnya mampu membukukan kinerja Perusahaan yang baik.

Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja Direksi didasarkan atas kinerja operasional dan keuangan serta tingkat kesehatan Perseroan di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil yang dapat berdampak secara langsung pada kegiatan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris tentunya menyadari dalam kondisi demikian target RKAP tahun 2022 tidaklah mudah untuk diraih. Namun demikian

Dear shareholders and stakeholders,

First of all, let us praise and thank God Almighty for the abundance of blessings and gifts He has bestowed upon us all.

On this occasion, please allow us as the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar (the "Company") to submit a report on the supervision of the Board of Commissioners on the management of the Company for the financial year ending on December 31, 2022, as the responsibility of the Board of Commissioners for the mandate given by Shareholders and other Stakeholders.

The Board of Commissioners together with the Committees under the Board of Commissioners have periodically conveyed directions and advice to the Board of Directors to remain committed to implementing Good Corporate Governance, complying with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, as well as improving the quality of internal control in each of the Company's activities. including the consistency of achieving the Business Plan (BP) 2022 targets, implementation of the Company's strategy, and business prospects prepared by the Directors.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners expresses its appreciation for the success of the Board of Directors in managing the existing challenges so that they are finally able to record good Company performance.

The Board of Commissioner's assessment of the performance of the Board of Directors is based on operational and financial performance as well as the soundness of the Company amidst unstable economic conditions which can have a direct impact on the Company's business activities.

The Board of Commissioners certainly realizes that in such conditions the BP 2022 target is not

terdapat beberapa indikator operasional masih menunjukkan hasil yang baik.

easy to achieve. However, several operational indicators still show good results.

Laba Rugi

Perseroan mencatatkan Laba Bersih per 31 Desember 2022 senilai Rp15,20 miliar atau tercapai 213,26% dari RKAP 2022. Realisasi 31 Desember 2022 ini meningkat sebesar 43,62% dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021.

Profit or Loss

The company recorded a Earnings After Tax as of December 31, 2022 of IDR 15.20 billion or reached 213.26% of the BP 2022. The realization of December 31, 2022 increased by 43.62% compared to the realization of December 31, 2021.

Posisi Keuangan

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp505,50 miliar atau tercapai 122,75% dari RKAP 2022. Realisasi 31 Desember 2022 ini meningkat sebesar 22,12% dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2021.

Financial Position

The Company's Total Assets as of December 31, 2022 amounted to IDR 505.50 billion or reached 122.75% of the BP 2022. The realization of December 31, 2022 increased by 22.12% compared to the realization on 31 December 2021.

Liabilitas Jangka Pendek meningkat 7,92%, Liabilitas Jangka Panjang meningkat 21,81%, dan Ekuitas meningkat 28,70% apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021.

Short-Term Liabilities increased 7.92%, Long-Term Liabilities increased 21.81%, and Equity increased 28.70% when compared to the position as of December 31, 2021.

Pendapatan Penjaminan

Realisasi Pendapatan Penjaminan per 31 Desember 2022 masih di bawah RKAP 2022, yaitu baru mencapai 80,15% dari target. Realisasi ini lebih rendah atau menurun 8,82% dari realisasi 31 Desember 2021.

Guarantee Income

Realization of Guarantee Income as of December 31, 2022 is still below the BP 2022, which has only reached 80.15% of the target. This realization was lower or decreased by 8.82% from the realization on December 31, 2021.

Pendapatan Investasi

Realisasi Pendapatan Investasi Neto per 31 Desember 2022 masih di bawah RKAP 2022, yaitu baru mencapai 85,20% dari target. Realisasi ini lebih rendah atau menurun 11,26% dari realisasi 31 Desember 2021.

Investment Income

The realization of Net Investment Income as of December 31, 2022 is still below the BP 2022, which has only reached 85.20% of the target. This realization is lower or decreased by 11.26% from the realization on December 31, 2021.

Pendapatan Subrogasi

Realisasi Pendapatan Subrogasi 31 Desember 2022 di bawah RKAP 2022, yaitu tercapai

Subrogation Income

The realization of Subrogation Income on December 31, 2022 under the BP 2022, which

69,27% dari target. Realisasi ini lebih rendah atau menurun 26,60% dari realisasi 31 Desember 2021.

reached 69.27% of the target. This realization is lower or decreased by 26.60% from the realization on December 31, 2021.

Beban Klaim

Claim Expenses

Realisasi Beban Klaim per 31 Desember 2022 lebih rendah dari RKAP 2022, yaitu mencapai 76,50% dari target. Realisasi ini lebih rendah atau menurun 19,90% dari realisasi 31 Desember 2021.

Realization of Claim Expenses as of December 31, 2022 is lower than the BP 2022, reaching 76.50% of the target. This realization is lower or decreased by 19.90% from the realization on December 31, 2021.

Beban Usaha

Operating expenses

Realisasi Beban Usaha per 31 Desember 2022 masih lebih rendah dari RKAP 2022, yaitu mencapai 96,00% dari target. Realisasi ini lebih tinggi atau tumbuh 57,73% dari realisasi 31 Desember 2021.

The realization of Operating Expenses as of December 31, 2022 is still lower than the BP 2022, reaching 96.00% of the target. This realization is higher or grew 57.73% from the realization on December 31, 2021.

Realisasi Beban Operasional per 31 Desember 2022 terealisasi di atas RKAP 2022, yaitu mencapai 106,77%. Realisasi ini lebih tinggi atau tumbuh 37,03% dari realisasi 31 Desember 2021.

The realization of Operating Expenses as of December 31, 2022 was realized above the BP 2022, which reached 106.77%. This realization is higher or grew 37.03% from the realization of December 31, 2021.

Realisasi Beban SDM per 31 Desember 2022 masih di bawah RKAP 2022, yaitu mencapai 96,37%. Realisasi ini lebih tinggi atau tumbuh 80,39% dari realisasi 31 Desember 2021.

The realization of HR expenses as of December 31, 2022 is still below the BP 2022, reaching 96.37%. This realization is higher or grew 80.39% from the realization of December 31, 2021.

Realisasi Beban Administrasi dan Umum per 31 Desember 2022 masih di bawah RKAP 2022, yaitu mencapai 89,59%. Realisasi ini lebih tinggi atau tumbuh 24,00% dari realisasi 31 Desember 2021.

The realization of Administrative and General Expenses as of December 31, 2022 is still below the BP 2022, reaching 89.59%. This realization is higher or grew 24.00% from the realization on December 31, 2021.

Komposisi Penjaminan

Guarantee Composition

Realisasi Penjaminan Produktif per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi di 31 Desember 2021. Komposisi Penjaminan Produktif sebesar 23,17% sedangkan Penjaminan Non Produktif turun menjadi sebesar 76,83%. Walaupun proporsi Penjaminan Produktif mengalami trend yang selalu meningkat, namun Perseroan perlu memperhatikan komposisi ini karena masih belum sesuai dengan ketentuan di POJK

The realization of Productive Guarantee as of December 31, 2022 has increased when compared to the realization on December 31, 2021. The composition of Productive Guarantee was 23.17% while Non-Productive Guarantee decreased to 76.83%. Although the proportion of Productive Guarantee is always increasing, the Company needs to pay attention to this composition because it is still not in accordance

dengan batasan Penjaminan Produktif minimal sebesar 25%.

with the provisions in POJK with a minimum Productive Guarantee limit of 25%.

Gearing Ratio

Total Gearing Ratio (GR) per 31 Desember 2022 adalah 26,16 kali. Perusahaan harus terus mengambil langkah-langkah yang strategis agar GR senantiasa terjaga dan memenuhi ketentuan OJK.

Gearing Ratio

Total Gearing Ratio (GR) as of December 31, 2022, is 26.16 times. Companies must continue to take strategic steps so that GR is always maintained and meets OJK regulations.

Realisasi Penjaminan

Realisasi Volume Kredit per 31 Desember 2022 belum mampu mencapai target RKAP 2022, yaitu baru mencapai 76,05% dari target. Realisasi ini lebih rendah 2,23% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Guarantee Realization

The realization of Credit Volume as of December 31, 2022 has not been able to achieve the BP 2022 target, which has only reached 76.05% of the target. This realization was 2.23% lower than the same period the previous year.

Realisasi Volume Penjaminan per 31 Desember 2022 belum mampu mencapai target RKAP 2022, yaitu baru mencapai 75,78% dari target. Realisasi ini lebih rendah 5,52% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

The realization of the Guarantee Volume as of December 31, 2022 has not been able to achieve the BP 2022 target, which has only reached 75.78% of the target. This realization was 5.52% lower than the same period the previous year.

Realisasi IJP Accrual Basis per 31 Desember 2022 belum mencapai target RKAP 2022, yaitu baru mencapai 77,73% dari target. Hal ini sejalan dengan realisasi IJP Cash Basis per 31 Desember 2022 yang juga belum melampaui RKAP 2022, yaitu baru mencapai 82,93% dari target.

The realization of the Guarantee Fee on an Accrual Base as of December 31, 2022 has not reached the BP 2022 target, which has only reached 77.73% of the target. This is in line with the realization of Guarantee Fee on a Cash Base as of December 31, 2022, which has not exceeded the RKAP 2022, which has only reached 82.93% of the target.

TATA KELOLA, PENGELOLAAN RISIKO, DAN KEPATUHAN

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, AND COMPLIANCE

Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengurusan Perseroan. Sejalan dengan GCG, pengelolaan risiko juga cukup mendapat perhatian dan dilakukan secara cukup memadai dalam proses bisnis, walaupun upaya menuju pengelolaan risiko yang lebih handal masih perlu dilakukan.

The Board of Commissioners is of the view that the Board of Directors has endeavored to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in managing the Company. In line with GCG, risk management also receives sufficient attention and is carried out adequately in business processes, although efforts towards more reliable risk management still need to be carried out.

Dewan Komisaris juga berpandangan bahwa aspek ketaatan dalam pengurusan Perseroan

The Board of Commissioners is also of the view that the aspect of compliance in managing the

terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus lebih ditingkatkan termasuk pada ketentuan internal yang berlaku di Perseroan. Dalam hal ini, hasil-hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik tidak melaporkan adanya penyimpangan yang signifikan dan kecurangan.

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dewan Komisaris memantau, mencermati, membahas, dan menyampaikan pandangan serta saran terhadap langkah-langkah pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pada laporan-laporan yang disampaikan oleh Direksi ataupun data yang diperoleh Dewan Komisaris melalui permintaan kepada Direksi. Forumnya dalam pertemuan bulanan Dewan Komisaris dan Direksi atau pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan atau permintaan Dewan Komisaris atau Direksi.

Selanjutnya sebagai bentuk pelaksanaan tata kelola yang baik, secara berkala Dewan Komisaris melaporkan tugas pengawasannya kepada pemegang saham melalui Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Direksi dan jajaran Manajemen Perusahaan telah memberikan kerja sama yang baik dan tidak ditemukan hal-hal yang menghambat Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris akan terus membangun hubungan kerja yang efektif dan harmonis bersama Direksi agar pengelolaan Perseroan senantiasa berjalan sesuai harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Secara ringkas, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

Company with the applicable laws and regulations must be further improved, including the internal provisions that apply in the Company. In this case, the results of audits by external parties such as the Financial Services Authority (OJK) and Public Accounting Firms did not report any significant irregularities and fraud.

SUPERVISION AND GIVING OF ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners monitors, examines, discusses, and conveys views and suggestions on the steps in managing the Company carried out by the Board of Directors. These activities are carried out based on reports submitted by the Board of Directors or data obtained by the Board of Commissioners through requests to the Board of Directors. The forum is in the monthly meetings of the Board of Commissioners and Directors or at certain times according to the needs or requests of the Board of Commissioners or Directors.

Furthermore, as a form of implementing good governance, the Board of Commissioners periodically reports its supervisory duties to shareholders through Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Reports and Reports on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties..

The Board of Directors and the Management of the Company have provided good cooperation and nothing has been found to hinder the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners will continue to build an effective and harmonious working relationship with the Board of Directors so that the management of the Company continues to meet the expectations of shareholders and stakeholders.

In summary, the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners in 2022 is as follows:

Pengawasan kepada Direksi meliputi aspek sebagai berikut:

1. Aspek Pengelolaan Kinerja Perusahaan;
2. Aspek Pengembangan Usaha;
3. Aspek Pengembangan SDM;
4. Aspek Tanggung Jawab Sosial Perseroan;
5. Aspek Satuan Pengawas Internal (SPI); dan
6. Tata Kelola Perseroan.

Supervision of the Board of Directors includes the following aspects:

1. Aspects of Company Performance Management;
2. Business Development Aspects;
3. Aspects of HR Development;
4. Aspects of Corporate Social Responsibility;
5. Aspects of the Internal Supervisory Unit (SPI); and
6. Corporate Governance.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

During 2022 there was no change in the composition of the Board of Commissioners.

APRESIASI

Capaian kinerja PT Jamkrida Jabar tentunya tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi banyak pihak. Oleh karenanya, perkenankan kami atas nama Dewan Komisaris, menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan YKP bank bjb sebagai pemegang saham, dan mitra-mitra usaha kami, atas kepercayaan yang diberikan.

Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan seluruh karyawan atas dedikasi, integritas, dan kerja kerasnya untuk menjadikan PT Jamkrida Jabar tetap pada jalurnya menuju pencapaian visi dan misi Perseroan di tahun 2022 dengan segala tantangannya.

Kami berharap agar hubungan yang terjalin dengan baik selama ini akan terus terawat di masa mendatang. Dengan kerja sama yang baik dan kerja keras, kami optimis dapat terus membantu dan mengembangkan pelaku KUMKM dalam meningkatkan usahanya demi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat pada khususnya dan pada gilirannya juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

APPRECIATION

PT Jamkrida Jabar's performance achievements cannot be separated from the support and collaboration of many parties. Therefore, allow us on behalf of the Board of Commissioners to express our gratitude to all stakeholders, namely the West Java Provincial Government and YKP bank bjb as shareholders, and our business partners, for the trust given.

The Board of Commissioners also expresses its highest appreciation to the Board of Directors and all employees for their dedication, integrity, and hard work to keep PT Jamkrida Jabar on track toward achieving the Company's vision and mission in 2022 with all its challenges.

We hope that the relationship that has been well established so far will continue to be maintained in the future. With good cooperation and hard work, we are optimistic that we can continue to help and develop CMSMEs actors in increasing their business for economic growth in West Java Province in particular and in turn also contributing to national economic growth.

Semoga kita semua selalu dalam bimbingan, lindungan, serta kasih sayang Tuhan Yang Maha Kuasa.

May we all always be under the guidance, protection, and love of God Almighty.

Bandung, Juni 2023

Bandung, June 2023

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

PT Jamkrida Jabar

M. Taufiq Budi Santoso

Komisaris Utama

President Commissioner

Dini Rosdini

Komisaris Independen

Independent Commissioner

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Board of Sharia Supervisory Report



Khozin Abu Faqih
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Board of Sharia Supervisory

Zaini Abdul Malik
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Board of Sharia Supervisory

**Assalamu'alaikum warahmatullaahi
wabarakaatuh**

**Pemegang saham dan pemangku
kepentingan yang terhormat,**

Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah, Muhammad SAW, serta mudah-mudahan Allah SWT juga senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Perkenankanlah kami selaku Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar menyampaikan bahwa DPS merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam merealisasikan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN-MUI antara lain: Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah dan Fatwa DSN-MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah. DPS berperan sebagai pengawas di dalam Perusahaan Penjaminan Syariah ataupun Perusahaan Penjaminan yang melakukan sebagian usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah/UUS) seperti PT Jamkrida Jabar.

Sesuai tugas dan fungsinya, DPS telah mengawasi operasional Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar agar sesuai dengan nilai-nilai syariah serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. DPS juga telah memberikan nasihat dan saran kepada Manajemen mengenai prinsip-prinsip syariah.

PENGAWASAN DI TAHUN 2022

Selama tahun 2022, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat baik rapat internal, rapat dengan Direksi atau dengan jajaran di bawah Direksi, atau rapat dengan Dewan Komisaris.

**Assalamu'alaikum warahmatullaahi
wabarakaatuh**

Dear shareholders and stakeholders,

First and foremost, let us give thanks to the presence of Allah SWT, blessings and greetings may always be abundantly bestowed on the Messenger of Allah, Muhammad SAW, and hopefully Allah SWT will also always bestow His grace, prosperity, and guidance to all of us.

Please allow us, as the Board of Sharia Supervisory (BSS) of PT Jamkrida Jabar's Sharia Business Unit to convey that the BSS is an extension of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in realizing the fatwas that have been decided by DSN-MUI, including: DSN-MUI Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 concerning Kafalah and DSN-MUI Fatwa No. 74/DSN-MUI/I/2009 concerning Sharia Guarantee. The BSS acts as a supervisor in a Sharia Guarantee Company or a Guarantee Company that conducts part of the Guarantee business based on Sharia Principles (Sharia Business Unit/SBU) such as PT Jamkrida Jabar.

By its duties and functions, BSS has overseen the operations of PT Jamkrida Jabar's Sharia Business Unit so that it conforms to Sharia values and the principles of good corporate governance. DPS has also provided advice and suggestions to Management regarding Sharia principles.

SUPERVISION IN 2022

During 2022, BSS has carried out its duties and responsibilities properly by the principles of Good Corporate Governance. To carry out these duties and responsibilities, BSS is involved in a series of meeting activities both internal meetings, meetings with the Board of Directors or with the ranks under the Board of Directors, or meetings with the Board of Commissioners.

DPS juga telah melakukan review atas suatu kebijakan atau SOP yang telah/akan ditetapkan dengan memberikan opini atau rekomendasi berdasarkan ketentuan Syariah serta melakukan review atas pelaksanaan produk penjaminan syariah maupun pelayanan yang diberikan kepada mitra dengan cara mengambil uji petik transaksi sebagai bahan penilaian dan memberikan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan ketentuan syariah.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPS PT Jamkrida Jabar selama tahun 2022 antara lain mencakup:

1. Mewakili dan/atau mendampingi Perseroan untuk rapat, diskusi dan konsultasi kepada pihak eksternal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
2. Rapat dan diskusi dengan pihak internal terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
3. Menilai secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap pelaksanaan penjaminan syariah.
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru atau fitur produk yang dituangkan dalam ketentuan internal atau SOP agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.
6. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah serta menyampaikan hasil evaluasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Berdasarkan hasil pengawasan selama tahun 2022, DPS menyampaikan bahwa secara umum operasional UUS PT Jamkrida Jabar telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa DSN-MUI, dan opini DPS. Kesalahan/kekurangan yang terjadi pada kegiatan operasional dikarenakan perbedaan

BSS has also reviewed a policy or SOP that has been/will be stipulated by providing opinions or recommendations based on Sharia provisions as well as reviewing the implementation of Sharia guarantee products and services provided to partners by taking a sample transaction test as an assessment material and providing recommendations based on sharia provisions.

Oversight activities carried out by BSS PT Jamkrida Jabar during 2022 include:

1. Representing and or accompanying the Company for meetings, discussions, and consultations with external parties related to compliance with Sharia principles.
2. Meetings and discussions with internal parties related to compliance with Sharia principles.
3. Assess periodically the fulfillment of Sharia principles for the implementation of Sharia guarantees.
4. Supervise the process of developing new products or product features as outlined in internal provisions or SOPs so that they comply with the DSN-MUI fatwas.
5. Request data and information related to sharia aspects from the Company's Internal Supervisory Unit (ISU) in carrying out their duties.
6. Evaluate the accountability of the Board of Directors for the implementation of risk management policies related to compliance with Sharia principles and submit the results of the evaluation to the Board of Directors and Board of Commissioners.
7. Report the results of the implementation of BSS duties and responsibilities to the Board of Directors and Board of Commissioners, the Financial Services Authority (OJK), and DSN-MUI in the form of BSS Supervision Reports.

Based on the results of supervision for 2022, BSS said that in general the operations of SBU PT Jamkrida Jabar were by sharia principles, DSN-MUI fatwa, and BSS opinion. Errors or defects that occur in operational activities are due to differences in individual understanding of

pemahaman individu atas suatu produk dan pedoman operasional penjaminan oleh UUS. Atas kesalahan/kekurangan tersebut, DPS merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan-perbaikan setelah kesalahan/kekurangan tersebut diketahui. Apabila terdapat unsur kesengajaan sehingga terdapat prinsip syariah yang tidak terpenuhi, maka terhadap kesalahan/kekurangan yang disengaja tersebut harus ada konsekuensi.

Pemenuhan prinsip syariah memang tidak mudah, dan juga tidak boleh dianggap sederhana. Hal ini terkait dengan sah atau tidaknya pendapatan yang diperoleh dan penjaminan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya KUMKM di Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, seluruh kegiatan operasional UUS harus dipastikan berjalan sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku bagi UUS. Insya Allah dengan kesadaran dan komitmen yang kuat maka kualitas UUS PT Jamkrida Jabar akan semakin baik pada tahun-tahun yang akan datang.

Dengan kerja sama yang baik dari Direksi dan segenap karyawan PT Jamkrida Jabar, semua kegiatan baik pada aspek pengembangan produk baru hingga kegiatan operasional penjaminan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yang berlaku di UUS PT Jamkrida Jabar.

Sebagaimana diketahui, bahwa DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pelaksanaan dan pengembangan produk penjaminan yang dimiliki oleh UUS PT Jamkrida Jabar. Kajian telah dilakukan terhadap pemenuhan prinsip syariah terutama dalam hal kesesuaian atau adanya ketidaksesuaian serta ada dan tidaknya rujukan fatwa. Seluruh aktivitas DPS tersebut juga telah didokumentasikan dan dilaporkan kepada OJK dan DSN-MUI dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan komposisi DPS.

a product, and SBU guarantees operational guidelines. For these error or lack, BSS recommends that improvements be made immediately after the error or lack are known. If there is an intentional element so that there are Sharia principles that are not fulfilled, then there must be consequences for these intentional mistakes or deficiencies.

Fulfilling Sharia principles is not easy, nor should it be considered simple. This is related to whether the income earned is legal or not and the guarantees given to the community, especially CMSMEs in West Java Province.

Therefore, all SBU operational activities must be ensured to run according to and comply with Sharia principles and provisions that apply to SBU. God willing, with strong awareness and commitment, the quality of SBU PT Jamkrida Jabar will get better in the years to come.

With good cooperation from the Board of Directors and all employees of PT Jamkrida Jabar, all activities from the aspect of new product development to guarantee operational activities can be run by the GCG principles that apply at SBU PT Jamkrida Jabar.

As is known, BSS carries out its duties and responsibilities to oversee the implementation and development of guarantee products owned by SBU PT Jamkrida Jabar. Studies have been carried out on the fulfillment of Sharia principles, especially in terms of conformity or non-compliance and whether or not there is a fatwa reference. All BSS activities have also been documented and reported to OJK and DSN-MUI in the form of BSS Supervision Reports.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

During 2022 there was no change in the composition of BSS.

APRESIASI

DPS memberikan apresiasi atas kerja keras dan pencapaian manajemen dan seluruh karyawan PT Jamkrida Jabar khususnya UUS dengan kinerja yang baik.

Dalam kesempatan ini DPS juga senantiasa mengingatkan manajemen PT Jamkrida Jabar, khususnya Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar, agar tetap berkomitmen untuk menjaga pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, DPS berharap agar UUS PT Jamkrida Jabar dapat turut mewujudkan visi PT Jamkrida Jabar menjadi perusahaan penjaminan kredit terpercaya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam hal penjaminan pembiayaan/pinjaman syariah.

**Wassalamu'alaikum warahmatullaahi
wabarakaatuh**

APPRECIATION

BSS appreciates the hard work and achievements of the management and all employees of PT Jamkrida Jabar, especially SBU with good performance.

On this occasion BSS also constantly reminds the management of PT Jamkrida Jabar, especially PT Jamkrida Jabar's Sharia Business Unit, to remain committed to maintaining compliance with Sharia principles and compliance with applicable laws and regulations.

Finally, BSS hopes that SBU PT Jamkrida Jabar can help realize PT Jamkrida Jabar's vision of becoming a trusted credit guarantee company that contributes to regional economic growth, especially in terms of guaranteeing sharia financing or loans.

**Wassalamu'alaikum warahmatullaahi
wabarakaatuh**

Bandung, Juni 2023
Bandung, June 2023

Dewan Pengawas Syariah
Board of Sharia Supervisory
PT Jamkrida Jabar
Unit Usaha Syariah
Sharia Business Unit

Zaini Abdul Malik
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Board of Sharia Supervisory

Khozin Abu Faqih
Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Board of Sharia Supervisory

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report



Agus Subrata
Direktur Operasional
Operational Director

Yanti Rachmawati
Direktur Utama
President Director

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan kasih sayang-Nya PT Jamkrida Jabar ("Perseroan") mampu melewati tahun 2022 dengan kinerja yang cukup baik, di tengah ketatnya persaingan bisnis pada industri penjaminan.

Tantangan bisnis tahun 2022 diawali dengan pandemi Covid-19. Sejak kemunculan kasus Covid-19 pertama, Indonesia sebenarnya sudah melalui masa-masa kritis pada puncak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat tahun 2020 dan 2021 lalu.

Memasuki tahun 2022, Covid-19 di Indonesia sebenarnya sudah mulai mereda. Hal ini terlihat dari adanya penurunan level PPKM di beberapa Kabupaten/Kota dan tingginya capaian vaksinasi nasional.

Meskipun demikian, pandemi masih memberikan dampak kepada beberapa sektor bisnis dan tentunya masih membebani pelaku usaha tidak terkecuali KUMKM.

Menjadi suatu kehormatan bagi Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022. Perseroan secara fundamental di tahun 2022 masih menunjukkan tren kinerja positif baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

KONDISI EKONOMI

Pada triwulan IV 2022, perekonomian global masih terus menghadapi hantaman perlambatan pertumbuhan ekonomi yang juga merupakan bagian dari efek lanjutan *downside risks* dari pandemi yang hingga kini belum sepenuhnya usai.

Selain itu, dunia juga dihadapkan pada konflik geopolitik yang tengah terjadi menyebabkan kenaikan harga komoditas yang mendorong terjadinya inflasi tinggi di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju.

Dear shareholders and stakeholders,

Praise and gratitude to the presence of God Almighty, because of all His affection PT Jamkrida Jabar (the "Company") was able to get through 2022 with quite a good performance, amidst intense business competition in the guarantee industry.

The business challenges of 2022 began with the Covid-19 pandemic. Since the emergence of the first Covid-19 case, Indonesia has gone through critical periods at the peak of the emergency Enforcement of Community Activity Restrictions (ECAR) in 2020 and 2021.

Entering 2022, Covid-19 in Indonesia has started to subside. This can be seen from the decline in ECAR levels in several Regencies/Cities and the high achievement of national vaccinations.

Even so, the pandemic still has an impact on several business sectors and of course, it still burdens business actors, including CMSMEs.

It is an honor for the Board of Directors to submit the Company's Annual Report for Fiscal Year 2022. Fundamentally, the Company will still show positive performance trends in both financial and non-financial aspects in 2022.

ECONOMIC CONDITIONS

In the fourth quarter of 2022, the global economy will continue to be hit by a slowdown in economic growth which is also part of the continuing effects of downside risks from the pandemic, which has not yet been completely over.

Apart from that, the world is also faced with the ongoing geopolitical conflict which has caused an increase in commodity prices which has led to high inflation throughout the world, especially in developed countries.

Berdasarkan data BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tetap kuat. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi yakni 5,01% (yoy), di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31% (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70% (yoy).

BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih tercatat tumbuh positif, bahkan selalu di atas nasional. Ekonomi Jawa Barat triwulan IV 2022 terhadap triwulan IV 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,61% (yoy).

Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,45% meningkat dibanding capaian tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,74%.

KINERJA PERSEROAN

Melalui dukungan dan kerja sama yang kuat dari dengan para pemangku kepentingan, kami dapat mewujudkan komitmen untuk menciptakan kinerja yang positif serta tumbuh secara kompetitif.

Kinerja Perseroan (Konsolidasi) tahun 2022 menunjukkan capaian sebagai berikut:

- a. Volume Kredit tahun 2022 adalah senilai Rp7,98 triliun atau terealisasi sebesar 76,05% dari RKAP 2022, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp3,50 triliun (teralisasi 97,37%) dan Non Produktif senilai Rp4,47 triliun (teralisasi 64,93%). Volume Penjaminan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,23% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.
- b. Volume Penjaminan tahun 2022 adalah senilai Rp6,79 triliun atau terealisasi sebesar 75,78% dari RKAP 2022, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp2,39 triliun (teralisasi 95,64%) dan Non Produktif senilai Rp4,41 triliun (teralisasi 68,13%). Volume Penjaminan tahun 2022

Based on CBS data, Indonesia's economic growth in 2022 will remain strong. In the fourth quarter of 2022, Indonesia's economic growth remained high at 5.01% (yoy) amidst a slowing trend in global economic growth. With these developments, Indonesia's overall growth in 2022 was recorded at 5.31% (yoy), a much increase from the previous year's achievement of 3.70% (yoy).

CBS also noted that West Java's economic growth still recorded positive growth, even always above the national one. West Java's economy in the fourth quarter of 2022 against the fourth quarter of 2021 grew by 4.61% (yoy).

West Java's economy throughout 2022 will experience a growth of 5.45%, an increase compared to the achievements in 2021, with a growth of 3.74%.

COMPANY PERFORMANCE

Through strong support and cooperation from stakeholders, we can realize our commitment to creating positive performance and growing competitively.

The Company's performance (Consolidated) in 2022 shows the following achievements:

- a. Credit Volume in 2022 amounted to IDR 7.98 trillion or realized 76.05% of the BP 2022, of which Productive Credit Volume was IDR 3.50 trillion (realized 97.37%) and Non-Productive Credit Volume was IDR 4.47 trillion (realized 64.93%). The guarantee volume in 2022 decreased by 2.23% compared to the realization in 2021.
- b. The Guarantee Volume in 2022 is IDR 6.79 trillion or realized by 75.78% of the BP 2022, of which the Productive Guarantee Volume is IDR 2.39 trillion (realized 95.64%) and Non-Productive is IDR 4.41 trillion (realized 68.13%). The guarantee

- | | |
|--|--|
| <p>mengalami penurunan sebesar 5,52% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.</p> <p>c. Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2022 adalah senilai Rp198,05 miliar atau terealisasi sebesar 82,93% dari RKAP 2022, dimana volume IJP Produktif senilai Rp49,98 miliar (teralisasi 99,47%) dan Non Produktif senilai Rp148,08 miliar (teralisasi 78,52%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,69% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.</p> <p>d. Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2022 adalah senilai Rp161,91 miliar atau terealisasi sebesar 77,73% dari RKAP 2022, dimana volume IJP Produktif senilai Rp42,22 miliar (teralisasi 87,43%) dan Non Produktif senilai Rp119,69 miliar (teralisasi 74,80%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 10,00% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.</p> <p>e. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2022 adalah sebanyak 75.355 unit atau terealisasi sebesar 110,98% dari RKAP 2022. KUMKM Terjamin tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 17,63 % jika dibandingkan tahun 2021.</p> <p>f. Total Aset Perseroan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp505,50 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 22,12% jika dibandingkan tahun 2021.</p> <p>g. Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp261,60 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 28,70% jika dibandingkan tahun 2021.</p> <p>h. Pada tahun 2022 Perseroan membukukan Laba Bersih senilai Rp15,20 miliar atau sebesar 213,26% dari RKAP 2022 yang ditargetkan senilai Rp7,13 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 43,62% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.</p> <p>i. Pada Tahun 2022 Perseroan membukukan Pendapatan Penjaminan senilai Rp83,37 miliar atau mencapai</p> | <p>volume in 2022 decreased by 5.52% when compared to the realization in 2021.</p> <p>c. Guarantee Fee on a Cash Base income in 2022 is IDR 198.05 billion or realized by 82.93% of the BP 2022, of which the volume of Productive Guarantee Fee was IDR 49.98 billion (realized 99.47%) and Non-Productive was IDR 148.08 billion (realized 78.52%). Guarantee Fee on a Cash Base income in 2022 grew by 1.69% compared to the realization in 2021.</p> <p>d. Guarantee Fee on an Accrual Base income for 2022 is IDR 161.91 billion or realized by 77.73% of the BP 2022, where the volume of Productive Guarantee Fee is IDR 42.22 billion (realized 87.43%) and Non-Productive worth IDR 119.69 billion (realized 74.80%). Guarantee Fee on an Accrual Base income in 2022 decreased by 10.00% when compared to the realization in 2021.</p> <p>e. The number of Guaranteed CMSMEs in 2022 is 75,355 units or realized by 110.98% of the BP 2022. Guaranteed CMSMEs in 2022 experienced a growth of 17.63% compared to 2021.</p> <p>f. The Company's Total Assets as of December 31, 2022 were valued at IDR 505.50 billion or experienced a growth of 22.12% compared to 2021.</p> <p>g. The Company's Total Equity as of December 31, 2022 was valued at IDR 261.60 billion or experienced a growth of 28.70% compared to 2021.</p> <p>h. In 2022, the Company posted a Earnings After Tax of IDR 15.20 billion or 213.26% of the BP 2022 which is targeted at IDR 7.13 billion and experienced a growth of 43.62% compared to the realization in 2021.</p> <p>i. In 2022, the Company posted Guarantee Income of IDR 83.37 billion or reached</p> |
|--|--|

93,39% dari RKAP 2022 dan tumbuh sebesar 9,21% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

93.39% of the BP 2022 and grew by 9.21% compared to the realization in 2021.

- j. Pada Tahun 2022 Perseroan memperoleh Pendapatan Investasi senilai Rp13,28 miliar atau mencapai 85,20% dari RKAP 2022 dan turun sebesar 11,26% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.
- k. Pada Tahun 2022 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp1,92 miliar atau mencapai 69,27 % dari RKAP 2022 dan mengalami penurunan sebesar 26,60% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.
- l. Pada Tahun 2022 Perseroan memperoleh Pendapatan Lain-Lain senilai Rp1,54 miliar atau mengalami penurunan sebesar 56,19% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.
- m. Total Klaim Neto yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2022 adalah senilai Rp50,78 miliar atau mencapai 76,50% dari RKAP 2022 dan mengalami penurunan sebesar 19,90% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.
- n. Beban Usaha Perseroan di Tahun 2022 adalah senilai Rp29,48 miliar atau mencapai 96,00% dari RKAP 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 57,73% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

- j. In 2022, the Company earned Investment Income of IDR 13.28 billion or reached 85.20% of the BP 2022 and decreased by 11.26% compared to the realization in 2021.
- k. In 2022, the Company obtained Subrogation Income of IDR 1.92 billion or reached 69.27% of the BP 2022 and decreased by 26.60% compared to the realization in 2021.
- l. In 2022, the Company obtained Other Income of IDR 1.54 billion or decreased by 56.19% compared to the realization in 2021.
- m. Total Net Claims paid by the Company in 2022 amounted to IDR 50.78 billion or reached 76.50% of the BP 2022 and decreased by 19.90% compared to the realization in 2021.
- n. The Company's Operating Expenses in 2022 amounted to IDR 29.48 billion or reached 96.00% of the BP 2022 and increased by 57.73% compared to the realization in 2021.

Adapun Kinerja Unit Usaha Syariah menunjukkan capaian sebagai berikut:

The performance of the Sharia Business Unit shows the following achievements:

- a. Volume Kafalah tahun 2022 adalah sebesar Rp867,12 miliar atau terealisasi sebesar 126,64% dari RKAP 2022, dimana volume kafalah produktif sebesar Rp375,24 miliar (teralisasi 136,71%) dan non produktif sebesar Rp491,88 miliar (teralisasi 119,90%). Volume Kafalah tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 38,26 % dibandingkan realisasi tahun 2021.
- b. Volume IJK Cash Basis tahun 2022 adalah sebesar Rp15,51 miliar atau terealisasi

- a. The volume of Kafalah in 2022 is IDR 867.12 billion or realized by 126.64% of the BP 2022, of which the volume of productive kafalah is IDR 375.24 billion (realized 136.71%) and non-productive is IDR 491.88 billion (realized 119.90%). The volume of Kafalah in 2022 grew by 38.26 % compared to the realization in 2021.
- b. The volume of Guarantee Fee on a Cash Base in 2022 was IDR 15.51 billion or

sebesar 124,42% dari RKAP 2022, dimana volume IJK produktif sebesar Rp5,98 miliar (teralisasi 124,39%) dan non produktif sebesar Rp9,53 miliar (teralisasi 124,44%). Volume IJK Cash Basis tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 52,69% dibandingkan realisasi tahun 2021.

realized by 124.42% of the BP 2022, where the volume of productive Guarantee Fee was IDR 5.98 billion (realized 124.39%) and non-productive was IDR 9.53 billion (realized 124.44%). The volume of Guarantee Fee on a Cash Base in 2022 grew by 52.69% compared to the realization in 2021.

- | | |
|--|--|
| <p>c. Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2022 adalah sebesar Rp13,42 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,92% dibandingkan realisasi tahun 2021.</p> <p>d. Pendapatan Investasi tahun 2022 adalah sebesar Rp2,23 miliar atau mengalami penurunan sebesar 15,74% dibandingkan realisasi tahun 2021.</p> <p>e. Beban Klaim tahun 2022 adalah sebesar Rp2,88 miliar atau mengalami penurunan sebesar 21,67% dibandingkan realisasi tahun 2021.</p> <p>f. Beban Usaha tahun 2022 adalah sebesar Rp1,79 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 98,83% dibandingkan realisasi tahun 2021.</p> <p>g. Laba Bersih Tahun Berjalan adalah sebesar Rp4,27 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% dibandingkan realisasi tahun 2021.</p> <p>h. Total Aset UUS tahun 2022 adalah senilai Rp49,57 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,83% dibandingkan realisasi tahun 2021 senilai Rp43,93 miliar.</p> | <p>c. Guarantee Fee on an Accrual Base income in 2022 was IDR 13.42 billion or experienced a growth of 12.92% compared to the realization in 2021.</p> <p>d. Investment Income in 2022 was IDR 2.23 billion or decreased by 15.74% compared to the realization in 2021.</p> <p>e. Claim Expense in 2022 amounted to IDR 2.88 billion or decreased by 21.67% compared to the realization in 2021.</p> <p>f. Operating expenses in 2022 amounted to IDR 1.79 billion or experienced a growth of 98.83% compared to the realization in 2021.</p> <p>g. Earnings After Tax for the Current Year amounted to IDR 4.27 billion or experienced a growth of 5.08% compared to the realization in 2021.</p> <p>h. SBI Total Assets in 2022 were valued at IDR 49.57 billion or experienced a growth of 12.83% compared to the realization in 2021 of IDR 43.93 billion.</p> |
|--|--|

TANTANGAN

Tantangan utama Perseroan sepanjang tahun 2022 adalah menjaga kinerja agar tetap tumbuh. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan menciptakan sebuah ketidakpastian yang berdampak besar terhadap stagnasi perekonomian secara keseluruhan. Meningkatnya kredit bermasalah atau NPL memberi dampak kenaikan beban klaim kepada Perseroan. Selain itu Perseroan juga

CHALLENGE

The Company's main challenge throughout 2022 is to maintain performance so that it continues to grow. The prolonged Covid-19 pandemic created uncertainty that had a major impact on the overall economic stagnation. The increase in non-performing loans or NPLs has an impact on increasing claim expenses to the Company. In addition, the Company also experienced difficulties in increasing

mengalami kesulitan untuk meningkatkan pendapatan subrogasi sebagai akibat mitra bank mengalami kendala dalam proses penagihan piutang subrogasi kepada debitur yang terdampak Covid-19.

subrogation income as a result of bank partners experiencing problems in the process of collecting subrogation receivables from debtors affected by Covid-19.

PELAKSANAAN STRATEGI PERSEROAN

Strategi Perseroan yang dijalankan di tahun 2022 dalam mengantisipasi tantangan di atas, antara lain:

1. Ekspansi bisnis berbasis risiko dan keuntungan;
2. Analisis dan akseptasi penjaminan sesuai SLA dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian;
3. Optimalisasi pengelolaan piutang subrogasi melalui mekanisme penagihan yang handal dan efektif;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
5. Pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.

COMPANY STRATEGY IMPLEMENTATION

The Company's strategies implemented in 2022 in anticipating the above challenges include:

1. Risk and profit-based business expansion;
2. Analysis and acceptance of guarantees by the SLA while still prioritizing the prudent principle;
3. Optimizing the management of subrogation receivables through a reliable and effective collection mechanism;
4. Improving the quality of human resources; and
5. Development of information technology-based services.

HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR EKSTERNAL

Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal dari KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) terhadap Laporan Keuangan PT Jamkrida Jabar untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022 memberikan memberikan Opini Audit Wajar, dalam Semua Hal yang Material sesuai Laporan Audit Independen Nomor: 00130/2.1000/AU.1/08/1290-3/1/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

RESULTS OF EXTERNAL AUDITOR EXAMINATION

The results of the External Auditor's Examination from KAP Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) on the Financial Statements of PT Jamkrida Jabar for the Year Ended December 31, 2022 provide a Fair Audit Opinion, in All Material Respects according to the Independent Audit Report Number: 00130/2.1000/AU.1/08/1290-3/1/VI/2023 date on June 16, 2023.

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

Berdasarkan SE-OJK No. 18/SEOJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin, tahun 2022 PT Jamkrida Jabar memperoleh nilai 1,0; berada pada rentang $1,8 < \text{TKK} < 2,6$ dengan menunjukkan kategori keuangan yang SANGAT SEHAT.

FINANCIAL SOUNDNESS LEVEL

Based on SE-OJK No. 18/SEOJK.05/2018 concerning Guarantee Agency's Soundness Level, in 2022 PT Jamkrida Jabar obtained a value of 1.0; is in the range of $1.8 < \text{TKK} < 2.6$ by indicating a VERY HEALTHY financial category.

RATING PEMERINGKATAN

PT Jamkrida Jabar memperoleh peringkat idBBB (Triple B; Stable Outlook) dari Lembaga Pemeringkat PT PEFINDO untuk periode 01 September 2022 sampai dengan 01 September 2023, artinya Perseroan sebagai Perusahaan Penjaminan dinilai memiliki karakteristik keamanan keuangan yang memadai dibandingkan Perusahaan lainnya di Indonesia untuk memenuhi komitmen keuangannya. Dengan hasil tersebut, Perseroan telah melampaui standar minimal untuk dapat bekerja sama dengan bank-bank umum.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sebagai Perusahaan Penjaminan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, Perseroan menyadari bahwa dalam mengelola dana masyarakat adalah penting untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Hal ini sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sekaligus juga menjadi bagian dari tuntutan kebutuhan di lingkungan industri keuangan Indonesia.

Perseroan telah menyusun berbagai pedoman pelaksanaan GCG, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
2. Board of Manual (Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi);
3. Code of Conduct (Etika Kerja dan Etika Usaha);
4. Piagam Internal Audit;
5. Piagam Komite Audit;
6. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran; dan
7. Pedoman Keterbukaan Informasi Publik.

Tahun 2022 adalah tahun keenam Perseroan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) berdasarkan pada format yang telah ditetapkan oleh OJK. Adapun skor *self assessment* tahun 2022 adalah 90,48 (sembilan puluh koma empat puluh delapan) dengan predikat "Sangat Baik". Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola yang baik.

RATING PEMERINGKATAN

PT Jamkrida Jabar obtained idBBB rating (Triple B; Stable Outlook) from PT PEFINDO Rating Agency for the period September 01, 2022, to September 01, 2023, meaning that the Company as a Guarantee Company is considered to have adequate financial security characteristics compared to other companies in Indonesia to meet its financial commitments. With these results, the Company has exceeded the minimum standards to be able to cooperate with commercial banks.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

As a Guarantee Company with the status of a Regional Owned Enterprise (BUMD) of West Java Province, the Company realizes that in managing public funds it is important to implement Good Corporate Governance (GCG). This is in accordance with the direction of the Financial Services Authority (OJK) which is also part of the demands of needs in the Indonesian financial industry.

The Company has prepared various GCG implementation guidelines, including the following:

1. Code of Corporate Governance;
2. Board of Manual (Board of Commissioners and Directors Guidelines);
3. Code of Conduct (Work Ethics and Business Ethics);
4. Internal Audit Charter;
5. Audit Committee Charter;
6. Code of Whistleblowing Systems; and
7. Public Information Disclosure Guidelines.

2022 is the sixth year that the Company has conducted a self-assessment based on the format set by OJK. The self-assessment score in 2022 is 90.48 (ninety point forty-eight) with the predicate "Very Good". The Company continues to be committed to making efforts to improve and improve good governance.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi.

APRESIASI

Direksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan PT Jamkrida Jabar atas dukungan dan kerja sama yang diberikan, khususnya kepada pemegang saham dan mitra kerja Perseroan.

Direksi juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang diberikan kepada Direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan Perseroan.

Apresiasi juga diberikan kepada seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya sehingga PT Jamkrida Jabar mampu menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2022.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mewujudkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Direksi memiliki optimisme bahwa PT Jamkrida Jabar akan terus tumbuh, adaptif, memiliki daya saing, dan berkesinambungan, serta memberikan keuntungan yang optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Demikian laporan Direksi atas kegiatan kepengurusan PT Jamkrida Jabar selama tahun 2022.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

During 2022, there has been no change in the composition of the Board of Directors.

APPRECIATION

The Board of Directors would like to thank all stakeholders of PT Jamkrida Jabar for the support and cooperation provided, especially to the shareholders and partners of the Company.

The Board of Directors also gives the highest appreciation to the Board of Commissioners for the supervision and advice given to the Board of Directors in order to carry out the management of the Company.

Appreciation is also given to all employees for their dedication and hard work so that PT Jamkrida Jabar is able to show good performance in 2022.

The Company is committed to consistently realizing GCG principles. The Board of Directors has optimism that PT Jamkrida Jabar will continue to grow, adaptive, competitive, and sustainable, as well as provide optimal benefits for shareholders and other stakeholders.

This is the report of the Board of Directors on the management activities of PT Jamkrida West Java during 2022.

Bandung, Juni 2023
Bandung, June 2023

Direksi
Board Of Directors
PT Jamkrida Jabar

Yanti Rachmawati
Direktur Utama
President Director

Agus Subrata
Direktur Operasional
Operational Director

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022

Responsibility For The 2022 Annual Report

Laporan Tahunan PT Jamkrida Jabar Tahun 2022 berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait dibuat dengan keadaan sebenarnya oleh Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

The 2022 Annual Report of PT Jamkrida Jabar along with the Financial Statements and other related information was prepared according to the actual situation by the Board of Directors which has been reviewed by the Board of Commissioners by affixing the signature below.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS
PT Jamkrida Jabar

M. Taufiq Budi Santoso
Komisaris Utama
President Commissioner

Dini Rosdini
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS
PT Jamkrida Jabar

Yanti Rachmawati
Direktur Utama
President Director

Agus Subrata
Direktur Operasional
Operational Director



PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

SEKILAS JAMKRIDA JABAR

PT Jamkrida Jabar merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (BUMD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.

Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian PT Jamkrida Jabar adalah:

- a. memberikan jasa penjaminan kredit kepada KUMKM;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

LEGALITAS USAHA

Perseroan telah memiliki izin dan legalitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti tercantum dibawah ini:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.

ABOUT JAMKRIDA JABAR

PT Jamkrida Jabar is a Business Entity Owned by the Regional Government of West Java Province (BUMD), established based on Regional Regulation of West Java Province Number 9 of 2011 concerning West Java Regional Credit Guarantee Companies.

The purpose of forming a company is to increase funding capacity and facilitate economic activities, especially Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises (CMSMEs) to increase economic growth and people's welfare.

The objectives of establishing PT Jamkrida Jabar are:

- a. provide credit guarantee services to CMSMEs;
- b. increasing regional economic activity; and
- c. contributing to Regional Original Revenue.

BUSINESS LEGALITY

The company already has permits and legality in carrying out its business activities, as listed below:

1. Regional Regulation of West Java Province Number: 9 of 2011 concerning West Java Regional Credit Guarantee Companies.
2. Regulation of the Governor of West Java Number: 19 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Regional Regulations of West Java Province Number: 9 of 2011 concerning West Java Regional Credit Guarantee Companies.

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 17 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jamkrida Jabar.
4. Akta Pendirian PT Jamkrida Jabar Nomor: 03 Tahun 2012, tanggal 03 Oktober 2012, beserta Akta perubahan-perubahannya.
5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-56159.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 01 November 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, beserta keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang perubahan-perubahannya.
6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
7. Izin Gangguan Nomor: 503/IG/DJ03/BPPT tanggal 20 April 2015.
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 101116418463 tanggal 12 September 2018.
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120304971535 tanggal 13 September 2019.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 31.625.184.2-422.000.
11. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.05/D.05/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 30 Januari 2013.
12. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-04/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Jabar tanggal 3 Februari 2015.
13. Surat Izin Operasi Tingkat Nasional dari Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-3912/NB.111/2015 tanggal 14 Juli 2015.
3. Regional Regulation of West Java Province Number: 17 of 2012 concerning Investment of the West Java Provincial Government in PT Jamkrida Jabar.
4. Deed of Establishment of PT Jamkrida Jabar Number: 03 of 2012, October 03, 2012, along with the Deed of its amendments.
5. Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-56159.AH.01.01 of 2012, dated November 1, 2012, concerning Ratification of Company Legal Entities, along with the decision of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding its amendments.
6. Company Domicile Certificate Number: 503/014/DP-SKJ/II/2015 dated February 17, 2015.
7. Nuisance Permit Number: 503/IG/DJ03/BPPT dated April 20, 2015.
8. Company Registration Certificate (TDP) Number: 101116418463 dated September 12, 2018.
9. Business Identification Number (NIB) Number: 9120304971535 dated September 13, 2019.
10. Taxpayer Identification Number (NPWP) Number: 31.625.184.2-422.000.
11. Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP.05/D.05/2013 concerning the Granting of a Credit Guarantee Company Business License to PT Jamkrida Jabar dated January 30, 2013.
12. Decision of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number: KEP-04/NB.223/2015 concerning the Granting of a Permit to Establish a Sharia Business Unit for a Credit Guarantee Company to PT Jamkrida Jabar dated February 03, 2015.
13. National Level Operating Permit from the Director of Institutional and Product Non-Bank Financial Industry (IKNB) Financial Services Authority Number: S-3912/NB.111/2015 dated July 14, 2015.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEMBAGA PENJAMIN**

1. UU Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. POJK Nomor: 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin.
3. POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.
4. POJK Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
5. POJK Nomor: 30/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

GUARANTEE INSTITUTION REGULATION

1. Law Number: 1 of 2016 concerning Guarantees.
2. OJK Regulation Number: 1/POJK.05/2017 concerning Business Licensing and Institutional Guarantee Institutions.
3. OJK Regulation Number: 2/POJK.05/2017 concerning Business Implementation of Guarantee Institutions.
4. OJK Regulation Number: 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
5. OJK Regulation Number: 30/POJK.05/2018 concerning Amendments to OJK Regulation Number: 2/POJK.05/2017 concerning Business Implementation of Guarantee Institutions.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA**

1. UU Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PP Nomor: 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
4. Pergub. Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola BUMD Provinsi Jawa Barat.

**GOVERNANCE IMPLEMENTATION
REGULATIONS**

1. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law Number: 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number: 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number: 23 of 2014 concerning Regional Government.
3. Government Regulation Number: 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises (BUMD).
4. Regulation of the Governor of West Java Number: 105 of 2020 concerning Regulations for the Regional Owned Enterprises Governance Implementation in West Java Province.

VISI DAN MISI

VISION AND MISSION



NILAI-NILAI PERUSAHAAN

CORPORATE VALUES

PT Jamkrida Jabar memiliki nilai-nilai BISA sebagai budaya kerja dalam Perusahaan yang mendorong peningkatan kinerja dan mempertegas okupasi pasar terhadap layanan atau produk perusahaan.

PT Jamkrida Jabar has the BISA values as a work culture within the company that encourages performance improvement and reinforces market occupation of the company's services or products.

Jamkrida Jabar BISA !

B

BUILD

Membangun dan mengembangkan masyarakat KUMKM di Jawa Barat.

Building and developing the Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises (CMSMEs) community in West Java.

I

INTEGRITY

Pengelolaan Perseroan dilakukan dengan semangat integritas dan profesionalisme yang tinggi.

The management of the Company is carried out with a high spirit of integrity and professionalism.

S

SPEED

Perseroan memberikan pelayanan kepada nasabah dan mitra dengan cepat dan terpercaya.

The company provides services to customers and partners quickly and reliably.

A

ACCOUNTABLE

Pengelolaan Perseroan dengan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Management of the Company with accountable policies.

PRODUK DAN LAYANAN

PRODUCTS AND SERVICES

PRODUK DAN LAYANAN PENJAMINAN*

1. Penjaminan Kredit, Pembiayaan, atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
2. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya.
3. Penjaminan Kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.
4. Penjaminan atas surat utang;
5. Penjaminan pembelian barang secara angsuran;
6. Penjaminan transaksi dagang;
7. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
8. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
9. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
10. Penjaminan *letter of credit*;
11. Penjaminan kepabeanan (customs bond);
12. Penjaminan cukai;
13. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan
14. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

*Berdasarkan POJK Nomor: 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

PRODUCTS AND SERVICES GUARANTEE*

1. Credit Guarantees, Financing, or Financing Based on Sharia Principles provided by Financial Institutions.
2. Loan guarantees distributed by savings and loan cooperatives or cooperatives that have savings and loan business units to their members.
3. Credit guarantees and or partnership program loans disbursed by state-owned enterprises within the framework of the partnership and community development program.
4. Guarantee for bonds;
5. Guarantee for the purchase of goods in installments;
6. Guarantee of trade transactions;
7. Guarantee for the procurement of goods and or services (the surety bond);
8. Contra bank guarantee;
9. Guarantee of domestic documents of credit;
10. Letter of credit guarantee;
11. Customs bond;
12. Excise guarantee;
13. Provision of management consulting services related to Guaranteeing business activities; and
14. Other business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority.

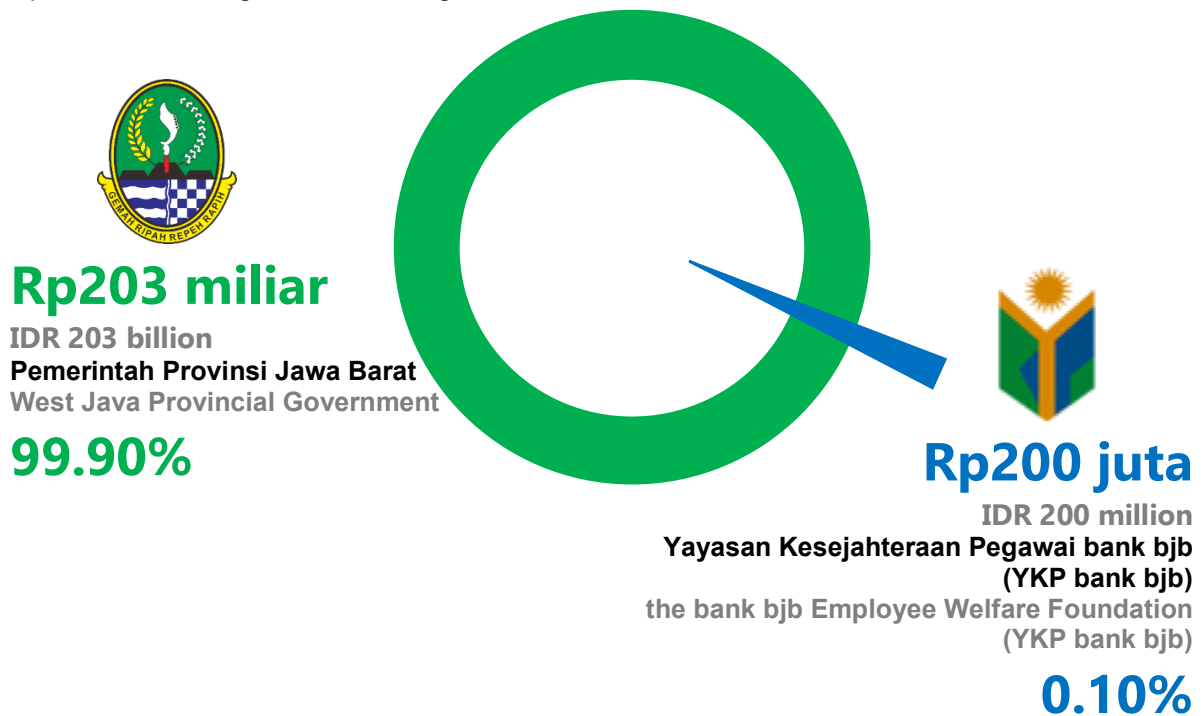
*Based on OJK Regulation Number: 2/POJK.05/2017 concerning the Implementation of Guarantee Institutions Business, Article 2 Paragraph (1) and (2).

INFORMASI MODAL DAN PEMEGANG SAHAM

INFORMATION ABOUT CAPITAL AND SHAREHOLDERS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat Bab V Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa "Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah)". Adapun modal yang telah disetor kepada PT Jamkrida Jabar sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp203,2 miliar dengan rincian sebagai berikut:

By West Java Province Regional Regulation Number: 9 of 2011 concerning West Java Regional Credit Guarantee Companies Chapter V Article 5 Paragraph (1) states that "The company's authorized capital is Rp. 300,000,000,000.- (three hundred billion rupiahs)". As of December 31, 2022, the capital that has been paid up to PT Jamkrida Jabar is IDR 203.2 billion with the following details:



Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyetorkan saham pada PT Jamkrida Jabar sebesar Rp203.000.000.000,- (dua ratus tiga miliar rupiah), sedangkan pemegang saham lain yaitu Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb (YKP bank bjb) telah menyetorkan saham senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Oleh karena itu, sisa saham PT Jamkrida Jabar yang masih dalam simpanan (portepel) adalah senilai Rp96.800.000.000,- (sembilan puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) atau 9.680 (sembilan ribu enam ratus delapan puluh) lembar saham.

The West Java Provincial Government has deposited shares in PT Jamkrida Jabar in the amount of IDR 203,000,000,000 (two hundred and three billion rupiahs), while other shareholders, namely the bank bjb Employee Welfare Foundation (YKP bank bjb) have deposited shares of IDR 200,000,000, - (two hundred million rupiah). Therefore, the remaining shares of PT Jamkrida Jabar which are still in the portfolio are worth IDR 96,800,000,000 (ninety-six billion eight hundred million rupiahs) or 9,680 (nine thousand six hundred and eighty) shares.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONER PROFILE



MUHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Komisaris Utama
President Commissioner

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Probolinggo, 21 April 1967.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Probolinggo, on April 21, 1967.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Kebijakan Publik di Universitas Padjadjaran tahun 2012.
- S2 Public Administration di University of Birmingham tahun 1995.
- S1 Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung tahun 1990.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 21 Desember 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPSLB PT Jamkrida Jabar Nomor: 07, tanggal 21 Desember 2021.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as President Commissioner of PT Jamkrida Jabar for the first time based on the GMS Decision on December 21, 2021, according to the Deed of Statement of Resolutions of Shareholders outside the EGMS of PT Jamkrida Jabar Number: 07, December 21, 2021.

PERIODE MENJABAT

21 Desember 2021 - 21 Desember 2025.

PERIOD OF SERVICE

December 21, 2021 - December 21, 2025.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat (2020-sekarang).
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (2019-2020).
- Penjabat Bupati Purwakarta (2018).
- Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (2018).
- Kepala Biro Pemerintahan Dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Barat (2016-2017).

EMPLOYMENT HISTORY

- Assistant for the Economy and Development of the Regional Secretariat of West Java Province (2020-present).

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctor of Public Policy at Padjadjaran University in 2012.
- Master of Public Administration at the University of Birmingham in 1995.
- Bachelor of Engineering Planology at the Bandung Institute of Technology in 1990.
- Head of the Regional Development Planning Agency of West Java Province (2019-2020).
- Acting Regent of Purwakarta (2018).
- Head of the Regional Library and Archives Service of West Java Province (2018).
- Head of Government and Cooperation Bureau of Regional Secretariat of West Java Province (2016-2017).

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Muhammad Taufiq Budi Santoso has no affiliation with either the other members of the Board of Commissioners, or the Board of Sharia Supervisory, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Muhammad Taufiq Budi Santoso tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Muhammad Taufiq Budi Santoso does not own the Company's shares.



DINI ROSDINI

Komisaris Independen
Independent Commissioner

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 13 April 1977.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on 13 April 1977.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Indonesia tahun 2015.
- S2 Magister Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2005.
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2000.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctor of Accounting Science at the University of Indonesia in 2015.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 26 November 2019 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar Nomor: 39, tanggal 26 November 2019.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Independent Commissioner of PT Jamkrida Jabar for the first time based on the Resolution of the EGMS on 26 November 2019 in accordance with the Deed of Minutes of the EGMS of PT Jamkrida Jabar Number: 39 dated 26 November 2019.

PERIODE MENJABAT

26 November 2019 - 26 November 2023.

PERIOD OF SERVICE

November 26, 2019 - November 26, 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (2001-sekarang).
- Anggota Komite Audit di PT Mitrabara Adiperdana, Tbk. (2018-sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2016-sekarang).
- Anggota Komite Audit di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2014-2016).
- Sekretaris Dewan Komisaris di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2013-2014).

EMPLOYMENT HISTORY

- Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (2001-present).
- Member of the Audit Committee at PT Mitrabara Adiperdana, Tbk. (2018-present).
- Member of the Risk Monitoring Committee at PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2016-present).

- Master of Accounting at Padjadjaran University in 2005.
- Bachelor of Accounting at Padjadjaran University in 2000.
- Member of the Audit Committee at PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2014-2016).
- Secretary to the Board of Commissioners at PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk. (2013-2014).

HUBUNGAN AFILIASI

Dini Rosdini tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Dini Rosdini has no affiliation with either the other members of the Board of Commissioners, or the Board of Sharia Supervisory, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Dini Rosdini tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Dini Rosdini does not own the Company's shares.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

BOARD OF SHARIA SUPERVISORY PROFILE



ZAINI ABDUL MALIK

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Board of Sharia Supervisory

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bandung, 31 Januari 1975.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Bandung, on January 31, 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2022.
- S2 Kajian Islam/Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar Nomor: 38, tanggal 28 November 2014.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Chairman of the Board of Sharia Supervisory of PT Jamkrida Jabar Sharia Business Unit for the first time based on the EGMS Decision on November 28, 2014, according to the Deed of PT Jamkrida Jabar EGMS Minutes Number: 38 dated November 28, 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

PERIOD OF SERVICE

Since November 28, 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sampai dengan sekarang.
- Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW. Muhammadiyah Jawa Barat (Periode 2010-2015)
- Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta (2002-2003).
- Penulis karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah.

EMPLOYMENT HISTORY

- Lecturer at the Faculty of Syari'ah at the Islamic University of Bandung (UNISBA) until now.

- S1 pada Fakultas Syariah/ Muamalah di Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctoral degree at Sunan Gunung Djati State Islamic University in 2022.
- Master of Islamic Studies/Islamic Economics at State Islamic University/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta in 2008.
- Bachelor of Sharia/Muamalah Faculty at the State Islamic Institute/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung in 1999.

- Member of the PW Tarjih and Tajdid Council. Muhammadiyah West Java (Period 2010-2015)
- Chairman of the Jakarta Syari'ah Economic Forum (2002-2003).
- Author of scientific works on Islamic Economics/Sharia Economics.

HUBUNGAN AFILIASI

Zaini Abdul Malik tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Zaini Abdul Malik has no affiliation with other members of the Board of Sharia Supervisory, nor the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik does not own the Company's shares.



KHOZIN ABU FAQIH

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of the Board of Sharia Supervisory

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Gresik, 08 September 1969.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Gresik, on September 08, 1969.

RIWAYAT PENDIDIKAN
Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA/Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh Cabang Jakarta) tahun 1996.

EDUCATIONAL BACKGROUND
Graduated from Sharia Faculty at the Institute of Islamic and Arabic Sciences (LIPIA/Imam Muhammad bin Saud Riyadh Islamic University Jakarta Branch) in 1996.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar No. 38 tanggal 28 November 2014.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Member of the Board of Sharia Supervisory of PT Jamkrida Jabar Sharia Business Unit for the first time based on the EGMS Decision on November 28, 2014, according to the Deed of PT Jamkrida Jabar EGMS Minutes Number: 38 dated November 28, 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014.

PERIOD OF SERVICE

Since November 28, 2014.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pimpinan Pesantren Qur'an Atarbiyah Pusat Layanan Pendidikan (PULPEN).
- Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah (2013-sekarang).
- Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM (2010-2012).
- Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung tahun (2000-2009).
- Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor (1994-1996).
- Penulis dan penerjemah buku-buku Islam

EMPLOYMENT HISTORY

- Leaders of the Pesantren Qur'an Atarbiyah Education Service Center (PULPEN).
- Caretaker of Al-Ibda' Innovative Islamic Boarding School and Al-Ilham Islamic Boarding School/Sharia Banking Vocational School (2013-present).

- MQFM Islamic Insights Study Filler (2010-2012).
- Lecturer at Ma'had Al-Imarat Bandung (2000-2009).
- Lecturer in Ma'had Salahuddin Bogor (1994-1996).
- Author and translator of Islamic books.

HUBUNGAN AFILIASI

Khozin Abu Faqih tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Khozin Abu Faqih has no affiliation with either the other Members of the Board of Sharia Supervisory or the Board of Commissioners, Directors, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih does not own the Company's shares.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTOR PROFILE



YANTI RACHMAWATI

Direktur Keuangan
President Director

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 05 November 1974.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on November 05, 1974.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Magister Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2012.
- S1 Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000.
- D3 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1995.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Pemegang Saham tanggal 05 April 2022 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrida Jabar Nomor: 11, tanggal 05 April 2022.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as President Director of PT Jamkrida Jabar for the first time based on Shareholders' Resolution dated April 05, 2022, by the Deed of Statement of Shareholders' Resolutions Outside the General Meeting of Shareholders of PT Jamkrida Jabar Number: 11, April 5, 2022.

PERIODE MENJABAT

22 Februari 2022 (lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan OJK) - 22 Februari 2027.

PERIOD OF SERVICE

February 22, 2022 (passed OJK fit and proper test) - February 22, 2027.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar (Sep 2021 – Feb 2022).
- Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah Perum Jamkrindo (2018-2021).
- Pemimpin Kantor Wilayah Bandung (Wilayah Kerja Jawa Barat) Perum Jamkrindo (2016-2018).
- Pemimpin Kantor Cabang Bandung Perum Jamkrindo (2013-2016).
- Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Kantor Cabang Bandung Perum Jamkrindo (2008-2013).

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Master of Management at Padjadjaran University in 2012.
- Bachelor of Management at the University of Indonesia in 2000.
- Associate Degree in Accounting from Padjadjaran University in 1995.

EMPLOYMENT HISTORY

- Finance Director of PT Jamkrida Jabar (Sep 2021 – Feb 2022).
- Head of Perum Jamkrindo Sharia Guarantee Business Desk (2018-2021).
- Head of Bandung Regional Office (West Java Working Area) Perum Jamkrindo (2016-2018).
- Head of Bandung Branch Office of Perum Jamkrindo (2013-2016).
- Head of Administration and Finance Section of the Bandung Branch Office of Perum Jamkrindo (2008-2013).

HUBUNGAN AFILIASI

Yanti Rachmawati tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Yanti Rachmawati has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Yanti Rachmawati tidak memiliki saham Perusahaan.

SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Yanti Rachmawati does not own the Company's shares.



AGUS SUBRATA

Direktur Operasional
Operational Director

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Bandung, 01 Juni 1968.

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Bandung, on June 1, 1968.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Magister Manajemen di Universitas Esa Unggul tahun 2014.
- S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran tahun 1993.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Master of Management at Esa Unggul University in 2014.
- Bachelor of Government Science from Padjadjaran University in 1993.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Jabar untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 13 September 2021 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) PT Jamkrida Jabar Nomor: 74 tanggal 13 September 2021.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as the Finance Director of PT Jamkrida Jabar for the first time based on the EGMS Decision on September 13, 2021, according to the PT Jamkrida Jabar Shareholders Decision Statement Deed (Sirkuler) Number: 74 of September 13, 2021.

PERIODE MENJABAT

13 September 2021 - 31 Agustus 2026.

PERIOD OF SERVICE

September 13, 2021 - August 31, 2026.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (2020-sekarang).
- Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti (2020-2021).
- Komisaris Independen PT Sahabat Insurance d/h PT Bess Central Insurance (2018-2021).
- Direktur Utama PT Berdikari Logistik Indonesia (2016-2017).
- Asisten Direktur Teknik dan R&D PT Berdikari Logistik Indonesia (2013-2015).
- Direktur PT Tala Re International Reinsurance Broker Direktur (2010-2013).

EMPLOYMENT HISTORY

- Lecturer at the Trisakti Insurance Management College (2020- present).
- Vice Chair II at the Trisakti Insurance Management College (2020-2021).
- Independent Commissioner of PT Sahabat Insurance formerly PT Bess Central Insurance (2018-2021).

- President Director of PT Berdikari Logistik Indonesia (2016-2017).
- Assistant to the Technical and R&D Director of PT Berdikari Logistik Indonesia (2013-2015).
- Director of PT Tala Re International Reinsurance Broker Director (2010-2013).

HUBUNGAN AFILIASI

Agus Subrata tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Agus Subrata has no affiliation with other members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, and Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Agus Subrata tidak memiliki saham Perusahaan.

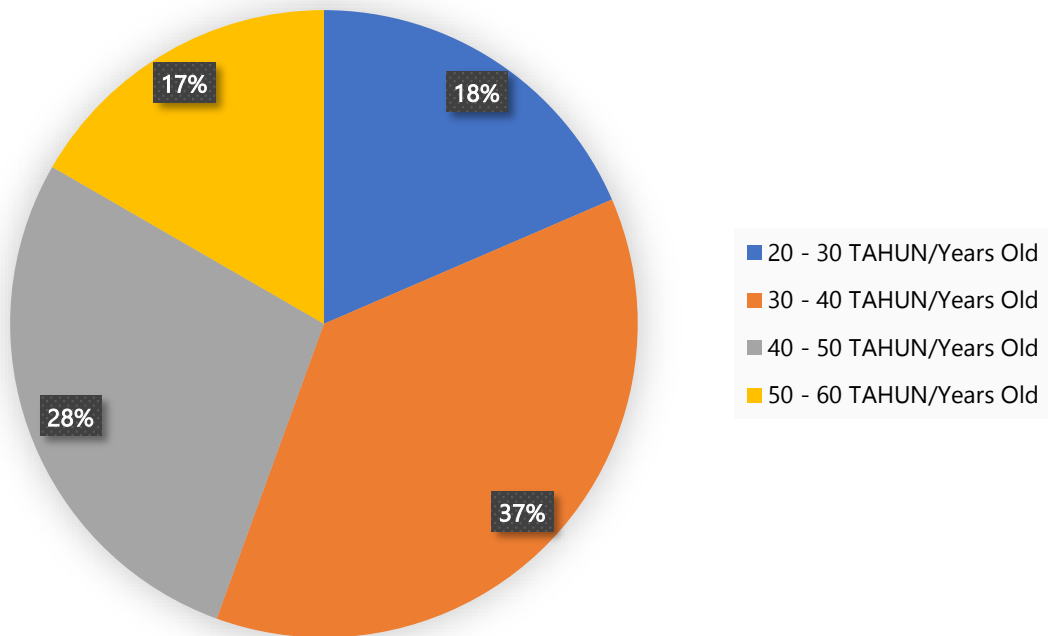
SHARE OWNERSHIP OF PT JAMKRIDA JABAR

Agus Subrata does not own the Company's shares.

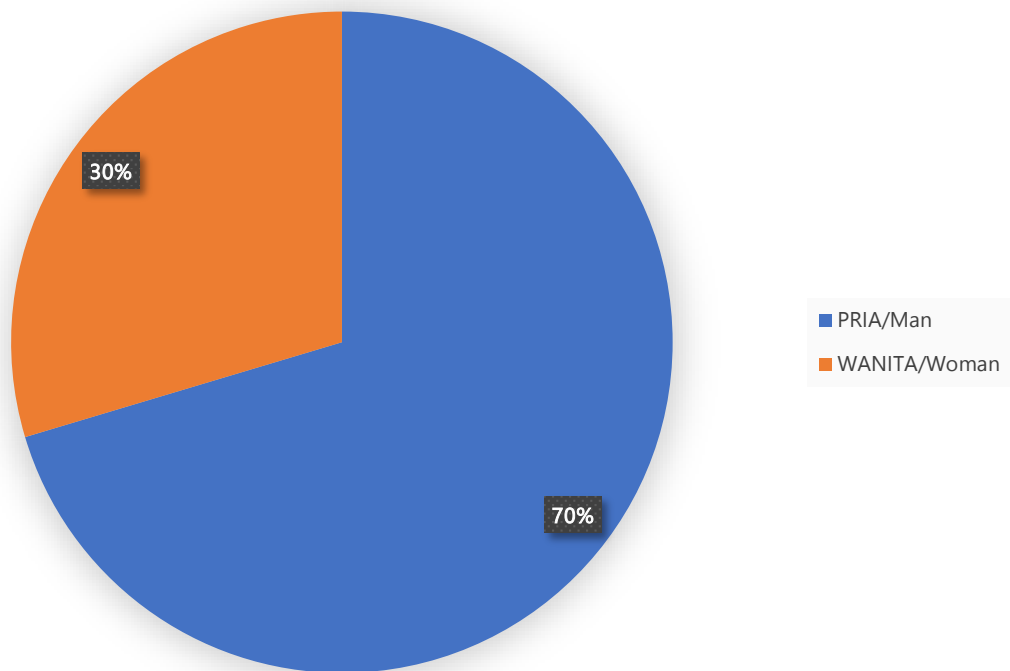
DATA DEMOGRAFI SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES DEMOGRAPHIC DATA

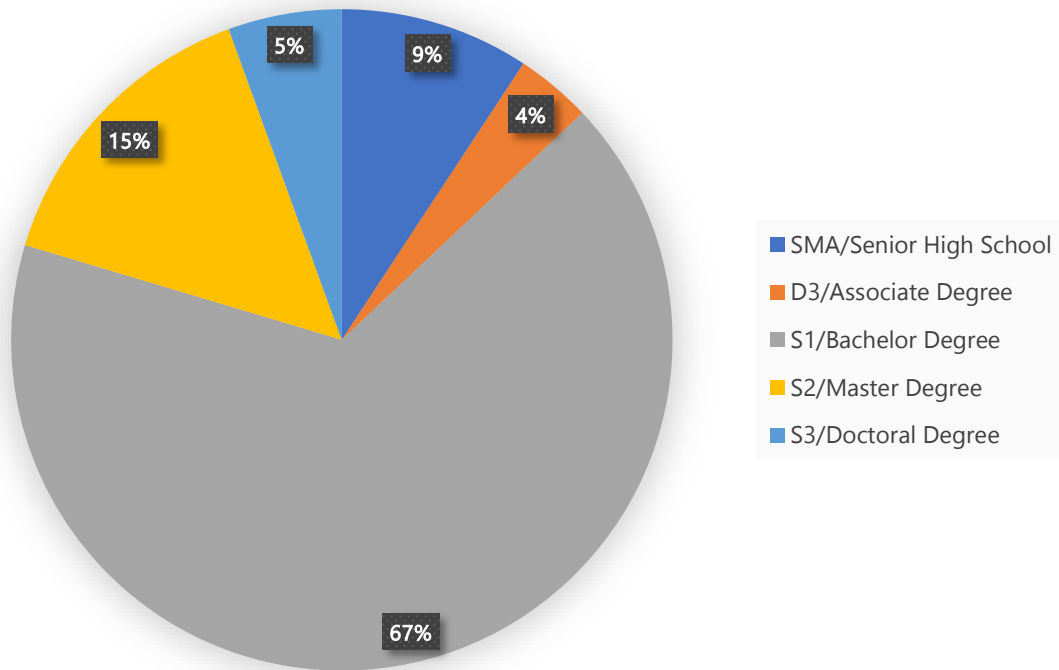
Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Composition of Employees Based on Age



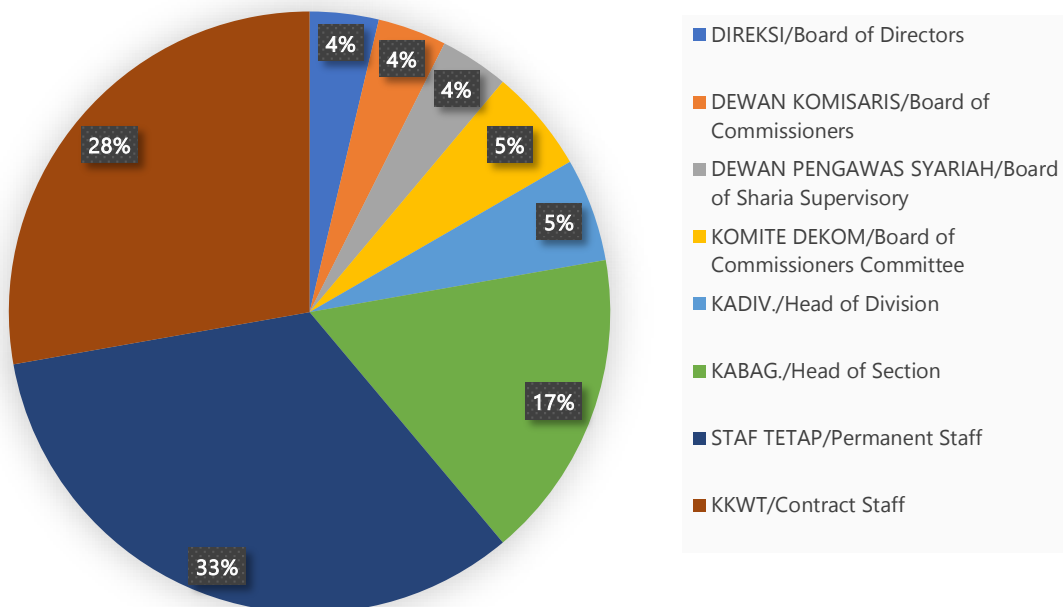
Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender
Composition of Employees Based on Gender



Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Employee Composition Based Level of education



Komposisi Karyawan & Pengurus Berdasarkan Posisi Manajemen/Jabatan
Composition of Employees & Management Based on Management Position/Title



STRUKTUR ORGANISASI

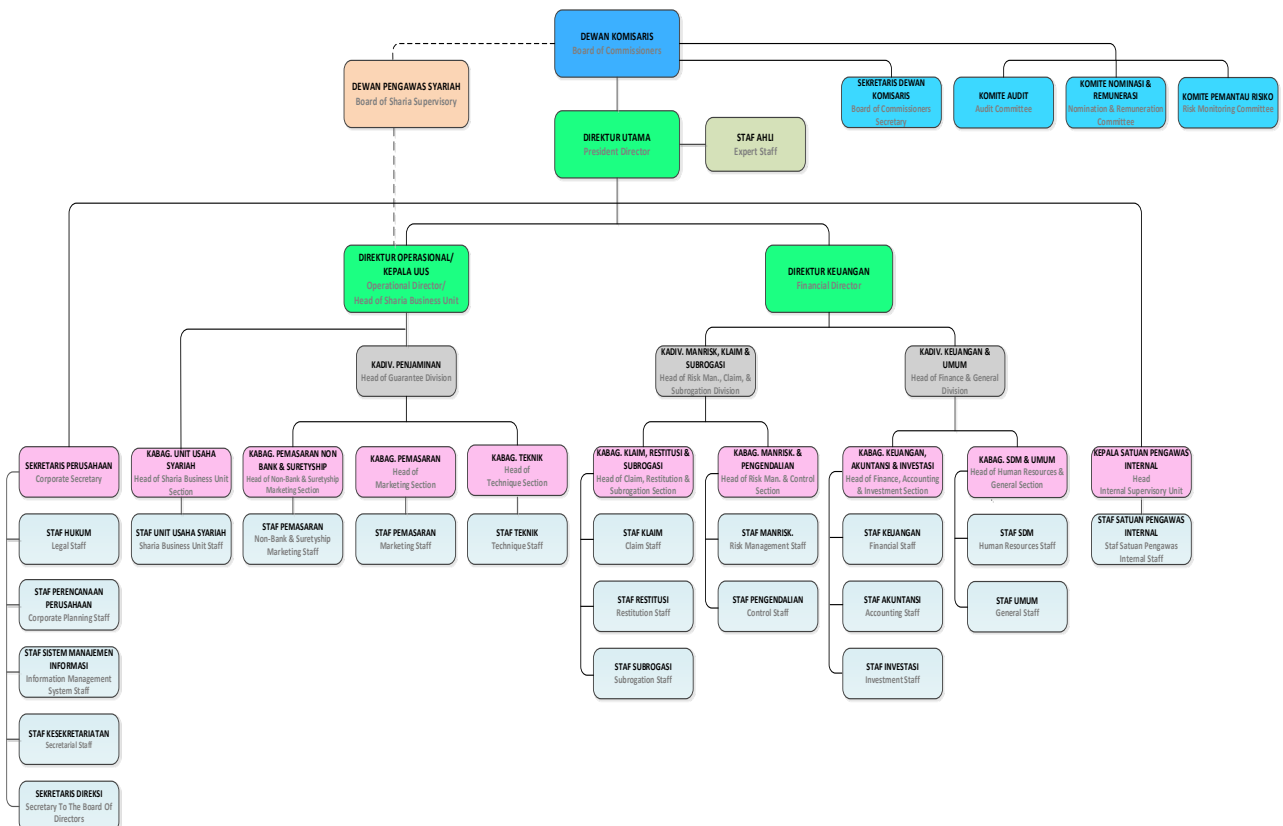
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Dalam menjalankan operasional usahanya, PT Jamkrida Jabar memiliki struktur organisasi yang memuat fungsi-fungsi antara lain dan tidak terbatas pada:

1. Fungsi Penjaminan Bank dan Non-Bank;
2. Fungsi Penjaminan Syariah;
3. Fungsi Manajemen Risiko, Klaim, dan Subrogasi;
4. Fungsi Keuangan, SDM, dan Umum;
5. Fungsi Sekretaris Perusahaan, Hukum, dan Teknologi Informasi.
6. Fungsi Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

In carrying out its business operations, PT Jamkrida Jabar has an organizational structure that includes functions including but not limited to:

1. Bank and Non-Bank Guarantee Functions;
2. Sharia Guarantee Function;
3. Risk Management, Claims, and Subrogation Functions;
4. Finance, Human Resources, and General Functions;
5. Functions of Corporate Secretary, Legal, and Information Technology;
6. Functions of the Internal Supervisory Unit and Obedience.



TIM KAMI

OUR TEAM

DIVISI PENJAMINAN

Guarantee Division



DIVISI MANAJEMEN RISIKO, KLAIM, DAN SUBROGASI

Risk Management, Claims, And Subrogation Division



DIVISI KEUANGAN DAN UMUM
Finance and General Division



SEKRETARIS PERUSAHAAN & SATUAN PENGAWAS INTERNAL
Corporate Secretary & Internal Supervisory Unit



BAGIAN SDM & UMUM
HR & General Affair



TIM JAMKRIDA JABAR
Jamkrida Jabar Squad





KINERJA PERSEROAN

COMPANY PERFORMANCE

TINJAUAN EKONOMI

Economic Review

Lembaga Penjamin atau Perusahaan Penjaminan merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

Keberadaan Lembaga Penjamin sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada KUMKM. Peran Lembaga Penjamin saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal pertumbuhan dan perkembangan KUMKM baik daerah maupun nasional.

Salah satu karakteristik yang melekat pada sebagian besar KUMKM dan sekaligus menjadi sumber permasalahannya adalah lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses kepada sumber pembiayaan (lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan) yang disebabkan oleh adanya keterbatasan agunan.

Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada KUMKM yang belum memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (*unbankable*) namun memiliki prospek bisnis yang baik (*eligible*) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta oleh pasar. Dengan penjaminan kredit, UMKM yang unbankable tetapi eligible akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari perbankan dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang tinggi serta dengan tingkat stabilitas makro ekonomi yang

Guarantee Institutions or Guarantee Companies are special financial institutions that play a role in encouraging business independence and empowering the business world as well as increasing access for the business world, especially Cooperatives, Micro, Small, and Medium Enterprises (CMSMEs), and other prospective businesses to sources of financing.

The existence of a Guarantee Institution is urgently needed to foster the confidence of the banking industry in extending credit to CMSMEs. The role of the Guarantee Institution is currently very important, to oversee the growth and development of CMSMEs both regionally and nationally.

One of the inherent characteristics of most CMSMEs and at the same time being the source of the problem is the weak capital structure and lack of access to sources of financing (both banking and non-banking financial institutions) caused by limited collateral.

Credit guarantees are usually given to CMSMEs that do not meet banking requirements in lending (*unbankable*) but have good business prospects (*eligible*), among others, because their products are ordered or demanded by the market. With credit guarantees, MSMEs that are unbankable but eligible will find it easier to get injections of funds from banks with guarantees provided by the Guarantee Agency.

West Java Province as one of the most advanced provinces in Indonesia with a high level of economic growth and with a maintained level of

tetap terjaga, akan mendorong pertumbuhan jumlah KUMKM.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah KUMKM di Jawa Barat, serta ketersediaan fasilitas penjaminan kredit, akan berdampak pada meningkatnya permintaan kredit, dan akan memberikan peluang bagi industri penjaminan kredit khususnya di Jawa Barat untuk tumbuh secara berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Dengan menjalankan "vision & mission statement" sesuai dengan niat awal pembentukan Perseroan sebagai Lembaga Penjaminan Kredit Daerah, dalam jangka panjang Perseroan akan menjadi "Perusahaan Penjaminan Kredit Pilihan Masyarakat Jawa Barat" tentunya, secara tidak langsung akan memberikan kontribusi pada perekonomian Jawa Barat. Maka Produk Penjaminan Kredit dan jasa konsultasi pengembangan UMKM dalam mengakses perbankan menjadi jasa utama perusahaan.

macroeconomic stability, will encourage growth in the number of CMSMEs.

Along with economic growth and the number of CMSMEs in West Java, as well as the availability of credit guarantee facilities, this will have an impact on increasing demand for credit and will provide opportunities for the credit guarantee industry, especially in West Java, to grow sustainably in the future.

By carrying out the "vision & mission statement" with the initial intention of establishing the Company as a Regional Credit Guarantee Institution, in the long term the Company will become the "Credit Guarantee Company of Choice for the West Java Community", of course, it will indirectly contribute to the economy of West Java. So Credit Guarantee Products and MSMEs development consulting services in accessing banking are the company's main services.

TINJAUAN PROSPEK MASA DEPAN

Future Business Prospect

Penyaluran kredit (baik *cash loan* maupun *non cash loan*) dari perbankan cenderung masih konservatif di era *new normal*, meskipun demikian industri penjaminan nyatanya tumbuh signifikan, terutama didorong amanat pemerintah agar pelaku industri penjaminan memperbesar penjaminan bagi para pelaku usaha (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Jumlah Perusahaan Penjaminan yang tercatat di OJK adalah sebanyak 22 Perusahaan, yaitu:

- 20 Perusahaan Penjaminan Konven (1 BUMN, 18 BUMD, 1 BUMS)
- 2 Perusahaan Penjaminan Syariah (2 Anak Usaha BUMN)

Berdasarkan Data OJK, menunjukkan bahwa Total Aset Perusahaan Penjaminan posisi Desember 2022 mencapai Rp39,12 triliun (Konven Rp34,03 triliun dan Syariah Rp5,09 triliun) atau tumbuh 6.02% (yoy) dibandingkan posisi Desember 2021 sebesar Rp36,9 triliun (Konven Rp32,45 triliun dan Syariah Rp4,45 triliun).

Perusahaan Penjaminan/Lembaga Penjamin merupakan lembaga keuangan khusus yang berperan mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha serta meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya UMKM dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan.

Keberadaan Lembaga Penjamin sangat dibutuhkan untuk memupuk kepercayaan industri perbankan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Peran Lembaga Penjamin saat ini terbilang sangat penting, guna mengawal pertumbuhan dan perkembangan UMKM baik daerah maupun nasional.

Credit disbursement (both cash loans and non-cash loans) from banks tends to remain conservative in the new normal era, however, the guarantee industry has actually grown significantly, mainly driven by the government's mandate for guarantee industry players to increase guarantees for business actors (MSMEs) in the context of national economic recovery.

The number of guarantee companies registered with OJK is 22 companies, namely:

- 20 Convention Guarantee Companies (1 State Owned Enterprise/SOE, 18 Regional Owned Enterprise/ROE, 1 Private Owned Enterprise/POE)
- 2 Sharia Guarantee Companies (2 SOE Subsidiaries)

Based on OJK data, it shows that the total assets of guarantee companies in December 2022 reached IDR 39.12 trillion (IDR 34.03 trillion convention and IDR 5.09 trillion sharia) or grew 6.02% (yoy) compared to the December 2021 position of IDR 36.9 trillion (IDR 32.45 trillion convention and Rp.4.45 trillion sharia).

Guarantee Companies / Guarantee Institutions are special financial institutions that play a role in encouraging business independence and empowering the business world and increasing access for the business world, especially MSMEs and other prospective businesses to sources of financing.

The existence of the Guarantee Institution is needed to foster the confidence of the banking industry in channeling credit to MSMEs. The role of the Insurance Agency is currently very important to oversee the growth and development of MSMEs both regionally and nationally.

Penjaminan kredit biasanya diberikan kepada UMKM yang belum memenuhi syarat perbankan dalam peminjaman kredit (unbankable) namun memiliki prospek bisnis yang baik (eligible) antara lain karena produknya banyak dipesan atau diminta oleh pasar. Dengan penjaminan kredit, UMKM yang unbankable tetapi eligible akan lebih mudah mendapatkan suntikan dana dari perbankan dengan jaminan yang diberikan oleh Lembaga Penjamin.

Dalam mendorong pengembangan usaha penjaminan kredit, Perseroan akan terus berupaya memperluas jaringan pemasaran dan kemitraan dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Perseroan menggunakan konsep market driven dalam memetakan pasar-pasar yang potensial (baik wilayah maupun mitra kerja), mengidentifikasi kebutuhan pasar (mitra kerja), mengumpulkan dan meng-update kondisi pasar termasuk pesaing. Hal-hal tersebut akan menunjang kelengkapan dan akurasi data yang diperlukan dalam membuat profil risiko dan kebijakan yang akan diambil.

Perseroan secara periodik akan melakukan review, memperbarui, dan melengkapi *Standard Operating Procedure* (SOP) di seluruh bagian (unit kerja) dan juga melakukan review atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan organisasi secara menyeluruh sekalipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Selain itu, Perseroan juga secara periodik akan melakukan *review* atas Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama disesuaikan dengan kondisi pasar, evaluasi kerja sama resiprokal, membuka peluang kerja sama penjaminan bersama (co-guarantee) dengan perusahaan penjaminan lain, membuka peluang kerja sama produk (co-branding) dengan perusahaan asuransi (jiwa dan umum), melakukan *gathering, sharing session*, dan sosialisasi bisnis penjaminan, dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.

Credit guarantees are usually given to MSMEs that have not met banking requirements in lending credit (unbankable) but have good business prospects (eligible), among others because their products are widely ordered or demanded by the market. With credit guarantees, unbankable but eligible MSMEs will more easily get an injection of funds from banks with guarantees provided by the Insurance Corporation.

In encouraging the development of the credit guarantee business, the Company will continue to strive to expand its marketing network and partnerships while still adhering to the principles of prudence and risk management. The Company uses the market driven concept in mapping potential markets (both regions and partners), identifying market needs (partners), collecting and updating market conditions including competitors. These things will support the completeness and accuracy of the data needed in making risk profiles and policies to be taken.

The Company will periodically review, update, and complete Standard Operating Procedures (SOP) in all sections (work units) and also review the Organizational Structure and Work Procedures (SOTK) so that it is expected to accommodate the needs of the organization as a whole even though the implementation is carried out gradually.

In addition, the Company will also periodically review Cooperation Agreements adjusted to market conditions, evaluate reciprocal cooperation, open opportunities for co-guarantee cooperation with other guarantee companies, open opportunities for product cooperation (co-branding) with insurance companies (life and general), conduct gatherings, sharing sessions, and socialization of guarantee business, and development of information technology-based services.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut berlaku efektif pada 31 Agustus 2021. Ketentuan ini mengatur rasio penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM yang semula paling sedikit 20% menjadi paling sedikit sebesar 30% pada tahun 2024.

Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembiayaan yang bersifat inklusif lainnya. Disisi lain hal tersebut merupakan peluang bagi Perseroan untuk terus meningkatkan peran serta dalam pengembangan sektor produktif sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

In line with the issuance of Bank Indonesia Regulation (PBI) Number: 23/13/PBI/2021 concerning the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM) for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units. The regulation became effective on August 31, 2021. This regulation regulates the ratio of bank lending to the MSME sector from at least 20% to at least 30% in 2024.

This policy provides broader options for banks to participate in financing MSMEs, low-income communities, and other inclusive financing. On the other hand, this is an opportunity for the Company to continue to increase its participation in the development of the productive sector in accordance with the mandate given by the West Java Provincial Government.

TINJAUAN BISNIS

Business Review

Kinerja bisnis penjaminan PT Jamkrida Jabar pada 2022 dinilai telah mengalami peningkatan, dan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Volume Kredit tahun 2022 adalah senilai Rp7,98 triliun atau terealisasi sebesar 76,05% dari RKAP 2022, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp3,50 triliun (terealisasi 97,37%) dan Non Produktif senilai Rp4,47 triliun (terealisasi 64,93%). Volume Kredit tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar -2,23% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

Adapun Volume Pembiayaan Unit Usaha Syariah tahun 2022 terealisasi senilai Rp1,36 triliun atau terealisasi sebesar 136,15% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 43,49% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

- b. Volume Penjaminan tahun 2022 adalah senilai Rp6,79 triliun atau terealisasi sebesar 75,78% dari RKAP 2022, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp2,39 triliun (terealisasi 95,64%) dan Non Produktif senilai Rp4,41 triliun (terealisasi 68,13%). Volume Penjaminan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar -5,52% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

Adapun Volume Kafalah Unit Usaha Syariah tahun 2022 terealisasi senilai Rp0,87 triliun atau terealisasi sebesar 126,64% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 38,26% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

- c. Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2022 adalah senilai Rp198,05 miliar atau terealisasi sebesar 82,93% dari RKAP

The performance of PT Jamkrida Jabar's guarantee business in 2022 is considered to have improved, and in general, it can be described as follows:

- a. Credit Volume in 2022 was IDR 7.98 trillion or realized 76.05% of the BP 2022, of which Productive Credit Volume was IDR 3.50 trillion (realized 97.37%) and Non-Productive was IDR 4.47 trillion (realized 64.93%). Credit Volume in 2022 grew by -2.23% compared to the realization in 2021.

The Sharia Business Unit Financing Volume in 2022 was realized at IDR 1.36 trillion or realized by 136.15% of the BP 2022 and grew by 43.49% compared to the realization in 2021.

- b. The Guarantee Volume in 2022 is IDR 6.79 trillion or realized by 75.78% of the BP 2022, where the Productive Guarantee Volume is IDR 2.39 trillion (realized 95.64%) and Non-Productive is IDR 4.41 trillion (realized 68.13%). Guarantee Volume in 2022 experienced a growth of -5.52% when compared to the realization in 2021.

The Kafalah Volume of Sharia Business Units in 2022 was realized at IDR 0.87 trillion or realized by 126.64% of the BP 2022 and experienced a growth of 38.26% when compared to the realization in 2021.

- c. Guarantee Fee on a Cash Base revenue in 2022 was IDR 198.05 billion or realized by 82.93% of the BP 2022, of which the

2022, dimana volume IJP Produktif senilai Rp49,98 miliar (teralisasi 99,47%) dan Non Produktif senilai Rp148,08 miliar (teralisasi 78,52%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,69% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

volume of Productive Guarantee Fee was IDR 49.98 billion (realized 99.47%) and Non-Productive was IDR 148.08 billion (realized 78.52%). Guarantee Fee on a Cash Base revenue in 2022 grew by 1.69% compared to the realization in 2021.

Adapun Pendapatan IJK Cash Basis Unit Usaha Syariah tahun 2022 terealisasi senilai Rp15,51 miliar atau terealisasi sebesar 124,42% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 52,69% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

The revenue of Kafalah Fee on a Cash Base Sharia Business Unit in 2022 was realized at IDR 15.51 billion or realized by 124.42% of the BP 2022 and grew by 52.69% compared to the realization in 2021.

- d. Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2022 adalah senilai Rp161,91 miliar atau terealisasi sebesar 77,73% dari RKAP 2022, dimana volume IJP Produktif senilai Rp42,22 miliar (teralisasi 87,43%) dan Non Produktif senilai Rp119,69 miliar (teralisasi 74,80%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 10,00% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

- d. Guarantee Fee on an Accrual Base revenue in 2022 is IDR 161.91 billion or realized by 77.73% of the BP 2022, where the volume of Productive Guarantee Fee is IDR 42.22 billion (realized 87.43%) and Non-Productive is IDR 119.69 billion (realized 74.80%). Guarantee Fee on an Accrual Base revenue in 2022 decreased by 10.00% when compared to the realization in 2021.

Adapun Pendapatan IJK Accrual Basis Unit Usaha Syariah tahun 2022 terealisasi senilai Rp13,42 miliar atau terealisasi sebesar 116,05% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,92% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

Meanwhile, the revenue of Kafalah Fee on an Accrual Base Sharia Business Unit in 2022 was realized at IDR 13.42 billion or realized by 116.05% of the BP 2022 and grew by 12.92% compared to the realization in 2021.

- e. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2022 adalah sebanyak 75.355 unit atau terealisasi sebesar 110,98% dari RKAP 2022. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 17,63% jika dibandingkan tahun 2021.

- e. The number of Guaranteed CMSMEs in 2022 is 75,355 units or realized by 110.98% of the BP 2022. The number of Guaranteed CMSMEs in 2022 grew by 17.63% compared to 2021.

Adapun Jumlah KUMKM Terjamin Unit Usaha Syariah tahun 2022 terealisasi sebanyak 56.016 unit atau terealisasi sebesar 114,75% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 14,20% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

The number of Guaranteed CMSMEs Sharia Business Units in 2022 was realized as many as 56,016 units or realized by 114.75% of the BP 2022 and experienced a growth of 14.20% when compared to the realization in 2021.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

A. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statement of Financial Position

LAPORAN POSISI KEUANGAN

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2022

AS OF DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
ASET					
ASSETS					
ASET LANCAR					
CURRENT ASSETS					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	156.208,33	178.269,08	191.272,94	107,29%	22,45%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	(4.405,11)	(12.515,94)	(878,88)	7,02%	-80,05%
Surat Berharga Marketable Securities	78.971,23	80.436,43	104.755,20	130,23%	32,65%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	(136,84)	-	(20,86)	0,00%	-84,76%
Piutang Re/Cogaransi Re/Co-Guarantee Receivables	63.283,02	30.371,47	83.488,98	274,89%	31,93%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	(4.560,60)	-	(5.226,12)	0,00%	14,59%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Income	12.815,54	3.201,05	10.024,53	313,16%	-21,78%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	(852,51)	-	(213,56)	0,00%	-74,95%

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2022
AS OF DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Advances and Prepaid Expenses	20.439,93	20.393,70	23.747,69	116,45%	16,18%
Piutang Lain-Lain Other Receivables	152,34	-	672,90	0,00%	341,72%
Properti Investasi Investment Property	2.495,10	2.495,10	2.495,10	100,00%	0,00%
JUMLAH ASET LANCAR TOTAL CURRENT ASSETS	324.410,43	302.650,89	410.117,93	135,51%	26,42%
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS					
Beban Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	65.501,96	82.417,25	75.907,55	92,10%	15,89%
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	13.246,95	13.956,41	13.361,22	95,74%	0,86%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	10.534,79	12.264,02	5.840,94	47,63%	-44,56%
Aset Lain-Lain Other Assets	229,61	327,26	272,28	83,20%	18,58%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR TOTAL NON-CURRENT ASSETS	89.513,31	108.964,94	95.381,98	87,53%	6,56%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	413.923,73	411.615,83	505.499,91	122,81%	22,12%
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS LIABILITIES					
LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT TERM LIABILITIES					
Utang Pajak Taxes Payable	502,23	380,48	1.251,73	328,99%	149,24%
Utang Re/Cogaransi Re/Co-Guarantee Payable	43.040,33	16.134,46	38.197,73	236,75%	-11,25%
Utang Klaim Claim Payable	-	-	-	0,00%	0,00%

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2022
AS OF DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
Beban yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	514,27	-	4.158,53	0,00%	708,62%
Penampungan Sementara Temporary Shelter	11.793,69	10.397,83	17.652,89	169,77%	49,68%
Utang Lancar Lainnya Other Current Payables	0,24	546,70	33,24	6,08%	13483,38%
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	35.709,29	45.352,45	37.521,72	82,73%	5,08%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK TOTAL SHORT TERM LIABILITIES	91.560,06	72.811,92	98.815,95	135,71%	7,92%
LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG TERM LIABILITIES					
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	98.071,34	123.805,60	128.048,37	103,43%	30,57%
Cadangan Klaim Claim Reserve	18.908,36	10.117,12	15.062,09	148,88%	-20,34%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Employee Benefits Liabilities	2.126,35	3.025,94	1.975,74	65,29%	-7,08%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LONG TERM LIABILITIES	119.106,06	136.948,66	145.086,20	105,94%	21,81%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	210.666,11	209.760,58	243.902,15	116,28%	15,78%
EKUITAS EQUITY					
Modal Capital Stock	153.200,00	153.200,00	203.200,00	132,64%	32,64%
Cadangan Umum General Reserve	40.139,07	41.699,76	44.817,71	107,48%	11,66%
Saldo Laba Retained Earnings	10.585,17	7.128,26	15.202,05	213,26%	43,62%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga The difference in The Fair Value of Securities	(569,21)	(188,96)	(1.340,13)	709,22%	135,43%

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2022
AS OF DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja The difference in Remeasurement of Post- Employee Benefits Liability	(97,40)	216,20	(281,87)	-130,38%	189,40%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	203.257,62	202.055,25	261.597,76	129,47%	28,70%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	413.923,73	411.815,83	505.499,91	122,75%	22,12%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

B. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
PENDAPATAN PENJAMINAN GUARANTEE INCOME					
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah Guarantee Fee	183.093,49	208.292,84	166.944,97	80,15%	-8,82%
Beban Akuisisi Acquisition Expenses	(30.728,20)	(33.331,84)	(24.228,09)	72,69%	-21,15%
Restitusi IJP Restitution of Guarantee Fee	(3.202,34)	-	(5.039,82)	0,00%	57,38%
Manajemen Fee Management Fee	17.534,90	16.545,30	19.458,76	117,61%	10,97%
Beban Regaransi Re-Guarantee Expenses	(90.364,19)	(102.241,62)	(73.770,80)	72,15%	-18,36%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN TOTAL GUARANTEE INCOME	76.333,65	89.264,70	83.365,03	93,39%	9,21%
KLAIM CLAIM					
Beban Klaim Claim Expenses	(63.389,13)	(66.374,88)	(50.775,51)	76,50%	-19,90%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim Recovery (Establishment) in Reserve Claim	(3.637,83)	(1.028,04)	625,62	-60,86%	-117,20%
JUMLAH KLAIM TOTAL CLAIM	(67.026,97)	(67.402,92)	(50.149,90)	74,40%	-25,18%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH GUARANTEE INCOME - NET	9.306,69	21.861,78	33.215,14	151,93%	256,90%
PENDAPATAN INVESTASI INVESTMENT INCOME	14.965,35	15.586,55	13.279,74	85,20%	-11,26%
PENDAPATAN SUBROGASI SUBROGATION INCOME	2.621,93	2.778,38	1.924,57	69,27%	-26,60%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)	3.522,75	(2.557,53)	1.543,40	-60,35%	-56,19%
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES					
Beban Operasional Operating Expenses	(2.872,88)	(3.687,14)	(3.936,84)	106,77%	37,03%
Beban Sumber Daya Manusia Human Resource Expenses	(10.514,47)	(19.680,25)	(18.966,64)	96,37%	80,39%
Beban Administrasi & Umum General and Administrative Expenses	(5.301,95)	(7.339,00)	(6.574,67)	89,59%	24,00%
JUMLAH BEBAN USAHA TOTAL OPERATING EXPENSES	(18.689,30)	(30.706,39)	(29.478,16)	96,00%	57,73%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK EARNINGS BEFORE TAX	11.727,41	6.962,78	20.484,68	294,20%	74,67%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX EXPENSES					
Beban Pajak Kini Current Income Tax Expenses	-	-	-	0,00%	0,00%
Manfaat Pajak Tangguhan Deferred Tax Benefits	(1.142,25)	165,48	(5.282,63)	-3192,37%	362,48%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN TOTAL INCOME TAX EXPENSES	(1.142,25)	165,48	(5.282,63)	-3192,37%	362,48%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN EARNINGS AFTER TAX	10.585,17	7.128,26	15.202,05	213,26%	43,62%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME	(3.315,90)	-	(955,39)	0,00%	-71,19%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)	7.269,27	7.128,26	14.246,66	199,86%	95,98%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Berdasarkan data pada tabel Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain di atas, secara umum dapat dijelaskan bahwa:

Based on the data in the table of Statement of Financial Position and Statement of Profit or Loss & Other Comprehensive Income above, it can generally be explained that:

1. Total Aset

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp505,50 miliar atau sebesar 122,75% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 22,12% jika dibandingkan tahun 2021.

1. Total Assets

The Company's Total Assets as of December 31, 2022 are valued at IDR 505.50 billion or as much as 122.75% of the BP 2022 and experienced a growth of 22.12% when compared to 2021.

2. Total Ekuitas

Total Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp261,60 miliar atau sebesar 129,47% dari RKAP 2022 yang ditargetkan senilai Rp202,06 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 28,70% jika dibandingkan tahun 2021.

2. Total Equity

The Company's Total Equity as of December 31, 2022, is IDR 261.60 billion or 129.47% of the BP 2022 which is targeted at IDR 202.06 billion and has grown by 28.70% compared to 2021.

3. Laba (Rugi)

Pada Tahun 2022 Perseroan mampu membukukan Laba Bersih senilai Rp15,20 miliar atau sebesar 213,26% dari RKAP 2022 yang ditargetkan senilai Rp7,13 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 43,62% jika dibandingkan perolehan tahun 2021.

3. Profit (Loss)

In 2022, the Company was able to record Earnings After Tax of IDR 15.20 billion or 213.26% of the BP 2022 which is targeted at IDR 7.13 billion and has grown by 43.62% when compared to 2021.

4. Pendapatan Penjaminan

Pada Tahun 2022 Perseroan membukukan Pendapatan Penjaminan senilai Rp83,37 miliar atau mencapai 93,39% dari RKAP 2022 dan tumbuh sebesar 9,21% jika dibandingkan perolehan tahun 2021.

5. Pendapatan Investasi

Pada Tahun 2022 Perseroan memperoleh Pendapatan Investasi senilai Rp13,28 miliar atau mencapai 85,20% dari RKAP 2022 dan turun sebesar 11,26% jika dibandingkan perolehan tahun 2021.

6. Pendapatan Subrogasi

Pada Tahun 2022 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp1,92 miliar atau mencapai 69,27% dari RKAP 2022 dan mengalami penurunan sebesar 26,60% jika dibandingkan perolehan tahun 2021.

7. Pendapatan Lain-Lain

Pada Tahun 2022 Perseroan memperoleh Pendapatan Lain-Lain senilai Rp1,54 miliar atau mengalami penurunan sebesar 56,19% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

8. Total Klaim

Total Klaim Neto yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2022 adalah senilai Rp50,78 miliar atau mencapai 76,50% dari RKAP 2022 dan mengalami penurunan sebesar 19,90% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

9. Beban Usaha

Beban Usaha Perseroan di Tahun 2022 adalah senilai Rp29,48 miliar atau mencapai 96,00% dari RKAP 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 57,73% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

4. Guarantee Income

In 2022, the Company posted a Guarantee Income of IDR 83.37 billion or reached 93.39% of the BP 2022 and grew by 9.21% when compared to the 2021 gains.

5. Investment Income

In 2022, the Company earned an Investment Income of IDR 13.28 billion, or reached 85.20% of the BP 2022 and decreased by 11.26% when compared to 2021 gains.

6. Subrogation Income

In 2022, the Company earned a Subrogation Income of IDR 1.92 billion, or reached 69.27% of the BP 2022 and decreased by 26.60% when compared to the 2021 gains.

7. Other Income

In 2022, the Company earned Other Income of IDR 1.54 billion or experienced a decrease of 56.19% when compared to the realization in 2021.

8. Total Claims

The Total Net Claim paid by the Company in 2022 is IDR 50.78 billion or reached 76.50% of the BP 2022 and decreased by 19.90% when compared to the realization in 2021.

9. Operating Expenses

The Company's Operating Expenses in 2022 are IDR 29.48 billion or reached 96.00% of the BP 2022 and increased by 57.73% when compared to the realization in 2021.

TINJAUAN OPERASIONAL

Operational Review

A. ASPEK PENJAMINAN

Guarantee Aspect

VOLUME KREDIT

CREDIT VOLUME

PERIODE 2022

PERIOD 2022

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE	2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI KREDIT CREDIT CATEGORY					
a. Produktif Productive	2.938.383,67	3.596.716,27	3.502.139,48	97,37%	19,19%
b. Non Produktif Non Productive	5.219.565,31	6.891.113,43	4.474.217,77	64,93%	-14,28%
JUMLAH TOTAL	8.157.948,99	10.487.829,71	7.976.357,24	76,05%	-2,23%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	905.925,53	1.377.644,79	1.313.930,83	95,38%	45,04%
b. Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	85.141,65	126.654,34	109.577,97	86,52%	28,70%
c. Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	478.217,40	489.173,78	655.533,65	134,01%	37,08%
d. Kredit Koperasi Cooperative Credit	127.390,67	222.299,30	236.521,34	106,40%	85,67%
e. Kredit Konstruksi Construction Credit	958.260,83	975.381,44	719.326,24	73,75%	-24,93%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	378.486,60	399.361,36	459.561,22	115,07%	21,42%
g. Surety Bond	4.961,00	6.201,25	7.688,24	123,98%	54,97%
h. Kredit Multiguna Multipurpose Credit	5.219.565,31	6.891.113,43	4.474.217,77	64,93%	-14,28%
JUMLAH TOTAL	8.157.948,99	10.487.829,71	7.976.357,24	76,05%	-2,23%

Volume Kredit tahun 2022 adalah senilai Rp7,98 triliun atau terealisasi sebesar 76,05% dari RKAP 2022, dimana Volume Kredit Produktif senilai Rp3,50 triliun (terealisasi 97,37%) dan Non Produktif senilai Rp4,47 triliun (terealisasi 64,93%). Volume Kredit tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,23% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

Credit Volume in 2022 was IDR 7.98 trillion or realized 76.05% of the BP 2022, of which Productive Credit Volume was IDR 3.50 trillion (realized 97.37%) and Non-Productive was IDR 4.47 trillion (realized 64.93%). Credit Volume in 2022 decreased by 2.23% compared to the realization in 2021.

VOLUME PENJAMINAN GUARANTEE VOLUME

PERIODE 2022 PERIOD 2022

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE	2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI KREDIT CREDIT CATEGORY					
a. Produktif Productive	2.030.100,42	2.494.901,72	2.386.079,16	95,64%	17,54%
b. Non Produktif Non Productive	5.160.148,15	6.469.416,99	4.407.408,14	68,13%	-14,59%
JUMLAH TOTAL	7.190.248,57	8.964.318,71	6.793.487,29	75,78%	-5,52%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	513.470,31	798.580,40	765.835,14	95,90%	49,15%
b. Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	59.599,16	88.658,04	76.704,58	86,52%	28,70%
c. Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	244.902,26	269.384,68	325.054,52	120,67%	32,73%
d. Kredit Koperasi Cooperative Credit	127.390,67	222.299,30	236.521,34	106,40%	85,67%
e. Kredit Konstruksi Construction Credit	701.290,42	710.416,62	514.714,13	72,45%	-26,60%
f. Bank Garansi Guarantee Bank	378.486,60	399.361,42	459.561,22	115,07%	21,42%
g. Surety Bond	4.961,00	6.201,25	7.688,24	123,98%	54,97%
h. Kredit Multiguna Multipurpose Credit	5.160.148,15	6.469.416,99	4.407.408,14	68,13%	-14,59%
JUMLAH TOTAL	7.190.248,57	8.964.318,71	6.793.487,29	75,78%	-5,52%

Volume Penjaminan tahun 2022 adalah senilai Rp6,79 triliun atau terealisasi sebesar 75,78% dari RKAP 2022, dimana Volume Penjaminan Produktif senilai Rp2,39 triliun (terealisasi 95,64%) dan Non Produktif senilai Rp4,41 triliun (terealisasi 68,13%). Volume Penjaminan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,52% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

The Guarantee Volume in 2022 is IDR 6.79 trillion or realized by 75.78% of the BP 2022, where the Productive Guarantee Volume is IDR 2.39 trillion (realized 95.64%) and Non-Productive is IDR 4.41 trillion (realized 68.13%). Guarantee Volume in 2022 experienced a decreased of 5.52% when compared to the realization in 2021.

PENJAMINAN KREDIT USAHA MENENGAH

MEDIUM BUSINESS CREDIT GUARANTEE

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Menengah tahun 2022 adalah senilai Rp765,84 miliar atau mencapai 95,90% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 49,15% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

The realization of the Medium Business Credit Guarantee Volume in 2022 was valued at IDR 765.84 billion or reached 95.90% of the BP 2022 and experienced a growth of 49.15% compared to the realization in 2021.

PENJAMINAN KREDIT USAHA KECIL

SMALL BUSINESS CREDIT GUARANTEE

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Kecil tahun 2022 adalah senilai Rp76,70 miliar atau mencapai 86,52% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 28,70% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

The realization of Small Business Credit Guarantee Volume in 2022 was valued at IDR 76.70 billion or reached 86.52% of the BP 2022 and experienced a growth of 28.70% compared to the realization in 2021.

PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO

MICRO BUSINESS CREDIT GUARANTEE

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Usaha Mikro tahun 2022 adalah senilai Rp325,05 miliar atau mencapai 120,67% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 32,73% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

The realization of Micro Business Credit Guarantee Volume in 2022 was worth IDR 325.05 billion or reached 120.67% of the RKAP 2022 and experienced a growth of 32.73% compared to the realization in 2021.

PENJAMINAN KREDIT KOPERASI

COOPERATIVE CREDIT GUARANTEE

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Koperasi tahun 2022 adalah senilai Rp236,52 miliar atau mencapai 106,40% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 85,67% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

The realization of the Cooperative Credit Guarantee Volume in 2022 was valued at IDR 236.52 billion or reached 106.40% of the BP 2022 and experienced a growth of 85.67% compared to the realization in 2021.

PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI

CONSTRUCTION CREDIT GUARANTEE

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Konstruksi tahun 2022 adalah senilai Rp514,71 miliar atau mencapai 72,45% dari RKAP 2022 dan

The realization of the Construction Credit Guarantee Volume in 2022 was valued at IDR 514.71 billion or reached 72.45% of the BP 2022

mengalami penurunan sebesar 26,60% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

and decreased by 26.60% compared to the realization in 2021.

BANK GARANSI

Realisasi Volume Penjaminan Bank Garansi (Kontra Bank Garansi) tahun 2022 adalah senilai Rp459,56 miliar atau mencapai 115,07% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 21,42% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

BANK GUARANTEE

The realization of Bank Guarantee Volume (Counter Bank Guarantee) in 2022 was worth IDR 459.56 billion or reached 115.07% of the BP 2022 and grew by 21.42% compared to the realization in 2021.

SURETY BOND

Realisasi Volume *Surety Bond* tahun 2022 adalah senilai Rp7,69 miliar atau mencapai 123,98% dari RKAP 2022 (memang masih ditargetkan kecil mengingat produk ini belum menjadi prioritas dan *head to head* dengan Kontra Bank Garansi) dan mengalami pertumbuhan sebesar 54,97% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

SURETY BOND

The realization of Surety Bond Volume in 2022 was worth IDR 7.69 billion or reached 123.98% of the BP 2022 (indeed still a small target considering that this product has not been a priority and head to head with Counter Bank Guarantee) and experienced a growth of 54.97% when compared to the realization in 2021.

PENJAMINAN KREDIT MULTIGUNA

Realisasi Volume Penjaminan Kredit Multiguna tahun 2022 adalah senilai Rp4,41 triliun atau mencapai 68,13% dari RKAP 2022 dan mengalami penurunan sebesar 14,59% jika dibandingkan realisasi tahun 2021. Perseroan pada tahun 2022 mengambil kebijakan untuk lebih selektif dan membatasi akseptasi Penjaminan Multiguna (Non Produktif) tidak terkecuali dari mitra utama sebagai bagian dari upaya pemenuhan rasio penjaminan usaha produktif yang masih di bawah ketentuan OJK paling sedikit 25%.

MULTIPURPOSE CREDIT GUARANTEE

The realization of the Multipurpose Credit Guarantee Volume in 2022 was worth IDR 4.41 trillion or reached 68.13% of the BP 2022 and decreased by 14.59% compared to the realization in 2021. The Company in 2022 took a policy to be more selective and limit acceptance of Multipurpose (Non-Productive) Guarantees, including from major partners as part of efforts to fulfill the productive business guarantee ratio which is still under OJK provisions of at least 25%.

IMBAL JASA PENJAMINAN CASH BASIS GUARANTEE FEE ON A CASH BASE

PERIODE 2022
PERIOD 2022

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE		2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI KREDIT CREDIT CATEGORY						
a.	Produktif Productive	37.724,85	50.240,00	49.975,16	99,47%	32,47%
b.	Non Produktif Non Productive	157.044,81	188.587,29	148.079,28	78,52%	-5,71%
JUMLAH TOTAL		194.769,66	238.827,29	198.054,44	82,93%	1,69%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY						
a.	Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	17.871,79	26.116,88	27.844,61	106,62%	55,80%
b.	Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	2.465,90	3.718,55	3.404,02	91,54%	38,04%
c.	Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	3.709,76	4.784,33	5.294,88	110,67%	42,73%
d.	Kredit Koperasi Cooperative Credit	1.645,69	2.903,91	3.173,14	109,27%	92,82%
e.	Kredit Konstruksi Construction Credit	8.778,85	9.081,79	6.564,65	72,28%	-25,22%
f.	Bank Garansi Bank Guarantee	3.156,83	3.514,49	3.620,28	103,01%	14,68%
g.	Surety Bond	96,04	120,05	73,59	61,29%	-23,38%
h.	Kredit Multiguna Multipurpose Credit	157.044,81	188.587,29	148.079,28	78,52%	-5,71%
JUMLAH TOTAL		194.769,66	238.827,29	198.054,44	82,93%	1,69%

Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2022 adalah senilai Rp198,05 miliar atau terealisasi sebesar 82,93% dari RKAP 2022, dimana volume IJP Produktif senilai Rp49,98 miliar (teralisasi 99,47%) dan Non Produktif senilai Rp148,08 miliar (teralisasi 78,52%). Pendapatan IJP Cash Basis tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,69% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

Guarantee Fee on a Cash Base revenue in 2022 was IDR 198.05 billion or realized by 82.93% of the BP 2022, of which the volume of Productive Guarantee Fee was IDR 49.98 billion (realized 99.47%) and Non-Productive was IDR 148.08 billion (realized 78.52%). Guarantee Fee on a Cash Base revenue in 2022 grew by 1.69% compared to the realization in 2021.

IMBAL JASA PENJAMINAN ACCRUAL BASIS (*) GUARANTEE FEE ON AN ACCRUAL BASE

PERIODE 2022
PERIOD 2022

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER PENJAMINAN SOURCE OF GUARANTEE	2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI KREDIT CREDIT CATEGORY					
a. Produktif Productive	23.700,17	48.289,74	42.219,93	87,43%	78,14%
b. Non Produktif Non Productive	156.190,97	160.003,10	119.685,22	74,80%	-23,37%
JUMLAH TOTAL	179.891,15	208.292,84	161.905,16	77,73%	-10,00%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	9.565,15	23.458,92	21.109,92	89,99%	120,70%
b. Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	1.798,72	3.377,86	2.707,28	80,15%	50,51%
c. Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	2.422,74	4.917,45	4.610,90	93,77%	90,32%
d. Kredit Koperasi Cooperative Credit	1.956,07	2.449,15	2.715,42	110,87%	38,82%
e. Kredit Konstruksi Construction Credit	5.588,04	9.801,60	7.424,01	75,74%	32,86%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	2.301,42	4.149,86	3.618,71	87,20%	57,24%
g. Surety Bond	68,03	134,90	33,71	24,99%	-50,45%
h. Kredit Multiguna Multipurpose Credit	156.190,97	160.003,10	119.685,22	74,80%	-23,37%
JUMLAH TOTAL	179.891,15	208.292,84	161.905,16	77,73%	-10,00%

(*) termasuk restitusi IJP/include Restitution of Guarantee Fee

Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2022 adalah senilai Rp161,91 miliar atau terealisasi sebesar 77,73% dari RKAP 2022, dimana volume IJP Produktif senilai Rp42,22 miliar (terealisasi 87,43%) dan Non Produktif senilai Rp119,69 miliar (terealisasi 74,80%). Pendapatan IJP Accrual Basis tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 10,00% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

Guarantee Fee on an Accrual Base revenue in 2022 is IDR 161.91 billion or realized by 77.73% of the BP 2022, where the volume of Productive Guarantee Fee is IDR 42.22 billion (realized 87.43%) and Non-Productive worth IDR 119.69 billion (realized 74.80%). Guarantee Fee on a Accrual Base revenue in 2022 experienced a decreased of 10.00% when compared to the realization in 2021.

JUMLAH KUMKM
NUMBER OF CMSMEs
PERIODE 2022
PERIOD 2022

dalam satuan unit/in units

JENIS TERJAMIN TYPES OF GUARANTEE		2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY						
a.	Kredit Usaha Menengah Medium Business Credit	352	535	2.298	429,30%	552,84%
b.	Kredit Usaha Kecil Small Business Credit	553	823	674	81,93%	21,88%
c.	Kredit Usaha Mikro Micro Business Credit	53.974	55.211	61.554	111,49%	14,04%
d.	Kredit Koperasi Cooperative Credit	2.524	4.404	3.962	89,95%	56,97%
e.	Kredit Konstruksi Construction Credit	2.579	2.625	1.186	45,18%	-54,01%
f.	Bank Garansi Bank Guarantee	4.073	4.298	5.114	119,00%	25,56%
g.	Surety Bond	4	5	567	11340,00%	14075,00%
JUMLAH TOTAL		64.059	67.901	75.355	110,98%	17,63%

Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2022 adalah sebanyak 75.355 unit atau terealisasi sebesar 110,98% dari RKAP 2022. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 17,63% jika dibandingkan tahun 2021.

The number of Guaranteed CMSMEs in 2022 is 75,355 units or realized by 110,98% of the BP 2022. The number of Guaranteed CMSMEs in 2022 grew by 17.63% compared to 2021.

B. ASPEK MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Aspect

Proses Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar adalah proses yang dilakukan untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap proses bisnis disetiap bagian dan level dalam perusahaan sehingga mampu memberikan keyakinan tercapainya tujuan dan mengurangi ketidakpastian yang melekat pada suatu proses bisnis yang ada akhirnya akan menciptakan kesempatan atau *opportunity* secara lebih sistematis.

The Risk Management Process of PT Jamkrida Jabar is a process carried out to manage the risks inherent in each business process in every part and level in the company so as to provide confidence in achieving goals and reduce the uncertainty inherent in an existing business process that will eventually create opportunities or opportunities more systematically.

Secara umum, proses manajemen risiko yang dilaksanakan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi risiko
2. Penilaian risiko (*risk assessment*)
3. Penanganan risiko (*risk response*)
4. Monitoring dan evaluasi

Dalam melaksanakan penjaminan kredit, perusahaan harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko penjaminan, risiko klaim, risiko keuangan, risiko hukum, dan risiko lainnya yang berpotensi merugikan perusahaan.

Perusahaan penjaminan sangat rentan terhadap risiko. Pada umumnya karakteristik risiko penjaminan bersifat *speculative* (risiko *moral hazard*). Beberapa strategi yang dilakukan Perseroan dalam melakukan mitigasi risiko penjaminan adalah dengan cara mempersyaratkan agunan, pembentukan cadangan klaim, penjaminan ulang dan penjaminan bersama dengan Perusahaan Penjaminan sejenis ataupun Perusahaan Asuransi (*re-guarantee* dan *co-guarantee*).

Kegiatan Manajemen Risiko PT Jamkrida Jabar masih bersifat periodik dan insidental. Dimana secara periodik khususnya dalam laporan bulanan maupun triwulan ditampilkan profil risiko setiap penjaminan per skim kredit per mitra bisnis sehingga dapat dijadikan tolak ukur serta pengambilan keputusan manakala profil risikonya menunjukkan indikasi kerugian bagi Perusahaan kedepannya. Untuk penerapan manajemen risiko secara insidental dalam bentuk kajian-kajian manajemen risiko terkait penilaian kegiatan yang akan ditempuh oleh Perusahaan (kajian mitra usaha dalam rangka kerja sama baru, penempatan deposito, pembelian obligasi dan instrumen investasi lain, dan lain sebagainya). Hasil dari analisa dan penilaian risiko tersebut akan dibahas dalam Rapat Manajemen PT Jamkrida Jabar untuk menentukan mitigasi risiko yang akan dilakukan.

Perseroan pun memiliki beberapa komite dibawah Direksi, yaitu Komite Penjaminan,

In general, the risk management process implemented consists of 4 main stages, namely:

1. Risk identification
2. Risk assessment
3. Risk response
4. Monitoring and evaluation

In carrying out credit guarantees, companies must stick to prudential principles so that they are expected to reduce guarantee risks, claim risks, financial risks, legal risks, and other risks that have the potential to harm the company.

Guarantee companies are particularly vulnerable to risk. In general, the characteristics of assurance risk are speculative (moral hazard risk). Some of the strategies carried out by the Company in mitigating guarantee risk are by requiring collateral, forming claim reserves, re-guaranteeing and joint guarantees with similar guarantee companies or insurance companies (re-guarantee and co-guarantee).

Risk Management activities of PT Jamkrida Jabar are still periodic and incidental. Where periodically, especially in monthly and quarterly reports, the risk profile of each guarantee per credit scheme per business partner is displayed so that it can be used as a benchmark and decision making when the risk profile shows indications of losses for the Company in the future. For the implementation of incidental risk management in the form of risk management studies related to the assessment of activities to be taken by the Company (business partner studies in the framework of new cooperation, deposit placement, purchase of bonds and other investment instruments, and so on). The results of the risk analysis and assessment will be discussed in the Management Meeting of PT Jamkrida Jabar to determine the risk mitigation to be carried out.

The Company also has several committees under the Board of Directors, namely the

Komite Investasi, dan Komite Klaim yang rutin mengadakan pertemuan bersama untuk membahas, membuat analisa, merumuskan, mengawasi, serta melaksanakan kebijakan yang telah atau akan diambil oleh manajemen.

Komite Penjaminan memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan, serta melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan.

Komite Investasi memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

Komite Klaim memiliki tugas utama membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan, melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim, serta memberikan keputusan klaim.

Dengan adanya beberapa komite dibawah Direksi tersebut, maka Perseroan dapat meminimalisir kemungkinan kerugian pada Perseroan di masa yang akan datang.

Beberapa mitigasi risiko yang dilakukan Perseroan pada tahun 2021, diantaranya:

1. Melakukan *review* dan perubahan perjanjian kerja sama (PKS) mitra penjaminan dengan prinsip *profitable* dan berbasis risiko.
2. Melakukan penyebaran risiko dengan menempatkan sebagian risiko dengan skema reasuransi kepada NasionalRe dan IndonesiaRe (konvensional dan syariah) dan beberapa perusahaan penjaminan dengan skema kogaransi.

Guarantee Committee, Investment Committee, and Claims Committee which regularly hold joint meetings to discuss, analyze, formulate, supervise, and implement policies that have been or will be taken by management.

The Guarantee Committee has the main task of assisting the Board of Directors in formulating guarantee operational policies, supervising and implementing established guarantee operational policies, as well as conducting feasibility analysis and risk management of each guarantee application.

The Investment Committee has the main task of assisting the Board of Directors in formulating investment policies and supervising the implementation of established investment policies.

The Claims Committee has the main task of assisting the Board of Directors in formulating claim policies and supervising the implementation of established claim policies, conducting feasibility analysis and risk management of each claim application, and providing claim decisions.

With the existence of several committees under the Board of Directors, the Company can minimize the possibility of losses to the Company in the future.

Some of the risk mitigations carried out by the Company in 2021 include:

1. Review and change the cooperation agreement (PKS) of guarantee partners with profitable and risk-based principles.
2. Disseminate risks by placing part of the risk with a reinsurance scheme to NasionalRe and IndonesiaRe (conventional and sharia) and several guarantee companies with a guarantee scheme.

3. Melakukan optimalisasi pendapatan investasi berbasis resiprokal dan *profitable* dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

3. Optimizing reciprocal and profitable based investment income while still paying attention to the principle of prudence (*prudent*).

C. ASPEK KLAIM DAN SUBROGASI

Claim and Subrogation Aspect

KLAIM DAN SUBROGASI CLAIM AND SUBROGATION PERIODE 2022 PERIOD 2022

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

URAIAN DESCRIPTION	2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
BEBAN KLAIM CLAIM EXPENSES					
a. Konvensional Conventional	59.713,53	61.796,76	53.654,76	86,82%	-10,15%
b. Syariah Sharia	3.675,60	4.578,12	2.879,25	62,89%	-21,67%
JUMLAH TOTAL	63.389,13	66.374,88	56.534,01	85,17%	-10,81%
PENDAPATAN SUBROGASI SUBROGATION INCOME					
a. Konvensional Conventional	2.407,99	2.602,15	1.702,67	65,43%	-29,29%
b. Syariah Sharia	213,94	176,23	221,89	125,91%	3,72%
JUMLAH TOTAL	2.621,93	2.778,38	1.924,57	69,27%	-26,60%

C.1. KLAIM

Claim

Total Klaim yang dibayarkan oleh Perseroan di Tahun 2022 adalah senilai Rp56,53 miliar atau mencapai 85,17% dari RKAP 2022 dan mengalami penurunan sebesar 10,81% jika dibandingkan realisasi tahun 2021. Mayoritas klaim yang dibayarkan bersumber dari pengajuan klaim atas Penjaminan Kredit Multiguna dan masih didominasi akibat terjamin

The Total Claims paid by the Company in 2022 are IDR 56.63 billion or reached 85.17 % of the BP 2022 and decreased by 10,81% when compared to the realization in 2021. The majority of claims paid were sourced from submitting claims for Multipurpose Credit Guarantee and were still dominated by guaranteed death

meninggal dunia $\pm 77,90\%$, sedangkan klaim lainnya disebabkan oleh debitur/terjamin melakukan wanprestasi (macet).

Keberadaan dari perusahaan regaransi turut andil dalam mengurangi kerugian/biaya yang disebabkan oleh beban klaim. Sebagai contohnya adalah Penjaminan Kredit Multiguna yang diregaransikan dengan *share* sebanyak 65%, berarti bahwa Perseroan hanya memiliki kewajiban pembayaran sebesar 35% dari total biaya klaim sebenarnya. Langkah tersebut terbukti sangat signifikan dalam menekan angka pembayaran klaim yang dilakukan oleh Perseroan, meskipun dikhawatirkan terjadi risiko piutang reasuransi dari perusahaan reasuransi apabila beban klaim yang menjadi tanggung jawab perusahaan reasuransi lebih besar dibanding hak IJP reasuransinya.

Strategi regaransi untuk membagi potensi risiko klaim akan dijalankan oleh Perseroan untuk tahun-tahun selanjutnya, terutama untuk kredit-kredit yang memiliki potensi klaim cukup tinggi seperti Kredit Multiguna, Kredit Konstruksi dan Kredit Usaha Menengah.

Adapun strategi lainnya pada bidang klaim adalah melakukan sosialisasi, menerapkan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan penyelesaian pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan regulasi dan/atau SLA (*Service Level Agreement*) yang disepakati serta merekomendasikan penerapan metode *Stop Loss* Perjanjian Kerja Sama baru maupun Perpanjangan khususnya untuk skim kredit yang memiliki klaim rasio tinggi.

$\pm 77.90\%$, while other claims were caused by debtors/guaranteed defaults (struggling).

The existence of a re-guarantee company contributes to reducing losses/costs caused by claim expenses. For example, the Multipurpose Credit Guarantee which is re-guaranteed with a share of 65%, means that the Company only has a payment obligation of 35% of the total actual claim cost. This step has proven to be very significant in reducing the number of claim payments made by the Company, although it is feared that there is a risk of reinsurance receivables from reinsurance companies if the burden of claims that are borne by the reinsurance company is greater than the rights of the reinsurance Guarantee Fee.

The re-guarantee strategy to share the potential claim risk will be implemented by the Company for the following years, especially for loans that have a high potential for claims such as Multipurpose Loans, Construction Loans, and Medium Business Loans.

Other strategies in the field of claims are conducting socialization, applying the precautionary principle and carrying out claim payment settlements in accordance with the agreed regulatory provisions and/or SLA (*Service Level Agreement*), and recommending the application of the Stop Loss method of new and Extended Cooperation Agreements, especially for credit schemes that have high claim ratios.

C.2. SUBROGASI

Subrogation

Subrogasi adalah peralihan hak tagih dan penerima jaminan kepada penjamin setelah penerima jaminan menerima pembayaran klaim dari penjamin. Perseroan sebagai pihak penjamin membukukan hasil dari penagihan subrogasi sebagai pendapatan Perseroan.

Subrogation is the transfer of billing rights and the collateral recipient to the guarantor after the collateral recipient receives payment of claims from the guarantor. The Company as the guarantor records the proceeds from subrogation collection as the Company's income.

Pada Tahun 2022 Perseroan memperoleh Pendapatan Subrogasi senilai Rp1,92 miliar atau mencapai 69,27% dari RKAP 2022 dan mengalami penurunan sebesar 26,60% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

Adapun pendapatan subrogasi tahun 2022 berasal dari subrogasi atas klaim penjaminan kredit usaha menengah, kredit usaha kecil, kredit usaha mikro, kredit konstruksi, bank garansi dan kredit multiguna.

Untuk lebih meningkatkan pendapatan subrogasi, Perseroan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan *update* data subrogasi setiap bulan secara rutin.
2. Melakukan rekonsiliasi data subrogasi secara periodik dengan kantor cabang Penerima Jaminan (bank dan non bank) terkait minimal setiap 3 bulan, baik melalui surat maupun *on the spot* ke lapangan.
3. Melakukan penagihan kepada Terjamin (debitur) secara bersama-sama dengan Penerima Jaminan (bank dan non bank) secara optimal.
4. Menginventarisasi data agunan Terjamin (debitur) khususnya untuk kasus tertentu dimana proses pembayaran dirasa cukup sulit atau nasabah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran, dan bekerja sama dengan Penerima Jaminan (bank dan non bank) untuk melakukan penjualan agunan baik melalui proses lelang maupun melalui Lembaga yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan (bank dan non bank).
5. Melakukan kerja sama penagihan piutang subrogasi dengan pihak ketiga.

Strategi subrogasi kedepan adalah meningkatkan kegiatan monitoring dan penagihan piutang subrogasi serta menerapkan pola insentif (*collecting fee*) kepada mitra yang melakukan penagihan subrogasi kepada terjamin sesuai anggaran yang telah disediakan, serta bekerja sama dengan pihak ke 3 (perusahaan profesional yang bergerak dalam usaha penagihan subrogasi) sehingga pendapatan subrogasi dapat ditingkatkan.

In 2022, the Company obtained Subrogation Revenue of IDR 1.92 billion, or reached 69.27% of the BP 2022 and increased by 26.60% compared to the realization in 2021.

The subrogation income in 2022 comes from subrogation of claims for underwriting medium business credit, small business credit, micro business credit, construction credit, bank guarantees, and multipurpose credit.

To further increase subrogation revenue, the Company has taken the following steps:

1. Update subrogation data every month regularly.
2. Reconcile subrogation data periodically with related Guarantee Recipient branch offices (bank and non-bank) at least every 3 months, either by mail or on the spot to the field.
3. Collect the Guaranteed (debtor) together with the Guarantee Recipient (bank and non-bank) optimally.
4. Inventory the data of Guaranteed collateral (the debtor), especially for certain cases where the payment process is considered quite difficult or the customer is no longer able to make payments, and cooperate with the Guarantee Recipient (bank and non-bank) to sell collateral either through the auction process or through institutions appointed by the Guarantee Recipient (bank and non-bank).
5. Cooperate in collecting subrogation receivables with third parties.

The future subrogation strategy is to increase monitoring and collection activities for subrogation receivables and apply incentive patterns (collecting fees) to partners who collect subrogation to guaranteed according to the budget provided, and cooperate with 3rd parties (professional companies engaged in subrogation collection business) so that subrogation income can be increased.

D. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources Aspect

Sumber Daya Manusia (SDM) dipandang oleh Perseroan sebagai salah satu unsur Perseroan yang sangat berharga dan sangat penting dalam proses kegiatan usaha. Memahami pentingnya peran SDM bagi Perseroan, maka *Competency Based Human Resources Management* (CBHRM) diterapkan manajemen dalam proses perekrutan, penempatan, dan pembinaan.

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, sampai dengan 31 Desember 2022 Perseroan didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 54 (lima puluh empat) orang termasuk Pengurus Perseroan dengan komposisi sebagai berikut:

Human Resources (HR) is seen by the Company as one of the Company's elements that is very valuable and very important in the process of business activities. Understanding the importance of the role of HR for the Company, *Competency-Based Human Resources Management* (CBHRM) is implemented by management in the process of recruitment, placement, and coaching.

In carrying out its operational activities, until December 31, 2022, the Company is supported by Human Resources of 54 (fifty-four) people including the Company's Management with the following composition:

No. No.	Posisi Manajemen/Jabatan <i>Management Position/Title</i>	Jumlah <i>Amount</i>
1	Direksi Board of Directors	2
2	Dewan Komisaris Board of Commissioners	2
3	Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory	2
4	Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee	3
5	Kepala Divisi Head of Division	3
6	Kepala Bagian Head of Section	9
7	Staf Staff	18
8	Karyawan Kontrak Contract Employees	15
TOTAL		54

Adapun perubahan jumlah SDM sepanjang tahun 2022 (dibandingkan tahun 2021) dapat dilihat pada tabel berikut:

The changes in the number of human resources throughout 2022 (compared to 2021) can be seen in the following table:

No. No.	Posisi Manajemen/Jabatan <i>Management Position/Title</i>	Tahun Year	
		2022	2021
1	Direksi Board of Directors	2	2
2	Dewan Komisaris Board of Commissioners	2	2
3	Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory	2	2
4	Komite Dewan Komisaris Board of Commissioners Committee	3	2
5	Kepala Divisi Head of Division	3	3
6	Kepala Bagian Head of Section	9	4
7	Staf Staff	18	21
8	Karyawan Kontrak Contract Employees	15	8
TOTAL		54	44

Perseroan terus berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada perusahaan sehingga mencapai hasil kerja yang berbasis pada kinerja (performance target) yang telah ditetapkan.

Salah satu program pengembangan SDM yang dilakukan Perseroan adalah melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang berkaitan dengan job description di setiap unit kerja, seperti skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross functional training, team training, dan creativity training.

Adapun program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang telah diikuti SDM Perseroan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The Company continues to be committed to managing and developing Human Resources (HR) to create quality human beings who have skills, work abilities, and work loyalty to the company to achieve predetermined performance targets.

One of the HR development programs carried out by the Company is through education, training, and certification related to job descriptions in each work unit, such as skill training, retraining or retraining, cross-functional training, team training, and creativity training.

The education, training, and certification programs that have been attended by the Company's HR during 2022 are as follows:

No. No.	Agenda Agenda	Waktu Time	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
1	Lokakarya Implementasi Manajemen Risiko dan Teknik Mudah Menyusun Laporan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management and Easy Techniques to Prepare Risk Management Reports Workshop	09 Februari 2022 February 09, 2022	STMA Trisakti	Agus Subrata
2	Webinar Online "Surety Bond dan Kontra Bank Garansi" "Surety Bond and Counter Bank Guarantees" Online Webinar	23 Februari 2022 February 23, 2022	Ahli Asuransi	Agus Subrata
3	Pelatihan "Mengelola Produk Surety Bond dengan Baik Pasti Untung" "Properly Managing Surety Bond Products Makes Profit" Training	24 Februari 2022 February 24, 2022	STMA Trisakti	Agus Subrata
4	Webinar Online - Menyelaraskan Keberlanjutan dan Manajemen Risiko Aligning Sustainability and Risk Management - Online Webinar	25 Februari 2022 February 25, 2022	GRC Management	Ria Juniati
5	Webinar Series	25 Februari 2022 February 25, 2022	GRC Management	Djoko Isdiyarno
6	Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification Exam	09 Maret 2022 March 09, 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Dini Rosdini
7	Inhouse Training PT Jamkrida Jabar tentang Suretyship dan Motivasi PT Jamkrida Jabar's Inhouse Training on Suretyship and Motivation	30 Maret 2022 March 30, 2022	PT Jamkrida Jabar	Seluruh Karyawan PT Jamkrida Jabar All employees of PT Jamkrida Jabar
8	Pelatihan "Memahami Data Integrity sebagai Pondasi Manajemen Risiko Terpadu" "Understanding Data Integrity as the Foundation of Integrated Risk Management" Training	30 Maret 2022 March 30, 2022	CRMS	Agus Subrata
9	Webinar GRC Penilaian Mandiri Pengendalian Risiko (RCSA) Risk Control Self Assessment (RCSA) GRC Webinar	18 - 19 April 2022 April 18 - 19, 2022	GRC Management	Djoko Isdiyarno
10	Ujian Sertifikasi dan Kompetensi Tingkat/Level 2 Level 2 Certification and Competency Exams	29 April 2022 April 29, 2022	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Dini Rosdini
11	Pelatihan dan Sertifikasi CBHCM & CHCO CBHCM & CHCO Training and Certification	11 - 14, 19, 28 - 29 Mei 2022 May 11 - 14, 19, 28 - 29, 2022	Sahabat Karir Indonesia	Noresya Ezmira
12	Ujian Sertifikasi dan Kompetensi Tingkat/Level 2	17 - 20 Mei dan 07 Juni 2022	PT RAP Indonesia	Subarman Basarah

No. No.	Agenda Agenda	Waktu Time	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
	Level 2 Certification and Competency Exams	May 17 - 20 and June 07, 2022		Prima Yusi Sari
13	Training Manajemen Risiko (GRC Series) Risk Management Training (GRC Series)	27 - 28 Juni 2022 June 27 – 28, 2022	GRC Management	Djoko Isdiyarno
14	Pelatihan terkait Mengelola Surety Bond Training related to Managing Surety Bond	30 Juni 2022 June 30, 2022	LPMA - STMA Trisakti	Miranti Setiani Afina Gita Nadya Laudita
15	Pelatihan Public Speaking Public Speaking Training	06 - 07 Juli 2022 July 06 – 07, 2022	Talenta Borneo Harmoni	R Resti Restiana
16	Pelatihan Surety Bond dan Kontra Bank Garansi "Prinsip Prinsip dan Praktik serta Prosedur Penanganan Klaim Surety Bond" Surety Bond and Counter Bank Guarantee Training "Principles and Practices and Procedures for Handling Surety Bond Claims"	12 Juli 2022 July 12, 2022	Ahli Asuransi	Miranti Setiani Zakaria Abdul Rohman Afina Gita Turyono Reyno Reivandhiwan Fajar Ardiansyah
17	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Guarantee Business Professional Certification	11 - 12 Juli 2022 July 11 – 12, 2022	PT Bintang Jamtama Sejahtera	Dini Rosdini Yanti Rachmawati Agus Subrata
18	Pelatihan Komunikasi Bisnis yang Efektif Effective Business Communication Training	19 - 21 Juli 2022 July 19 – 21, 2022	PPM Manajemen Training Program	Miranti Setiani Fahmi Jamiul Ulum
19	Ujian Ulang Presentasi CRMP CRMP Presentation Retest	25 Juli 2022 July 25, 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	Subarman Basarah Prima Yusi Sari
20	Inhouse Training Manajemen Risiko "Risk Awareness" PT Jamkrida Jabar Risk Management Inhouse Training "Risk Awareness" PT Jamkrida Jabar	26 Juli 2022 July 26, 2022	PT Jamkrida Jabar	Seluruh Karyawan PT Jamkrida Jabar
21	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Guarantee Business Professional Certification	26 Juli 2022 July 26, 2022	LSP Penjaminan	Agus Subrata
22	Pelatihan "Menuju Pencapaian Indeks Manajemen Risiko 3.0 SPIP Terintegrasi Sektor Publik" "Towards the Achievement of Public Sector Integrated Risk Management Index 3.0 SPIP" Training	28 Juli 2022 July 28, 2022	CRMS	Agus Subrata

No. No.	Agenda Agenda	Waktu Time	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
23	Webinar mengenai Aplikasi Pembiayaan Musyarakah Mutanqishah (MMQ) Musyarakah Mutanqishah (MMQ) Financing Application Webinar	29 Juli 2022 July 29, 2022	PT Iqtishad Konsultan Indonesia	Ria Juniati
				R Mutiara Gilang
				Nadya Laudita
24	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Guarantee Business Professional Certification	05 Agustus 2022 August 05, 2022	LSP Penjaminan	Yanti Rachmawati
				Dini Rosdini
25	Sertifikasi Auditor Hukum Legal Auditor Certification	18 Agustus 2022 August 18, 2022	Lembaga Jimly School of Law and Goverment	Syamsul Maarief
26	Pelatihan "Mengelola Risiko Reputasi di Masa Krisis" "Managing Reputational Risk in Time of Crisis" Training	25 - 26 Agustus 2022 August 25 – 26, 2022	LSPMR - RAP Learning Center	Syamsul Maarief
				Irwan Budhi Setiawan
27	Pelatihan Asuransi Kredit & Penjaminan Kredit Credit Insurance & Credit Guarantee Training	25 - 26 Agustus 2022 August 25 – 26, 2022	Ahli Asuransi	Miranti Setiani
				Dodi Darmawan
				Afina Gita
				Reyno Reivandhiwan
				Herman
				Reviana Dwita
				Nadya Laudita
28	Seminar Kekayaan Intelektual sebagai Aset Bisnis Digital & Jaminan Kredit: Implementasi PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif Intellectual Property as a Digital Business Asset & Credit Guarantee: Implementation of PP No. 24 of 2022 concerning the Creative Economy Seminar	22 September 2022 September 22, 2022	Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital FH UNPAD	Djoko Isdiyarno
				Pamungkas Hendro
				Syamsul Maarief
29	Lokakarya Pra-Ijtima Annual Meeting DPS VII Tahun 2022 BSS VII Annual Meeting Pre-Ijtima Workshop in 2022	24 September 2022 September 24, 2022	DSN MUI	Zaini Abdul Malik
				Khozin Abu Faqih
30	Lokakarya "Penerapan Kafalah di Perbankan & Keuangan Syariah" "Implementation of Kafalah in Islamic Banking & Finance" Workshop	30 September 2022 September 30, 2022	Iqtishad Consulting	Agus Subrata
31	Inhouse Training "Memahami Bisnis Keuangan Syariah dan Manajemen Risiko di Bisnis Keuangan Syariah"	04 Oktober 2022 October 04, 2022	Ahli Asuransi	Zaini Abdul Malik
				Khozin Abu Faqih
				Agus Subrata

No. No.	Agenda Agenda	Waktu Time	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
	"Understanding Islamic Finance Business and Risk Management in Islamic Finance Business" Inhouse Training			Djoko Isdiyarno
				Fahmi Jamiul Ulum
				Zakaria Abdul Rohman
				Noresya Ezmira
				Akhmad Syarif
				Herman
				R Mutiara Gilang
				Reviana Dwita
				Fathur Ainur
				Nadya Laudita
32	Seminar Asuransi Kredit Credit Insurance Seminar	06 Oktober 2022 October 06, 2022	APARI	Agus Subrata Arief Budiman
33	Pelatihan Aspek Legal dan Penyusunan Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Ijarah Maushufah Fiz Zimmah (IMFZ) Legal Aspects and Preparation of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Ijarah Maushufah Fiz Zimmah (IMFZ) Financing Agreements Training	12 Oktober 2022 October 12, 2022	Iqtishad Consulting	Agus Subrata
34	Webinar "Analisa Pembiayaan Syariah" "Sharia Financing Analysis" Webinar	22 Oktober 2022 October 22, 2022	Iqtishad Consulting	Agus Subrata Fahmi Jamiul Ulum Herman
35	Pelatihan Perpajakan Terbaru 2022 Latest Taxation Training 2022	09 November 2022 November 09, 2022	P3MD	Fathur Ainur Rahman
36	Pelatihan Finnon: Memahami Laporan Keuangan Training Finnon: Understanding Financial Statement	14 - 18 November 2022 November 14 - 18, 2022	PPM Manajemen	Noresya Ezmira
37	Pusat Penilaian Sertifikasi Penilai Assessment Center Assessor Certification (ACAC)	21 - 25 November 2022 November 21 - 25, 2022	PPM Manajemen	Asri Permata Legina
38	Pelatihan Flutter Flutter Training	28 November - 1 Desember 2022 November 28 - December 01, 2022	PT Lawba Techno Indonesia	M. Ihya'ul Khair

No. No.	Agenda Agenda	Waktu Time	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
39	Sertifikasi Nasional CRMO Level II CRMO Level II National Certification	21 - 23, 25 & 28 November 2022 November 21 - 23, 25 & 28, 2022	LSPMR - RAP Learning Center	Elok Khoirunnisa
40	Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VIII "ESG Investing and Risk Mitigation" VIII National Risk Management Professional Conference "ESG Investing and Risk Mitigation"	01 - 02 Desember 2022 December 01 – 02, 2022	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko	Djoko Isdiyarno Noresya Ezmira
41	Pelatihan Pemimpin sebagai Pelatih In-Class Training Leader as A Coach	20 - 21 Desember 2022 December 20 – 21, 2022	PPM Manajemen	Yanti Rachmawati

E. ASPEK UMUM

General Aspect

Sebagai bagian *supporting* yang menunjang kebutuhan dan sarana prasarana dari divisi-divisi lain dalam menjalankan operasional, maka berikut ini adalah capaian yang dilakukan oleh bagian umum PT Jamkrida Jabar pada tahun 2022:

1. Pengelolaan Inventaris Kantor:
 - a. Gedung dan aset-aset di dalamnya.
 - b. Kendaraan inventaris kantor.
 - c. Pengadaan kebutuhan karyawan seperti ATK, seragam, dan lain-lain.
2. Penertiban Administrasi:
 - a. Penertiban administrasi kantor.
 - b. Penertiban pengarsipan dokumen kantor.
3. Menyediakan sarana prasarana dalam penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 (persetujuan dan pengesahan RKAP tahun 2023).

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum mengelola Belanja Modal Perseroan. Adapun

As a supporting part that supports the needs and infrastructure of other divisions in carrying out operations, the following are the achievements made by the general section of PT Jamkrida West Java in 2022:

1. Office Inventory Management:
 - a. The building and the assets in it.
 - b. Office inventory vehicles.
 - c. Procurement of employee needs such as ATK, uniforms, and others.
2. Administrative Control:
 - a. Office administration control.
 - b. Enforcement of archiving office documents.
3. Provide infrastructure facilities in the implementation of the Company's Annual GMS for Fiscal Year 2021 and Extraordinary GMS in 2022 (approval and ratification of the BP in 2023)

In carrying out its duties, the general department manages the Company's Capital Expenditure.

realisasi belanja modal selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The realization of capital expenditure during 2022 is as follows:

Belanja Modal Capital Expenditure

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

KATEGORI CATEGORY	RKAP 2022 BP 2022	REALISASI REALIZATION	%
Inventaris Inventory	1.066,85	1.011,64	94,82%
Kendaraan Vehicle	24,00	-	0,00%
Gedung Building	679,00	-	0,00%
Kesisteman System	465,00	164,09	35,29%
JUMLAH TOTAL	2.234,85	1.175,73	52,61%

Berdasarkan tabel di atas, Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar 52,61% atau senilai Rp1,18 miliar dari anggaran senilai Rp2,23 miliar. Pengeluaran Belanja Modal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Based on the table above, the Company realized a capital expenditure of 52.61% or IDR 1.18 billion from the budget of IDR 2.23 billion. This Capital Expenditure is certainly adjusted to the needs of the Company.

F. ASPEK SISTEM MANAJEMEN INFORMASI Information Management System Aspect

Realisasi Program Kerja Bagian Sistem Manajemen Informasi (SMI) sepanjang tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

The realization of the Information Management Systems (IMS) Work Program throughout 2022 is as follows:

No. No.	Nama Program Program Name	Uraian Description
1	Upgrade dan Penambahan Fitur PPID pada Website Korporat	Upgrade template <i>user interface</i> (UI) dan <i>back end website corporate</i> sehingga konten <i>website</i> bisa langsung di <i>update</i> oleh <i>user</i> . Selain itu juga dilakukan Penambahan fitur PPID untuk menampilkan keterbukaan informasi publik.

No. No.	Nama Program Program Name	Uraian Description
	Upgrading and Adding PPID Features to Corporate Websites	Upgrading user interface (UI) templates and corporate website back end so that website content can be updated directly by users. In addition, the PPID feature was also added to display public information disclosure.
2	Migrasi <i>hosting</i> jamkrida-jabar.co.id Migration of hosting jamkrida-jabar.co.id	Migrasi <i>hosting</i> dari Qword ke <i>Natanetwork</i> . Migration of hosting from Qword to Natanetwork. • <i>Cpanel</i> • <i>Email</i> • <i>Database</i> • <i>File Server</i> • <i>Sub Domain</i>
3	<i>Upgrade webserver menggunakan domain & subdomain.</i> Upgrading webserver using domain & subdomain.	<i>Upgrade webserver</i> dari penggunaan IP address menjadi <i>domain & subdomain</i> sehingga pengguna/user tidak perlu lagi mengingat alamat IP address aplikasi, cukup menggunakan nama <i>domain</i> ataupun <i>subdomain</i> dalam mengakses aplikasi. Upgrade the webserver from using an IP address to a domain & subdomain so that users no longer need to remember the application's IP address, just use the domain name or sub-domain in accessing the application.
4	Pembuatan Aplikasi Surety Bond Online Development of Surety Bond Online Application	Pembuatan aplikasi <i>surety bond online</i> untuk mengakomodir mitra mitra prinsipal yang memerlukan jaminan pelaksanaan proyek lewat <i>surety bond</i> sehingga bisa melayani mitra dengan bantuan agen secara <i>online</i> . Development of surety bond applications online to accommodate principal partners who need guarantees for project implementation through surety bonds so that they can serve partners with the help of agents online.
5	<i>Upgrade Aplikasi Penjaminan, Modul Laporan, dan Rekap Produksi</i> Upgrade the Guarantee Application, the Report Module, and the Production Recap	Perbaikan ekspor ke <i>Excel</i> untuk laporan dan rekap penerbitan Sertifikat Penjaminan, sehingga laporan tersebut dapat menampilkan data beberapa bulan atau beberapa tahun sekaligus. Improvements to export to Excel for reports and recap of the issuance of Guarantee Certificates, so that the report can display data for several months or several years at once.
6	Penambahan dan <i>upgrade</i> PABX dengan IP Phone PABX additions and upgrades with IP Phones	<i>Upgrade</i> PABX analog dengan penambahan <i>server IP Phone</i> sehingga koneksi intercom bisa menggunakan jaringan LAN dan <i>extension</i> klien bisa lebih dari 100 <i>user</i> . PABX upgrades are analogous to adding IP Phone servers so that intercom connections can use LAN networks and client extensions for more than 100 users.

No. No.	Nama Program Program Name	Uraian Description
7	Upgrade aplikasi klaim dan subrogasi modul Laporan klaim dan subrogasi Upgrade the claims and subrogation application module Claims and subrogation reports	Upgrade aplikasi klaim modul laporan pembayaran klaim dan subrogasi dengan penambahan beberapa <i>field</i> sesuai permintaan <i>user</i> dan mengubah teknologi ekspor ke <i>excel</i> sehingga dapat menampilkan data lebih banyak sesuai kemampuan <i>excel</i> 2016. Upgrade the claim application module claims and subrogation payment reports by adding several fields according to user requests and changing the export technology to excel so that it can display more data according to Excel 2016 capabilities.
8	Upgrade Aplikasi Penjaminan, Modul Scoring CBC dan Monitoring SP3 Upgrade the Guarantee Application, the CBC Scoring Module, and SP3 Monitoring	Penambahan modul <i>scoring</i> CBC untuk keperluan analisa penjaminan <i>case by case</i> (CBC) dan pembuatan modul aplikasi <i>monitoring</i> SP3 untuk memantau pelaksanaan penjaminan CBC yang sudah dibuatkan SP3 nya. Adding the CBC scoring module for the purposes of analyzing CBC guarantees and creating an SP3 monitoring application module to monitor the implementation of CBC guarantees for which SP3 has been made.
9	Pembuatan Aplikasi <i>Ticketing</i> SMI Development of SMI Ticketing Applications	Pembuatan modul aplikasi <i>ticketing</i> dibagian SMI untuk mengakomodir keperluan dan permintaan dari <i>user</i> divisi lain, sekaligus sebagai <i>monitoring</i> progres pekerjaan yang sedang dikerjakan SMI atas permintaan dari divisi/bagian lain. Development of ticketing application modules for SMI to accommodate needs and requests from users of other divisions, as well as monitor the progress of work being carried out by SMI at the request of other divisions/sections.
10	Pembuatan Aplikasi <i>Single Sign On</i> (SSO) dan Otorisasi Development of Single Sign On (SSO) Applications and Authorization	Pembuatan Modul aplikasi <i>Single Sign On</i> (SSO) dan Otorisasi aplikasi untuk keperluan integrasi <i>user</i> pengguna supaya hanya login satu kali untuk beberapa aplikasi. Development of Single Sign On (SSO) application modules and application authorization for user integration purposes so that only one-time login for several applications.
11	Pembuatan Aplikasi HRIS Development of HRIS Application	Pembuatan modul HRIS untuk tahap awal dibatasi hanya terkait data-data karyawan dan absensi. Untuk kelengkapan lainnya akan dilakukan <i>upgrade</i> di tahun depan. Development of the HRIS module for the initial stage is limited only to employee data and attendance. Other equipment will be upgraded in the next year.

No. No.	Nama Program Program Name	Uraian Description
12	Migrasi <i>server database</i> dan <i>server aplikasi</i> Migration of database servers and application servers	Seiring makin bertambahnya proses data tiap hari, maka kondisi <i>server</i> eksisting sudah sangat terbebani. Sehingga ketika <i>server</i> baru sudah tersedia maka dilakukan migrasi <i>server Database</i> dan <i>server aplikasi</i> ke <i>server</i> baru dengan spek yang lebih bagus dan lebih handal. Untuk meningkatkan performa dan kecepatan akses ke aplikasi penjaminan dan aplikasi lainnya yang sudah berjalan. As data processing increases every day, the condition of the existing server is very burdened. So that when a new server is available, database servers and application servers are migrated to new servers with better and more reliable specs. To improve the performance and speed of access to the guarantee application and other applications that are already running.
13	Pembuatan Modul Koreksi Sertifikat Penjaminan pada Aplikasi Penjaminan Development of Guarantee Certificate Correction Module on Guarantee Application	Pembuatan Modul Koreksi Sertifikat Penjaminan untuk mengakomodir perubahan dan pembatalan data penjaminan. Development of Guarantee Certificate Correction Module to accommodate changes and cancellations of guarantee data.
14	Pengembangan <i>Web Profile</i> Perusahaan Company Profile Web Development	Penyesuaian teknologi yang diterapkan pada <i>website</i> Perusahaan untuk menambah performa dan meningkatkan sisi keamanan <i>website</i> , serta update informasi yang di publikasi di dalam <i>web profile</i> . Technological adjustments implemented on the Company's website to increase performance and improve website security, as well as update information published on the web profile.
15	Pembuatan Aplikasi <i>Host to Host</i> Development of Host to Host Applications	Pembuatan Aplikasi <i>Host to Host</i> untuk menjembatani keperluan pengiriman dan penerimaan data dari dan ke mitra supaya lebih cepat dan lebih aman. Development of Host to Host Applications to bridge the need for sending and receiving data from and to partners to make it faster and safer.
16	Revitalisasi Jaringan dan Akses Point Network and Access Point Revitalization	<i>Upgrade</i> perangkat wifi untuk meningkatkan kinerja dan stabilitas akses <i>point</i> dan juga meningkatkan kapasitas jaringan akses <i>point</i> supaya bisa diakses oleh <i>client</i> dengan jumlah banyak. Upgrading wifi devices to improve the performance and stability of the access point and also increase the capacity of the access point network so that it can be accessed by a large number of clients.

G. ASPEK PENGAWASAN

Supervision Aspect

Sebagai organ pendukung Perseroan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholders*, yaitu suatu kaidah, norma ataupun praktik bisnis yang sehat dan beretika. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang baik memerlukan praktik pengawasan yang mengacu pada prinsip GCG.

As a supporting organ of the Company in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) or corporate governance to be able to increase added value for stakeholders, namely a rule, norm, or healthy and ethical business practice. In practice, good corporate governance requires supervisory practices that refer to GCG principles.

Dalam mewujudkan GCG, Satuan Pengawasan Internal (SPI) memiliki beberapa peran, diantaranya:

In realizing GCG, the Internal Supervisory Unit (ISU) has several roles, including:

1. Sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan;
2. Sebagai katalisator dan konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan praktik GCG serta dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

1. As an independent supervisor who conducts audits, evaluations, and assesses the company's operations and activities;
2. As a catalyst and consultant in certain matters for the Board of Directors and management related to risk management practices, internal control systems, and GCG practices as well as efforts to improve performance and corporate value sustainably.

Unit SPI Perseroan merupakan aparat pengawas (auditor) internal Perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

The Company's ISU Unit is the Company's internal supervisor (auditor) led by a head and directly responsible to the Main Director.

Hal-hal yang telah dilakukan Unit SPI Perseroan selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The things that have been done by the Company's ISU Unit during 2022 are as follows:

1. Melakukan audit internal sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan GCG yang diterapkan Perseroan.
3. Melakukan review terhadap SOP yang berlaku di Perseroan.
4. *Counterpart* dengan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik dan OJK).

1. Conducting internal audits by the annual supervisory work program.
2. Monitoring the implementation of GCG implemented by the Company.
3. Reviewing the applicable SOPs in the Company.
4. Counterpart with external auditors (Public Accounting Firm and OJK).

UNIT USAHA SYARIAH

Sharia Business Unit

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar memperoleh izin pembentukan berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor: KEP-4/NB.223/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan mulai menjalankan produksinya pada bulan Mei 2015, Unit Usaha Syariah menjadi bukti komitmen Perseroan dalam mengembangkan bisnis penjaminan.

Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar dipimpin oleh Kepala Unit Usaha Syariah dan dibina oleh dua orang Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta telah lolos Uji Kelayakan dan Kepatanan dari OJK.

Sebagai sarana penunjang operasionalnya, Unit Usaha syariah PT Jamkrida Jabar telah membangun Sistem Informasi *Kafalah* berbasis *web* dan layanan *Kafalah Online*. Dimana sistem tersebut dapat menampilkan data Penjaminan, Klaim, dan Subrogasi secara *up to date*. Selain itu, dalam sistem informasi tersebut juga dapat ditampilkan perhitungan *gearing ratio*, regaransi, dan *business recovery program*, serta saat ini dalam proses pengembangan dan akan terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan.

Dengan modal awal pendirian senilai Rp15 miliar dan penambahan modal senilai Rp10 miliar, Unit Usaha Syariah sampai dengan 31 Desember 2022 memiliki Total Ekuitas sebesar Rp35,19 miliar, Total Aset sebesar Rp49,57 miliar, telah menjamin pembiayaan senilai Rp867,12 miliar dengan memperoleh Imbal Jasa Kafalah senilai Rp15,51 miliar, dengan 66.288 *makful anhu*/terjamin, dimana 56.016 diantaranya merupakan KUMKM.

Adapun kinerja Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Sharia Business Unit PT Jamkrida Jabar obtained a formation permit based on OJK Decree Number: KEP-4 / NB.223 / 2015 dated February 3, 2015 and started its production in May 2015, Sharia Business Unit is proof of the Company's commitment in developing the guarantee business.

The Sharia Business Unit of PT Jamkrida Jabar is led by the Head of the Sharia Business Unit and fostered by two Sharia Supervisory Boards recommended by the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and has passed the Feasibility and Appropriateness Test from the OJK.

As a means of supporting its operations, the sharia Business Unit of PT Jamkrida Jabar has built a web-based Kafalah Information System and Online Kafalah services. Where the system can display Guarantee, Claim, and Subrogation data up to date. In addition, the information system can also be displayed the calculation of gearing ratio, warranty, and business recovery program, and is currently in the development process and will be integrated with the Financial Information System.

With an initial establishment capital of IDR 15 billion and additional capital of IDR 10 billion, the Sharia Business Unit as of December 31, 2022 has Total Equity of IDR 35.19 billion. Total Assets of IDR 49.57 billion, has guaranteed financing worth IDR 867.12 billion by obtaining Kafalah Fee worth IDR 15.51 billion, with 66,288 *Makful Anhu*/guaranteed, where 56,016 among them are CMSMEs.

The performance of the Sharia Business Unit PT Jamkrida West Java during 2022 can be seen in the following tables.

A. ASPEK KAFALAH**Kafalah Aspect****VOLUME PEMBIAYAAN
FINANCING VOLUME****PERIODE 2022
PERIOD 2022**

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER KAFALAH SOURCE OF GUARANTEE		2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN FINANCING CATEGORY						
a.	Produktif Productive	527.472,36	534.552,98	804.154,47	150,43%	52,45%
b.	Non Produktif Non Productive	418.862,38	462.811,86	553.760,84	119,65%	32,21%
JUMLAH TOTAL		946.334,73	997.364,84	1.357.915,30	136,15%	43,49%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY						
a.	Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	82.133,75	82.668,96	131.008,02	158,47%	59,51%
b.	Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	-	-	0,00%	0,00%
c.	Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	428.650,62	426.096,14	573.499,25	134,59%	33,79%
d.	Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	-	-	-	0,00%	0,00%
e.	Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	6.864,00	9.695,74	96.575,00	996,06%	1306,98%
f.	Bank Garansi Bank Guarantee	4.862,98	9.890,90	3.072,20	31,06%	-36,82%
g.	Surety Bond	4.961,00	6.201,25	-	0,00%	-100,00%
h.	Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	418.862,38	462.811,86	553.760,84	119,65%	32,21%
JUMLAH TOTAL		946.334,73	997.364,84	1.357.915,30	136,15%	43,49%

Volume Pembiayaan yang dijamin tahun 2022 adalah senilai Rp1,36 triliun atau terealisasi sebesar 136,15% dari RKAP 2022, dimana Volume Pembiayaan Produktif senilai Rp804,15

The guaranteed financing volume in 2022 is IDR 1.36 trillion or realized by 136.15% of the BP 2022, of which the productive financing volume is IDR 804.15 billion (reached 150.43%) and

miliar (tercapai 150,43%) dan Non Produktif senilai Rp553,76 miliar (tercapai 119,65%). Volume Pembiayaan tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 43,49% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

non-productive is IDR 553.76 billion (reached 119.65%). Financing volume in 2022 grew by 43.49% compared to the realization in 2021.

VOLUME KAFALAH GUARANTEE VOLUME PERIODE 2022 PERIOD 2022

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER KAFALAH SOURCE OF GUARANTEE	2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN FINANCING CATEGORY					
a. Produktif Productive	258.547,13	274.478,29	375.243,46	136,71%	45,14%
b. Non Produktif Non Productive	368.604,42	410.232,07	491.876,61	119,90%	33,44%
JUMLAH TOTAL	627.151,55	684.710,35	867.120,07	126,64%	38,26%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	28.877,24	23.412,87	34.517,82	147,43%	19,53%
b. Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	-	-	0,00%	0,00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	214.354,71	227.436,42	281.131,55	123,61%	31,15%
d. Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	-	-	-	0,00%	0,00%
e. Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	5.491,20	7.536,85	56.521,90	749,94%	929,32%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	4.862,98	9.890,90	3.072,20	31,06%	-36,82%
g. Surety Bond	4.961,00	6.201,25	-	0,00%	-100,00%
h. Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	368.604,42	410.232,07	491.876,61	119,90%	33,44%
JUMLAH TOTAL	627.151,55	684.710,35	867.120,07	126,64%	38,26%

Volume Kafalah tahun 2022 adalah senilai Rp867,12 miliar atau terealisasi sebesar 126,64% dari RKAP 2022, dimana Volume

The volume of Kafalah in 2022 was IDR 867.12 billion or realized by 126.64% of the BP 2022, of which the Volume of Productive Kafalah was

Kafalah Produktif senilai Rp375,24 miliar (tercapai 136,71%) dan Non Produktif senilai Rp491,88 miliar (tercapai 119,90%). Volume Kafalah tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 38,26% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

worth IDR 375.24 billion (reached 136.71%) and Non-Productive was worth IDR 491.88 billion (reached 119.90%). The volume of Kafalah in 2022 grew by 38.26% when compared to the realization in 2021.

IMBAL JASA KAFALAH CASH BASIS GUARANTEE FEE ON A CASH BASE

PERIODE 2022
PERIOD 2022

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER KAFALAH SOURCE OF GUARANTEE	2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN FINANCING CATEGORY					
a. Produktif Productive	3.957,16	4.808,28	5.981,26	124,39%	51,15%
b. Non Produktif Non Productive	6.203,15	7.660,42	9.532,81	124,44%	53,68%
JUMLAH TOTAL	10.160,31	12.468,71	15.514,07	124,42%	52,69%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY					
a. Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	796,86	811,39	861,80	106,21%	8,15%
b. Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	-	-	0,00%	0,00%
c. Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	2.979,29	3.724,80	4.293,68	115,27%	44,12%
d. Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	-	-	-	0,00%	0,00%
e. Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	48,05	73,36	802,83	1094,34%	1570,88%
f. Bank Garansi Bank Guarantee	36,92	78,67	22,96	29,18%	-37,81%
g. Surety Bond	96,04	120,05	-	0,00%	-100,00%
h. Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	6.203,15	7.660,42	9.532,81	124,44%	53,68%
JUMLAH TOTAL	10.160,31	12.468,71	15.514,07	124,42%	52,69%

Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2022 adalah senilai Rp15,51 miliar atau terealisasi sebesar

Kafalah Fee on a Cash Base revenue in 2022 was IDR 15.51 billion or realized by 124.42% of

124,42% dari RKAP 2022, dimana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp5,98 miliar (tercapai 124,39%) dan Non Produktif senilai Rp9,53 miliar (tercapai 124,44%). Pendapatan IJK Cash Basis tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 52,69% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

the BP 2022, where Productive Kafalah Fee Revenue was IDR 5.98 billion (reached 124.39%) and Non-Productive was IDR 9.53 billion (reached 124.44%). Kafalah Fee on a Cash Base revenue in 2022 grew by 52.69% when compared to the realization in 2021.

IMBAL JASA KAFALAH ACCRUAL BASIS (*) KAFALAH FEE ON AN ACCRUAL BASE

PERIODE 2022
PERIOD 2022

dalam jutaan rupiah/in millions of rupiah

SUMBER KAFALAH SOURCE OF GUARANTEE		2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI PEMBIAYAAN FINANCING CATEGORY						
a.	Produktif Productive	2.229,59	5.009,21	5.317,20	106,15%	138,48%
b.	Non Produktif Non Productive	9.657,40	6.557,20	8.105,19	123,61%	-16,07%
JUMLAH TOTAL		11.886,99	11.566,41	13.422,39	116,05%	12,92%
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY						
a.	Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	442,01	805,35	841,82	104,53%	90,45%
b.	Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	-	-	0,00%	0,00%
c.	Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	1.649,75	3.871,91	3.709,45	95,80%	124,85%
d.	Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	1,95	-	-	0,00%	-100,00%
e.	Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	31,35	94,49	718,77	760,71%	2192,62%
f.	Bank Garansi Bank Guarantee	36,87	102,57	21,82	21,28%	-40,81%
g.	Surety Bond	67,66	134,90	25,33	18,78%	-62,56%
h.	Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	9.657,40	6.557,20	8.105,19	123,61%	-16,07%
JUMLAH TOTAL		11.886,99	11.566,41	13.422,39	116,05%	12,92%

(*) termasuk restitusi IJK/include Restitution of Kafalah Fee

Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2022 adalah senilai Rp13,42 miliar atau terealisasi sebesar 116,05% dari RKAP 2022, dimana Pendapatan IJK Produktif senilai Rp5,32 miliar (tercapai 106,15%) dan Non Produktif senilai Rp8,11 miliar (tercapai 123,61%). Pendapatan IJK Accrual Basis tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 12,92% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

Kafalah Fee on an Accrual Base revenue in 2022 is IDR 13.42 billion or realized by 116.05% of the BP 2022, where Productive Kafalah Fee Income is worth IDR 5.32 billion (achieved 106.15%) and Non-Productive worth IDR 8.11 billion (achieved 123.61%). Kafalah Fee on an Accrual Base revenue in 2022 experienced a growth of 12.92% when compared to the realization in 2021.

JUMLAH KUMKM
NUMBER OF CMSMEs
PERIODE 2022
PERIOD 2022

dalam satuan unit/in units

JENIS TERJAMIN TYPES OF GUARANTEE		2021	RKAP 2022 BP 2022	2022	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
KATEGORI PRODUK PRODUCT CATEGORY						
a.	Pembiayaan Usaha Menengah Medium Business Financing	34	34	1.805	5277,38%	5211,76%
b.	Pembiayaan Usaha Kecil Small Business Financing	-	-	-	0,00%	0,00%
c.	Pembiayaan Usaha Mikro Micro Business Financing	48.942	48.650	54.076	111,15%	10,49%
d.	Pembiayaan Koperasi Cooperative Financing	-	-	-	0,00%	0,00%
e.	Pembiayaan Konstruksi Construction Financing	28	40	57	144,12%	103,57%
f.	Bank Garansi Bank Guarantee	42	85	77	90,14%	83,33%
g.	Surety Bond	4	5	-	0,00%	-100,00%
JUMLAH TOTAL		49.050	48.815	56.016	114,75%	14,20%

Jumlah KUMKM Terjamin (Makful Anhu) tahun 2022 adalah sebanyak 56.016 unit atau terealisasi sebesar 114,75% dari RKAP 2022. Jumlah KUMKM Terjamin tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 14,20% jika dibandingkan tahun 2021.

The number of Guaranteed CMSMEs (Makful Anhu) in 2022 is 56,016 units or realized by 114.75% of the BP 2022. The number of Guaranteed CMSMEs in 2022 grew by 14.20% compared to 2021

B. ASPEK KEUANGAN**Financial Aspect****LAPORAN POSISI KEUANGAN**
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**31 DESEMBER 2022**
AS OF DECEMBER 31, 2022(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
ASET					
ASSETS					
ASET LANCAR					
CURRENT ASSETS					
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	26.096,89	28.395,93	29.189,02	102,79%	11,85%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	(54,00)	(462,89)	857,20%	0,00%
Surat Berharga Marketable Securities	8.077,54	13.477,54	10.028,27	74,41%	24,15%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	(5,40)	-	0,00%	0,00%
Piutang Re/Cogaransi Re/Co-Guarantee Receivables	3.173,87	3.173,87	2.908,88	91,65%	-8,35%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	(172,98)	-	0,00%	0,00%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Accrued Income	550,24	550,24	679,40	123,47%	23,47%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Expected Credit Losses Reserve	-	-	-	0,00%	0,00%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka Advances and Prepaid Expenses	526,05	909,69	1.820,52	200,13%	246,07%
Piutang Lain-Lain Other Receivables	15,17	15,17	13,66	90,02%	-9,98%
Properti Investasi Investment Property	-	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH ASET LANCAR TOTAL CURRENT ASSETS	38.439,77	46.290,07	44.176,85	95,43%	14,92%

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2022
AS OF DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS					
Beban Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	2.875,26	3.735,68	2.492,46	66,72%	-13,31%
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	1.901,17	2.072,16	1.884,98	90,97%	-0,85%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	674,87	477,56	980,18	205,25%	45,24%
Aset Lain-Lain Other Assets	41,89	132,95	33,92	25,51%	-19,04%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR TOTAL NON-CURRENT ASSETS	5.493,19	6.418,35	5.391,54	84,00%	-1,85%
JUMLAH ASET TOTAL ASSETS	43.932,96	52.708,41	49.568,39	94,40%	12,83%
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS LIABILITIES					
LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT TERM LIABILITIES					
Utang Pajak Taxes Payable	13,16	13,16	31,54	239,63%	139,63%
Utang Re/Cogaransi Re/Co-Guarantee Payable	2.182,89	2.182,89	2.379,14	108,99%	8,99%
Utang Klaim Claim Payable	-	-	-	0,00%	0,00%
Beban yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	127,61	127,61	34,81	27,28%	-72,72%
Penampungan Sementara Temporary Shelter	681,54	681,54	997,65	146,38%	46,38%
Utang Lancar Lainnya Other Current Payables	329,08	2.441,44	1.297,02	53,13%	294,14%
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	3.107,48	3.054,82	3.201,39	104,80%	3,02%

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2022
AS OF DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK TOTAL SHORT TERM LIABILITIES	6.441,76	8.501,46	7.941,56	93,41%	23,28%
LIABILITAS JANGKA PANJANG LONG TERM LIABILITIES					
Pendapatan Diterima Dimuka Prepaid Income	3.133,20	5.105,64	4.886,32	95,70%	55,95%
Cadangan Klaim Claim Reserve	950,57	1.133,90	1.552,12	136,88%	63,28%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Employee Benefits Liabilities	-	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG TOTAL LONG TERM LIABILITIES	4.083,77	6.239,54	6.438,44	103,19%	57,66%
JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	10.525,53	14.741,00	14.380,00	97,55%	36,62%
EKUITAS EQUITY					
Modal Capital Stock	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00%
Cadangan Umum General Reserve	4.265,73	8.233,75	6.017,44	73,08%	41,06%
Saldo Laba Retained Earnings	3.963,16	4.555,12	4.266,13	93,66%	7,64%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga Difference in The Fair Value of Securities	178,54	178,54	(95,18)	-53,31%	-153,31%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Difference in Remeasurement of Post-Employee Benefits Liability	-	-	-	0,00%	0,00%
JUMLAH EKUITAS TOTAL EQUITY	33.407,43	37.967,41	35.188,39	92,68%	5,33%

LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

31 DESEMBER 2022
AS OF DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	43.932,96	52.708,41	49.568,39	94,04%	12,83%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
the accompanying notes form an integral part of these financial statements

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
PENDAPATAN KAFALAH KAFALAH INCOME					
Imbal Jasa Kafalah Kafalah Fee	12.004,09	17.479,25	13.667,04	78,19%	13,85%
Beban Akuisisi Acquisition Expenses	(2.013,35)	(2.414,32)	(2.200,32)	91,14%	9,29%
Restitusi IJK Restitution of Kafalah Fee	(117,11)	-	(244,64)	0,00%	108,91%
Manajemen Fee Management Fee	618,79	1.083,09	1.309,58	120,91%	111,64%
Beban Regaransi Re-Guarantee Expenses	(4.563,50)	(7.150,04)	(4.947,69)	69,20%	8,42%
JUMLAH PENDAPATAN KAFALAH TOTAL KAFALAH INCOME	5.928,93	8.997,99	7.583,97	84,29%	27,91%
KLAIM CLAIM					
Beban Klaim Claim Expenses	(3.675,60)	(2.188,03)	(2.879,25)	131,59%	-21,67%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim Recovery (Establishment) in Reserve Claim	106,93	(66,74)	(265,36)	397,58%	-348,15%
JUMLAH KLAIM TOTAL CLAIM	(3.568,67)	(2.254,77)	(3.144,60)	139,46%	-11,88%
PENDAPATAN KAFALAH BERSIH KAFALAH INCOME - NET	2.360,25	6.743,22	4.439,36	65,83%	88,09%
PENDAPATAN INVESTASI INVESTMENT INCOME	2.645,71	2.670,00	2.229,27	83,49%	-15,74%
PENDAPATAN SUBROGASI SUBROGATION INCOME	213,94	164,85	221,89	134,60%	3,72%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN- LAIN OTHER INCOME (EXPENSES)	(354,05)	(471,60)	(931,44)	197,51%	163,08%
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES					
Beban Operasional Operating Expenses	(133,27)	(725,73)	(426,94)	58,83%	220,36%
Beban Sumber Daya Manusia Human Resource Expenses	(606,40)	(2.968,31)	(1.031,28)	34,74%	70,07%
Beban Administrasi & Umum General and Administrative Expenses	(163,02)	(660,00)	(336,56)	50,99%	106,45%
JUMLAH BEBAN USAHA TOTAL OPERATING EXPENSES	(902,69)	(4.354,03)	(1.794,79)	41,22%	98,83%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK EARNINGS BEFORE TAX	3.963,16	4.752,43	4.164,29	87,62%	5,08%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN INCOME TAX EXPENSES					
Beban Pajak Kini Current Income Tax Expenses	-	-	-	0,00%	0,00%
Manfaat Pajak Tangguhan Deferred Tax Benefits	-	(197,31)	101,84	-51,61%	0,00%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022
FOR THE YEAR ENDED ON DECEMBER 31, 2022

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021 (AUDITED)	RKAP 2022 BP 2022	2022 (AUDITED)	% ACHIEVE- MENT	% GROWTH
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN TOTAL INCOME TAX EXPENSES	-	(197,31)	101,84	-51,61%	0,00%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN EARNINGS AFTER TAX	3.963,16	4.555,12	4.266,13	93,66%	7,64%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME	(168,86)	-	-	0,00%	-100,00%
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)	3.794,30	4.555,12	4.266,13	93,66%	12,44%

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
 the accompanying notes form an integral part of these financial statements

Dari Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi & Komprehensif Lain di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Laba Bersih Tahun Berjalan UUS adalah sebesar Rp4,27 miliar atau terealisasi sebesar 93,66% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 7,64% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.
- Total Aset UUS tahun 2022 adalah senilai Rp45,57 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,83% dibandingkan realisasi tahun 2021 senilai Rp43,93 miliar.
- Pendapatan Investasi UUS tahun 2022 adalah senilai Rp2,23 miliar atau

From the Statement of Financial Position and Statement of Profit or Loss & Other Comprehensive above, it can be explained that:

- SBU's Current Year Earnings After Tax is IDR 4.27 billion or realized by 93.66% of the BP 2022 and experienced a growth of 7.64% when compared to the realization in 2021.
- Total Assets of SBU in 2022 are valued at IDR 45.57 billion or a growth of 12.83% compared to the realization in 2021 of IDR 43.93 billion.
- SBU's Investment Income in 2022 is IDR 2.23 billion or realized by 83.49% of the BP

teralisasi sebesar 83,49% dari RKAP 2022 dan mengalami penurunan sebesar 15,74% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

- Beban Klaim UUS tahun 2022 adalah senilai Rp2,88 miliar atau terealisasi sebesar 131,59% dari RKAP 2022 dan mengalami penurunan sebesar 21,67% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.
- Beban Usaha UUS tahun 2022 adalah senilai Rp1,79 miliar atau terealisasi sebesar 41,22% dari RKAP 2022 dan mengalami pertumbuhan sebesar 98,83% jika dibandingkan realisasi tahun 2021.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar adalah:

- Dari sisi capaian Volume Kafalah, terlihat bahwa Kafalah Pembiayaan Usaha Menengah, Mikro, Konstruksi dan Multiguna mampu melampaui target, namun disisi lain Kafalah Bank Garansi dan *Surety Bond* masih dibawah target.
- Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Kafalah Bank Garansi adalah tidak maksimalnya kontribusi dari mitra bank umum syariah dikarenakan penyerapan fasilitas pada kategori ini tidak maksimal. Adapun untuk *Surety Bond*, realisasi kafalah dialihkan ke unit konvensional. Sedangkan untuk Kafalah Pembiayaan Multiguna di tahun 2022, UUS mengambil kebijakan untuk lebih selektif dan membatasi akseptasi sebagai bagian dari upaya maintenance pemenuhan rasio penjaminan usaha produktif agar tetap sesuai dengan ketentuan OJK paling sedikit 25%.
- Untuk Kafalah Pembiayaan Usaha Kecil dan Koperasi tidak ditargetkan secara khusus dalam RKAP 2022 karena UUS masih memfokuskan kafalah pada kategori pembiayaan lainnya.

2022 and experienced a decrease of 15.74% when compared to the realization in 2021.

- SBU's Claim Expense in 2022 is IDR 2.88 billion or realized by 131.59% of the BP 2022 and experienced a growth of 21.67% when compared to the realization in 2021.
- SBU's Operating Expenses in 2022 are IDR 1.79 billion or realized by 41.22% of the BP 2022 and growth by 98.83% when compared to the realization in 2021.

Some factors that affect the performance achievements of the Sharia Business Unit of PT Jamkrida Jabar are:

- In terms of Kafalah Volume achievement, it can be seen that the Kafalah of Medium, Micro, Construction and Multipurpose Business Financing was able to exceed the target, but on the other hand the Kafalah of Guarantee Bank and Surety Bond were still below the target.
- One of the factors that caused the Kafalah of Guarantee Bank target was not maximized contribution from Islamic commercial bank partners because the absorption of facilities in this category was not optimal. As for the Surety Bond, the realization of the kafalah was transferred to conventional units. As for the Kafalah of Multipurpose Financing in 2022, SBI takes a policy to be more selective and limit acceptance as part of maintenance efforts to fulfill the productive business kafalah ratio so that it remains in accordance with OJK regulations of at least 25%.
- For Kafalah Small Business and Cooperative Financing is not specifically targeted in the BP 2022 because SBI is still focusing on other financing categories.

- Faktor lainnya adalah tidak semua pembiayaan terutama kategori produktif dibagi risikonya oleh bank kepada mitra Asuransi/Penjaminan dengan alasan masih ter-cover oleh agunan dan adanya permintaan perluasan *coverage* yaitu menjamin risiko jiwa untuk nasabah perorangan yang belum dapat dipenuhi dengan alasan regulasi dan Perseroan belum memiliki mitra *co-branding* (Asuransi Jiwa).
- Masuknya beberapa pesaing baru (Asuransi/Penjaminan berskala nasional) khususnya pada mitra Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga dilakukan kebijakan *risk & market sharing*.
- Another factor is that not all financing, especially the productive category, is divided by the bank to Insurance/Kafalah partners on the grounds that it is still covered by collateral and there is a request for coverage expansion, namely guaranteeing life risks for individual customers that cannot be fulfilled for regulatory reasons and the Company does not yet have a co-branding partner (Life Insurance).
- The entry of several new competitors (national-scale insurance/guarantees), especially in Sharia People's Financing Bank (BPRS) partners so that risk & market sharing policies are carried out.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten dan berkelanjutan di dalam Perusahaan. Implementasi GCG merupakan pondasi penting untuk menggapai visi Perusahaan yaitu *"menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah"*.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan PT Jamkrida Jabar mengimplementasikan GCG adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan PT Jamkrida Jabar dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

GCG IMPLEMENTATION COMMITMENT

Good Corporate Governance (GCG) is a system designed to direct professional company management based on transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and equality principles.

PT Jamkrida Jabar (the "Company") has a strong commitment to consistently and continuously implementing GCG within the Company. GCG implementation is an important foundation for achieving the Company's vision: *"to become a Trusted Credit Guarantee Company that Contributes to Regional Economic Growth"*.

PURPOSE OF GCG IMPLEMENTATION

The objectives of PT Jamkrida Jabar in implementing GCG are:

1. As a guideline for the Board of Commissioners and the Board of Sharia Supervisory in carrying out supervision and providing advice to the Board of Directors in managing the Company.
2. As a guideline for the Board of Directors to carry out the Company's daily activities based on high moral values regards to articles of association, business ethics, and applicable laws and regulations.
3. As a guideline for the management and employees of PT Jamkrida Jabar in carrying out their daily activities and duties by GCG principles.

DASAR PENERAPAN GCG

Implementasi GCG di PT Jamkrida Jabar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Yang Baik Provinsi Jawa Barat.

BASE OF GCG IMPLEMENTATION

GCG implementation at PT Jamkrida Jabar refers to applicable laws and regulations such as:

1. Law Number: 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority Regulation Number: 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
3. Circular of the Financial Services Authority Number: 54/SEOJK.05/2017 concerning Reports on Implementing Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.
4. Regulation of the Governor of West Java Number: 105 of 2020 concerning Regulations for implementing Good Governance of Regional Owned Enterprises in West Java Province.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Jamkrida Jabar bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien, serta menumbuhkan nilai bagi pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perseroan telah menanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis Perseroan, hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan, dan perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis penjaminan.

Perseroan telah membangun landasan maupun kerangka acuan untuk menunjang GCG. Hal ini tertuang dalam:

1. Visi dan Misi Perseroan yang memberikan arah dan strategi pengembangan usaha secara jelas.
2. Struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggungjawaban secara jelas menyangkut unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Satuan Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko dan Klaim, serta Sekretaris Perusahaan.

GCG STRUCTURE AND MECHANISM

The application of GCG principles at PT Jamkrida Jabar aims to obtain a good, effective, and efficient result and to grow value for shareholders and stakeholders.

The Company has instilled in the Company's culture and business behavior, reflected in fairness in business transactions, openness, and management behavior in carrying out the guaranteed business.

The Company has built a foundation and framework of reference to support GCG, contained inside:

1. Vision and Mission of the Company provide clear directions and business development strategies.
2. An organizational structure that clearly describes lines of responsibility regarding the main elements of corporate governance implementation encompass the Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Internal Oversight Unit, Risk and Claims Management Division, and the Corporate Secretary.

3. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Penerapan GCG bagi Perseroan tidak hanya keharusan dalam rangka memenuhi regulasi tetapi merupakan elemen fundamental yang mengacu pada *international best practices* untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Penerapan GCG yang komprehensif di beberapa industri dan perusahaan terbukti telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai perusahaan (*value creation*) dan telah memberikan manfaat nyata bagi masing-masing industri dan Perseroan, antara lain meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik investor lokal maupun luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai Jamkrida Jabar untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

3. Supervisory function of the Board of Commissioners.

GCG implementation for the Company is not only a necessity to comply with regulations but a fundamental element that refers to international best practices for healthy and sustainable business continuity in the long term. The implementation of comprehensive GCG in several industries and companies has been proven to have a good contribution to increasing corporate value (value creation) and provided real benefits for each industry and the Company, including increased competitiveness and company performance, and the trust of stakeholders, both local and foreign investors.

To achieve this, of course, a joint commitment from all levels of the Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Board of Directors, and employees of Jamkrida Jabar is needed to implement GCG principles as the basis for carrying out guarantee business activities, which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality.

The Company believes that consistent implementation of GCG principles and practices will provide benefits, both for the Company and its Stakeholders, namely by:

1. Improving management's seriousness in applying the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness, and prudence in managing the Company.
2. Improving the Company's performance, efficiency, management, and services to Stakeholders.
3. Protecting the Company from external intervention and lawsuits
4. Avoid conflicts of interest between the Board of Commissioners, Board of Sharia Supervisory, Directors, Shareholders, and the Company.

PT Jamkrida Jabar menyadari pentingnya GCG dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi para Pemangku Kepentingan. Dalam mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan, perusahaan berusaha menjalankan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait kelangsungan bisnis dan operasional Perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan perusahaan. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler.

PT Jamkrida Jabar realizes the importance of GCG in supporting business growth and providing added value to Stakeholders. In implementing GCG comprehensively and continuously, the company tries to carry out GCG principles and practices based on the applicable laws and regulations.

According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU PT"), a Limited Liability Company has 3 (three) key organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in the Company and holds all authority that is not delegated to the Board of Commissioners and Directors. The GMS is also a forum for shareholders to make important decisions related to the continuity of the Company's business and operations.

Decisions made at the GMS based on the interests of the company. Shareholders do not intervene in the duties, functions and powers of the Board of Commissioners and Board of Directors to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations. Resolutions made at the GMS fairly and transparently.

Throughout 2022, the Company has held 1 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), 1 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), and 1 Circular General Meeting of Shareholders.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 diselenggarakan pada tanggal 03 Juni 2022 bertempat di InterContinental Hotel Dago Pakar Bandung yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
2. Keputusan Agenda Kedua
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
Pemegang Saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Agenda Ketiga
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021.
4. Keputusan Agenda Keempat
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Perubahan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengubah Pajak Penghasilan atas gaji/honorarium dan tunjangan ditanggung oleh Perseroan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2022.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2021 held on June 3, 2022, at the InterContinental Hotel Dago Pakar Bandung decided the following matters:

1. First Agenda Decision
Shareholders approve and ratify the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2021 Fiscal Year..
2. Second Agenda Decision
Shareholders approved and ratified the Company's Annual Report and Financial Statements for the 2021 Fiscal Year audited by Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) Public Accounting Firm with Unqualified Opinion.
Shareholders provide discharge and release of responsibility (*acquitt et de charge*) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the 2021 Fiscal Year, as long as these actions are not criminal acts and do not conflict with the valid laws and regulations.
3. Third Agenda Decision
Shareholders approve and ratify the proposed Use of the Company's Net Profits for the 2021 Fiscal Year.
4. Fourth Agenda Decision
Shareholders approve and ratify the Changes in the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company by changing the Income Tax on salaries/honorarium and benefits borne by the Company as of January 1, 2022.

5. Keputusan Agenda Kelima
Pemegang Saham menyetujui Penggunaan Jasa Akuntan Publik Aryo Wibisono dan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 tersebut dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 28 November 2022 bertempat di Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2023.
2. Keputusan Agenda Kedua
 - a. Pemegang Saham menyetujui Usulan Penetapan Dampak Penerapan PSAK 71-72 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 sebagai Cadangan Umum sebagai Koreksi Audit pada akun Cadangan Umum senilai Rp30.529.670.143,- yang belum ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2021.
 - b. Pemegang Saham menyetujui Usulan mengubah besaran Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021 untuk alokasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menjadi sebesar 5% atau senilai Rp529.258.285,-.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut

5. Fifth Agenda Decision

The Shareholders approved the Use of the Services of Public Accountant Aryo Wibisono and Hertanto, Grace, Karunawan Public Accountant Office for auditing the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2022 will end on December 31, 2022.

The decisions at the Annual General Meeting of Shareholders for the 2021 Fiscal Year stated in Deed No. 11 dated June 3, 2022, made before Notary Yanti Yulianti, S.H., M.Kn.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on November 28, 2022, at the Holiday Inn Pasteur Hotel Bandung, decided the following matters:

1. First Agenda Decision
Shareholders approve and ratify the Supervisory Report of the Company's Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year.
2. Second Agenda Decision
 - a. Shareholders approve the Proposed Determination of the Impact of the Application of PSAK 71-72 on the 2020 Financial Statements as a General Reserve as an Audit Correction on the General Reserve account in the amount of IDR 30,529,670,143,- which has not determined at the 2021 General Meeting of Shareholders.
 - b. Shareholders agreed to the proposal to change the amount of use of net profit for the 2021 fiscal year for the allocation of social and environmental responsibility to 5% or a value of IDR 529,258,285.-.

The decisions at the Extraordinary General Meeting of Shareholders are stated in Deed No.

dituangkan dalam Akta No. 23 tanggal 28 November 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn.

23 dated November 28, 2022, made before Notary Yanti Yulianti, S.H., M.Kn.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SIRKULER

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn. tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Sirkuler) sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan Yanti Rachmawati selaku Direktur Keuangan Perseroan.
- b. Pemegang Saham memutuskan dan menyetujui atas Pengangkatan dan Penetapan Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak dinyatakan lulus dari uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 22 Februari 2027 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Sehingga selanjutnya susunan pengurus Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS CIRCULAR

Based on Deed No. 11 April 5, 2022, made before Notary Yanti Yulianti, S.H., M.Kn. regarding the Statement of Resolutions of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of the Company (Circular) as follows:

- a. The Shareholders decided and agreed to dismiss Yanti Rachmawati as the Company's Director of Finance.
- b. The Shareholders decide and approve the Appointment and Appointment of Yanti Rachmawati as the Main Director of the Company with a term of 5 (five) years from the time she passed the fit and proper test conducted by the Financial Services Authority until February 22, 2027, without prejudice to the rights of the General Meeting Shareholders to stop it at any time. So that the subsequent composition of the Company's management is as follows:

No. No.	Jabatan Position	Nama Name
1	Komisaris Utama President Commissioner	Muhammad Taufiq Budi Santoso
2	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dini Rosdini
3	Direktur Utama President Director	Yanti Rachmawati
4	Direktur Operasional Operational Director	Agus Subrata

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.
- c. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- g. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional lembaga keuangan.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is a company organ that is fully responsible for managing the company for the interests and objectives of the company by the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors has collective duties and responsibilities in managing the company.

All members of the Company's Board of Directors have met the following criteria:

- a. The assignment of members of the Board of Directors is by the GMS.
- b. Has complied with the fit & proper test provisions from the Financial Services Authority, the Limited Liability Company Law, and related GCG provisions and has obtained approval from the Financial Services Authority and Shareholders.
- c. All members of the Board of Directors have adequate integrity, competence, and financial reputation.
- d. Members of the Board of Directors do not take and receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS.
- e. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia.
- f. All members of the Board of Directors are Indonesian citizens.
- g. All members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in financial institution operations.

KOMPOSISI DIREKSI**COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Keputusan <i>Pass Date and Fit & Proper Test Results</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) <i>Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)</i>	Kewarga- negara Citizenship	Domisili Domicile
1	Yanti Rachmawati	Direktur Utama President Director	22-02-2022 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 952/NB.11/2022 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 952/NB.11/2022	Akta No. 11 tanggal 05-04-2022 Masa Jabatan 5 tahun s.d. 22-02-2027 Deed No. 11 date 05-04-2022 Term of Office 5 years until 22-02-2027	Indonesia	Indonesia
2	Agus Subrata	Direktur Operasional Operational Director	08-07-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.: KEP- 432/NB.11/2021 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP- 432/NB.11/2021	Akta No. 74 tanggal 13-09-2021 Masa Jabatan 5 tahun s.d. 31-08-2026 Deed No. 74 date 13-09-2021 Term of Office 5 years until 31-08-2026	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan Direksi.

During 2022 there was no change in the composition of the Board of Directors.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The Board of Directors is the organ of the Company that is responsible for managing the Company. The Board of Directors must, in good faith and full responsibility for the interests of the Company, manage the business and affairs of the Company while taking into account the balance of interests of all parties with an interest in the Company's activities. The Board of

Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas pokok Direksi adalah :
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan;
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau

Directors acts carefully, prudently, and by considering various important aspects that are relevant in carrying out their duties. The Board of Directors uses the authority they have for the benefit of the Company only.

The Board of Directors has the following duties and authorities:

1. The main duties of the Board of Directors are:
 - a) Lead and manage the Company by the aims and objectives of the Company and always strive to improve the efficiency and effectiveness of the Company;
 - b) Mastering, maintaining, and managing the Company's assets.
2. The Board of Directors is fully responsible for carrying out their duties for company interests in achieving its aims and objectives.
3. Each member of the Board of Directors must have good intention and full responsibility to carry out their duties for the interests and business of the Company by observing the applicable laws and regulations
4. In carrying out their duties, the actions of the Board of Directors below must inform or obtain written approval from the Board of Commissioners, namely:
 - a. Every change in the participation of the Company's shares in other companies in the form of transfer of shares, reduction of shares, or increase of shares. The Board of Directors must obtain the approval of the Main Commissioner and a member of the Board of Commissioners. Or if the Main Commissioner is absent, then the Board of Directors action must obtain approval from 2 (two) members of the Company's Commissioners.
 - b. Legal actions to transfer, relinquish rights or make debt guarantees for all or part of the Company's assets in 1 (one) financial year, either in one transaction or several transactions

- beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
- c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
 5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggungjawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

that are independent or related or related to each other, must obtain the approval of the GMS attended or represented by the shareholders. Shareholders who own at least $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total number of shares with valid voting rights and decisions approved by at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total number of votes legally cast at the Meeting.

- c. Legal actions to transfer or make as collateral for a debt or release the rights to the Company's assets above, must also be announced in 2 (two) daily newspapers in the Indonesian language circulating at the domicile of the Company no later than 30 (thirty) days from the date the act has committed the law.
5. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company provided that all actions of the President Director are approved at the Board of Directors Meeting. If the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party, then another member of the Board of Directors has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
6. The Board of Directors for certain actions on their responsibility, also has the right to appoint one or more representatives or proxies, by giving him or them the power for certain actions as stipulated in the Power of Attorney.

The division of duties and authorities for each member of the Board of Directors is determined by the GMS and this authority can be delegated by the GMS to the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa "Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan".

Selama tahun 2022, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Yanti Rachmawati	22	3	93%
2	Agus Subrata	20	3	85%

Frequency of Board of Directors Meetings held in 1 (one) year

By POJK No.3/POJK.05/2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 17 that "The Board of Directors of Guarantee Institutions required to hold regular meetings of the Board of Directors at least 1 (one) time in 1 (one) month".

During 2022, the Board of Directors has held 27 (twenty-seven) meetings with the following attendance:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan RUPS.
- Telah memenuhi ketentuan uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a company organ that has collective duties and responsibilities for supervising and providing direction to the Board of Directors and ensuring that the company implements GCG at all levels or levels of the organization.

All members of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar have met the following criteria:

- The assignment of members of the Board of Commissioners is carried out by the GMS.
- Has complied with the fit and proper test provisions from the Financial Services Authority, the Limited Liability Company Law, and related GCG provisions, and has obtained approval from the Financial Services Authority.
- All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence, and financial reputation.

- d. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

- d. All members of the Board of Commissioners do not take and or receive personal benefits from the Company other than remuneration and other facilities determined by the GMS.
- e. All members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia.
- f. All members of the Board of Commissioners are Indonesian citizens.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Keputusan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarganegaraan Citizenship	Domisili Domicile
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Komisaris Utama President Commissioner	03-12-2021 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No.: KEP-801/NB.11/2021 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-801/NB.11/2021	Akta No. 07 tanggal 21-12-2021 Masa Jabatan 4 tahun Deed No. 07 date 21-12-2021 Term of Office 4 years	Indonesia	Indonesia
2	Dini Rosdini	Komisaris Independen Independent Commissioner	17-09-2019 Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No.: KEP-532/NB.11/2019 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-532/NB.11/2019	Akta No. 39 Tanggal 26-11-2019 Masa Jabatan 4 Tahun Deed No. 39 date 13-09-2021 Term of Office 4 years	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris.

During 2022 there was no change in the composition of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, *culture* dan *value* dari Perseroan.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The duties of the Board of Commissioners are:

1. Supervise the Company's management policies carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors including the Company's development plan, the Company's work plan and annual budget, implementation of the provisions of the Articles of Association and GMS decisions as well as the applicable laws and regulations.
2. Carry out duties, authorities, and responsibilities in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, GMS Decision,s and applicable laws and regulations.
3. Carry out the interests of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and being responsible to the GMS.
4. Research and review the Quarterly, Semester and Annual Reports prepared by the Board of Directors and sign the report. If the Commissioner refuses to sign the report, then the refusal and the reasons must be stated in writing.
5. Following the development of the Company's activities.
6. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues considered important for the management of the Company.
7. Report immediately to the GMS if there are signs of a decline in the Company's performance.

For the supervisory and advisory functions as referred to above to be carried out effectively, the Board of Commissioners also has the following duties:

1. Provide opinions and advice to management regarding the determination

2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan *Business Plan* dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

of the vision, mission, culture, and values of the Company.

2. Conduct studies and provide opinions on business strategies that need to be implemented by the Company.
3. Conducting assessments, and providing opinions and advice on human resource management systems.
4. Conduct assessments, and provide opinions and advice on risk control systems.
5. Conduct an assessment and provide opinions and advice on the Draft Business Plan and its elaboration in the Annual Work Plan and Budget.
6. Provide approval for strategic business decisions which according to laws and regulations and GMS decisions must be approved by the Board of Commissioners.
7. Provide an assessment of the reports of internal and external auditors and provide advice to management on matters that need to be followed up.
8. Approve the Business Plan (RKAP) submitted by the Directors of the Company after conducting inspections and discussions with the Directors.
9. Periodically supervise the implementation of the Business Plan and provide opinion/approval on changes to the Business Plan by applicable regulations.
10. Submit monitoring reports to Shareholders.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners divides tasks among each member of the Board of Commissioners to specifically supervise certain areas, which are set forth both in the Board of Commissioners Decree and in the resolutions of the Board of Commissioners Coordination Meeting.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa "Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan".

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

The frequency of the Board of Commissioners' meetings held in 1 (one) year

By POJK No.3/POJK.05/2017, concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 31 that "The Board of Commissioners of Guarantee Institutions required to hold a Board of Commissioners meeting at least 1 (one) time in 3 (three) months".

During 2022, the Board of Commissioners has held 27 (twenty-seven) meetings with the following attendance:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	21	3	89%
2	Dini Rosdini	24	3	100%

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memegang peranan penting bagi Perseroan sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISORY

The Board of Sharia Supervisory is an independent body recommended by the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and plays an important role for the Company as a supervisor for the application of Sharia principles in every operational activity of the Sharia Business Unit.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH**COMPOSITION OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISORY**

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Lulus dan Hasil Uji Kemampuan & Kepatutan Pass Date and Fit & Proper Test Results	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun) Date Assignment by the GMS and Term of Office (years)	Kewarga- negara Citizenship	Domisili Domicile
1	Zaini Abdul Malik	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chair of The Board of Sharia Supervisory	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-488/ NB.1/2015 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-488/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014 Deed No. 38 date 28-11-2014	Indonesia	Indonesia
2	Khozin Abu Faqih	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of The Board of Sharia Supervisory	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.: KEP-488/ NB.1/2015 Copy of Decree of OJK Board of Commissioners Members No.: KEP-488/ NB.1/2015	Akta No. 38 tanggal 28-11-2014 Deed No. 38 date 28-11-2014	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2022 tidak terdapat perubahan susunan DPS.

During 2022 there were no changes to the composition of the Board of Sharia Supervisory.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:

1. Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Duties and Responsibilities of the Board of Sharia Supervisory

Duties and authorities of the Board of Sharia Supervisory:

1. The Board of Sharia Supervisory has the duty and authority to provide advice and suggestions to the Board of Directors, supervise the Sharia aspects of the operational activities of the Company's Sharia Business Unit, as well as act as a representative of the Company's Sharia

2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b. Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan;
 - c. Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan.
3. Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Business Unit at the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

2. The implementation of supervisory duties and providing advice and suggestions carried out by the Board of Sharia Supervisory as referred to above is carried out on:
 - a. Sharia Guarantee Activities;
 - b. Sharia Guarantee Contract marketed by the Company's Sharia Business Unit;
 - c. Sharia Guarantee marketing practice carried out by the Company's Sharia Business Unit.
3. The Board of Sharia Supervisory is entitled to obtain complete and timely information from the Board of Directors regarding the Company's Sharia Business Units.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

If the Board of Sharia Supervisory assesses that there are policies or actions of members of the Board of Directors related to the matters referred to in paragraph 2 that are not by Sharia Principles, the Board of Sharia Supervisory is obliged to ask for an explanation from members of the Board of Directors regarding policies or actions of members of the Board of Directors that are not by the Principles Sharia.

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa "DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun". Selama tahun 2022 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 5 (lima) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut :

Frequency of meeting of the Board of Sharia Supervisory held in 1 (one) year

By POJK No.3/POJK.05/2017, regarding Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, article 40 that "BSS is required to hold BSS meetings at least 4 (four) times in 1 (one) year". During 2022, 5 (five) BSS meetings were held, with the following attendance:

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Zaini Abdul Malik	5	-	100%
2	Khozin Abu Faqih	5	-	100%

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 Tentang Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Dewan Komisaris disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

1. Komite Audit

- a. PT Jamkrida Jabar sebagai Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional wajib membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor: 3/POJK.05/2017/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 29 ayat (1).
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0001/DEKOM/JJ/I/2020 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Audit, membentuk Komite Audit PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:
 - 1) Dini Rosdini (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit.
 - 2) Prima Yusi Sari sebagai Anggota Komite Audit.

dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Baik Ketua maupun Anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang akuntansi.

COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMPANY COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number: KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 concerning Company Committees Under the Board of Commissioners, Article 2 Components of Company Committees under the Board of Commissioners states that:

The Company's Committees under the Board of Commissioners consist of:

1. Audit Committee;
2. Nomination and Remuneration Committee; and
3. Risk Monitoring and Corporate Governance Committee.

1. Audit Committee

- a. PT Jamkrida Jabar as a Guarantee Institution that has a national operational area is required to form an Audit Committee as stated in POJK Number: 3/POJK.05/2017/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions Article 29 paragraph (1).
- b. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number: KEP-0001/DEKOM/JJ/I/2020 concerning the Establishment and Appointment of the Audit Committee, form the Audit Committee of PT Jamkrida Jabar and appoint:
 - 1) Dini Rosdini (Independent Commissioner) as Chair of the Audit Committee.
 - 2) Prima Yusi Sari as a Member of the Audit Committee.

Each term of office commences from January 6, 2020, to December 31, 2023.

Both the Chairman and Members of the Audit Committee have expertise in accounting.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- 1) Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
- 2) Memberikan usulan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa pelaksanaan audit;
- 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;
- 4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan

c. Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee acts independently in carrying out its duties and responsibilities.

In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities that include at least:

- 1) Assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of the internal control system and implementation of the duties of the internal auditors and external auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits to assess the adequacy of internal controls include the financial reporting process;
- 2) Provide suggestions for prospective external auditors to the Board of Commissioners to be appointed and determined by the General Meeting of Shareholders, based on independence, the scope of the assignment, and audit fees;
- 3) Reviewing the financial information that will be released by the Company to the public and or authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information;
- 4) Conduct a review of compliance with laws and regulations;
- 5) Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the external auditor regarding the services provided;
- 6) Reviewing the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a

- manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
 - 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- risk monitoring function under the Board of Commissioners;
- 7) Examine complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes;
 - 8) Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;
 - 9) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

d. Frequency of Audit Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Dini Rosdini	3	7	100%
2	Prima Yusi Sari	3	7	100%

e. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

e. Audit Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Mengulas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal (SPI) 2022 Reviewing the Annual Supervisory Work Program (PKPT) of the Internal Supervisory Unit (SPI)	Terlaksana Done
2	Pemantauan PKPT SPI Triwulanan Quarterly SPI PKPT Monitoring	Terlaksana Done
3	Mengulas Kinerja Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan Reviewing Monthly, Quarterly, Semester, and Annual Financial Performance	Terlaksana Done
4	Penyusunan Program Kerja Komite Audit 2023 Compilation of the 2023 Audit Committee Work Program	Terlaksana Done

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
5	Pemantauan Proses Audit Eksternal External Audit Process Monitoring	Terlaksana Done
6	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Laporan Keuangan 2021 Follow-up Monitoring of Public Accounting Firm (KAP) Audit Findings on the 2021 Financial Report	Terlaksana Done
7	Pembahasan Hasil Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021 oleh KAP Discussion of the Audit Results of the Company's 2021 Financial Statements by KAP	Terlaksana Done
8	Mengulas RKAP 2023 Reviewing the 2023 Business Plan	Terlaksana Done
9	Mengulas Board Manual Reviewing the Board Manual	Terlaksana Done
11	Mengevaluasi Kinerja KAP dan Memberikan Rekomendasi Pengajuan KAP untuk Audit Laporan Keuangan 2022 Evaluating KAP Performance and Providing KAP Submission Recommendations for the 2022 Financial Report Audit	Terlaksana Done
12	Mengulas Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2022 Reviewing the 2022 Financial Report Prognosis	Terlaksana Done
13	Mengulas Rencana Bisnis Perusahaan Reviewing the Company's Business Plan	Terlaksana Done
14	Melakukan Penilaian Tata Kelola Perusahaan Conduct Corporate Governance/CG Assessment	Terlaksana Done
15	Sesi Berbagi dan Diskusi dengan OJK dan Jamkrida lain Sharing and Discussion with OJK and other Jamkrida	Terlaksana Done

PROFIL KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE PROFILE

DINI ROSDINI

Ketua Komite Audit
Chair of the Audit Committee



PRIMA YUSI SARI

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Palembang, 24 Agustus 1975.

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Palembang, on August 24, 1975.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S2 Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000.
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1998.

PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Master of Management Science at the University of Indonesia in 2000.
- Bachelor of Accounting at Padjadjaran University in 1998.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Audit Committee of PT Jamkrida Jabar from January 6, 2020, to December 31, 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (1999-sekarang).
- Anggota Komite Audit PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013-2020).
- Anggota Komite Audit PT BUMN Hijau Lestari I (2015-2016).

EMPLOYMENT HISTORY

- Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (1999-present).
- Member of the Audit Committee of PT Dirgantara Indonesia (Persero) (2013-2020).
- Member of the Audit Committee of PT BUMN Hijau Lestari I (2015-2016).

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Selain Komite Audit, Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/2021 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:
 - 1) Dini Rosdini (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 2) Wa Ode Zusnita Muizu sebagai Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 3) Muji Rohmad sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang akuntansi.

Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki keahlian di bidang ilmu manajemen.

- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

2. Nomination and Remuneration Committee

- a. Apart from the Audit Committee, the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar may form other committees to support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.
- b. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number:KEP-0010/DEKOM/JJ/VIII/ 2021 concerning the Establishment and Appointment of the Nomination and Remuneration Committee, form the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar and appoint:
 - 1) Dini Rosdini (Independent Commissioner) as Chair of the Nomination and Remuneration Committee.
 - 2) Wa Ode Zusnita Muizu as Independent Member of the Nomination and Remuneration Committee.
 - 3) Muji Rohmad as Member of the Nomination and Remuneration Committee.

with their respective terms of office starting from August, 02, 2020, to December, 31, 2023.

The Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee have expertise in accounting.

Independent members of the Nomination and Remuneration Committee have expertise in management.

- c. Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

In carrying out its functions, the Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities that include at least:

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - d) Struktur remunerasi;
 - e) Kebijakan atas remunerasi;
 - f) Besaran atas remunerasi.
- 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
- 5) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- 1) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a) Position composition of members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, and or BSS;
 - b) Policies and criteria required in the Nomination process;
 - c) Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and or members of the Board of Commissioners, and or BSS;
 - d) Remuneration structure;
 - e) Policy on remuneration;
 - f) Amount of remuneration.
- 2) Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or Board of Sharia Supervisory based on benchmarks that have been prepared as evaluation material;
- 3) Assist the Board of Commissioners in assessing target achievement and performance according to the remuneration received by each member of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS;
- 4) Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity-building programs for members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS;

- 5) Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS to submit to the GMS;
- 6) Evaluate the structure, policies, and amount of remuneration at least 1 (once) time in 1 (one) year.

d. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

d. Frequency of Nomination and Remuneration Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Dini Rosdini	0	7	100%
2	Wa Ode Zusnita Muizu	0	7	100%
3	Muji Rohmad	0	7	100%

e. Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Realisasiny

e. Nomination and Remuneration Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Penyusunan Kajian Remunerasi Pengurus Compilation of Management Remuneration Review	Terlaksana Done
2	Penyusunan Kajian Remunerasi Anggota Komite Compilation of Committee Member Remuneration Review	Terlaksana Done
3	Penyusunan Kajian Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris Compilation of the Remuneration Review of the Secretary to the Board of Commissioners	Terlaksana Done
4	Penyusunan Kajian Tantiem 2021 Compilation of 2021 Management Bonus Review	Terlaksana Done
5	Mengulas Usulan SOTK dari Manajemen Reviewing Proposed Organizational Structure and Company Work Procedures from Management	Terlaksana Done
6	Melakukan Review atas Prosedur Operasi Standar (SOP) Perusahaan Reviewing the Company's Standard Operating Procedures (SOP)	Terlaksana Done

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
7	Penyusunan Tanggapan atas Pencairan Uang Cuti Direktur Periode Tahun 2020 – 2021 Prepare Responses to Disbursement of Director's Leave Money for the 2020 – 2021 Period	Terlaksana Done
8	Mengulas Kinerja SDM dan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Review HR Performance and Monthly, Quarterly, Semester and Annually	Terlaksana Done
9	Penyusunan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Tahun 2023 Compilation of the Nomination and Remuneration Committee Work Program for 2023	Terlaksana Done

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PROFILE OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

DINI ROSDINI

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chair of the Nomination and Remuneration Committee



PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

- S2 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2004.
- S1 Manajemen di Universitas Halu Oleo tahun 2000.

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Doctoral Degree in Management at Padjadjaran University in 2008.
- Master of Management at Padjadjaran University in 2004.
- S1 Management at Halu Oleo University in 2000.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar from August 2, 2020, to December 31, 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (s.d. sekarang).

EMPLOYMENT HISTORY

Permanent Lecturer at the Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (until now).

WA ODE ZUSNITA MUIZU

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Kendari, 14 Oktober 1977

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Kendari, October 14, 1977

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2008.



MUJI ROHMAD

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
Lahir di Bantul, 15 Agustus 1970

PLACE AND DATE OF BIRTH
Born in Bantul, August 15, 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN
D4 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1998.

EDUCATIONAL BACKGROUND

D4 Accounting at the State College of Accountancy (STAN) in 1998.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan 31 Desember 2023.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as a Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar from August 2, 2020, to December 31, 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kepala Divisi Keuangan dan Umum PT Jamkrida Jabar (2018-sekarang).
- Manajer Umum Keuangan PT Lintas Media Telekomunikasi (2014-2018).
- Kepala Divisi Keuangan, Akunting, & Perpajakan Bosowa Resources Group, PT Bosowa Resources, PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara (2010-2013).
- HMD Consulting (2010).
- Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (2000-2009).

EMPLOYMENT HISTORY

- Head of Finance and General Affairs Division of PT Jamkrida Jabar (2018-present).
- Finance General Manager of PT Lintas Media Telekomunikasi (2014-2018).
- Head of Finance, Accounting & Taxation Division Bosowa Resources Group, PT Bosowa Resources, PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara (2010-2013).
- HMD Consulting (2010).
- Auditor at BPKP Representative Office of South Sulawesi Province (2000-2009)

3. Komite Pemantau Risiko

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar Nomor: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, membentuk Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar dan mengangkat:

- 1) Muhammad Taufiq Budi Santoso (Komisaris Utama) sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
- 2) Subarman Basarah sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2026.

- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan;
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
- 3) Membantu Dewan Komisaris dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholders* dan pegawai Perseroan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha perusahaan;
- 4) Mendukung terwujudnya budaya Perusahaan yang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan;

3. Risk Monitoring Committee

- a. Based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jamkrida Jabar Number: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/ 2022 dated March 1 2022 concerning the Formation and Appointment of the Risk Monitoring Committee, formed the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar and appointed:

- 1) Muhammad Taufiq Budi Santoso (President Commissioner) as Chair of the Risk Monitoring Committee.
- 2) Subarman Basarah as Member of the Risk Monitoring Committee.

each term of office commencing from 01 March 2022 to 01 March 2026.

- b. Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities

- 1) Evaluate the conformity between risk management policies and the implementation of Company policies;
- 2) Monitor and evaluate the implementation of the duties of the risk management committee and the risk management work unit;
- 3) Assisting the Board of Commissioners in creating a conducive working climate and becoming a means for stakeholders and employees of the Company to report matters that can cause corporate losses, both financial and non-financial, which can damage the image and sustainability of the company's business;
- 4) Supporting the realization of a corporate culture based on the principles of transparency,

- 5) Menerima laporan/pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar. Kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Perseroan;
 - 6) Melakukan penelaahan lebih lanjut atas informasi dan laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 - 7) Memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*) antara lain jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor, isi laporan, perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, pemutusan hubungan kerja, penurunan jabatan, pelecehan, diskriminasi, catatan yang merugikan, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya;
 - 8) Memberikan informasi perkembangan pelaporan tindakan pelanggaran hanya kepada Dewan Komisaris/Direksi dan kepada pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari pelapor yang bersangkutan;
 - 9) Memberikan keputusan tindak lanjut laporan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan;
 - 10) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait dalam rangka perbaikan system dan proses kerja disertai dengan dokumen-dokumen pendukung;
- accountability, responsibility, independence and fairness;
- 5) Receiving reports/complaints/ providing information submitted either directly or indirectly in connection with alleged acts that violate laws, regulations/ standards. Code of ethics, and policies, as well as other similar actions in the form of direct threats to the public interest, as well as Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) that occur within the Company;
 - 6) Conduct a further review of the information and reports of alleged violations received;
 - 7) Protecting the whistleblower, including guarantees for the confidentiality of the complainant's identity, report contents, protection against the possibility of threats, intimidation, punishment, termination of employment, demotion, harassment, discrimination, adverse records, or unpleasant actions other;
 - 8) Provide information on the progress of reporting violations only to the Board of Commissioners/Directors and the reporter accompanied by a written request from the reporter concerned;
 - 9) Provide decisions on follow-up reports based on sufficient and reliable evidence;
 - 10) Provide recommendations to related work units to improve systems and work processes accompanied by supporting documents;
 - 11) Reporting the implementation of monitoring the implementation and enforcement of GCG to the

- 11) Melakukan pelaporan penyelenggaraan pemantauan penerapan dan penegakan GCG kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
- 12) Melakukan evaluasi atas efektifitas pedoman whistleblowing system dan penerapannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
- 13) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- 14) Menjaga kerahasiaan dokumen, data informasi Perusahaan.

- Board of Commissioners and Directors;
- 12) Evaluate the effectiveness of the whistleblowing system guidelines and their application to the Board of Commissioners and Directors
 - 13) Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding the potential conflict of interest of the Company;
 - 14) Maintain the confidentiality of documents, Company information data.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

c. Frequency of Risk Monitoring Committee Meetings

No. No.	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance		% Kehadiran Attendance
		Luring Offline	Daring Online	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	0	7	100%
2	Subarman Basarah	0	7	100%

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

d. Risk Monitoring Committee Work Program and Its Realization

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Pembuatan Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Compilation of Risk Monitoring Committee Work Rules Guidelines	Terlaksana Done
2	Melakukan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Penjaminan Evaluating the Company's Cooperation Agreements in Credit Guarantee	Terlaksana Done
3	Melakukan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan Evaluating Monthly, Quarterly, Semester and Annual Financial and Non-Financial Performance	Terlaksana Done
4	Melakukan Evaluasi SOP Penjaminan/Klaim/Regaransi/Investasi Evaluating the Standard Operating Procedures of Credit Guarantee/Claim/Re-Insurance/Investment	Terlaksana Done
5	Melakukan Evaluasi Profil Risiko per Skim Kredit per Mitra Bisnis secara Triwulanan Evaluating Risk Profile of Credit Schemes on a Quarterly Basis	Terlaksana Done

No. No.	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
6	Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko untuk Tahun 2023 Compilation of the Risk Monitoring Committee Work Program for 2023	Terlaksana Done
7	Sesi Berbagi dan Diskusi dengan OJK dan Jamkrida lain Sharing Session and Discussion with OJK and other Jamkrida	Terlaksana Done

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO PROFILE OF RISK MONITORING COMMITTEE

MUHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Ketua Komite Pemantau Risiko
Chair of the Risk Monitoring Committee



PROFIL

Profil dapat dilihat pada Bagian Dewan Komisaris

PROFILE

Profile can be seen in the Board of Commissioners Section

EDUCATIONAL BACKGROUND

- Diploma Program in Oracle8i DBA and Software Analyst at Princeton Information Technology Center, Glenside, Pennsylvania, USA in 2003.
- Bachelor of Science in Environmental Engineering at Institut Teknologi Bandung, in 1994.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2026.

APPOINTMENT HISTORY

Appointed and assigned as Member of the Nomination and Remuneration Committee of PT Jamkrida Jabar from March 1, 2022 to March 1, 2026.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Maret 2022-sekarang).
- Direktur Marketing dan Pengembangan Usaha PT Abhirama Kresna – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- Direktur PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- General Manager PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda (Mar 2013 – Sep 2017).
- Staf Ahli Direksi PT Arkon Prima Indonesia (Mar 2013 – Feb 2014).

EMPLOYMENT HISTORY

- Member of the Risk Monitoring Committee of PT Jamkrida Jabar (March 2022-present).

SUBARMAN BASARAH

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of the Risk Monitoring Committee

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Lahir di Surabaya, 25 Juni 1970

PLACE AND DATE OF BIRTH

Born in Surabaya, on June 25, 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Program Diploma Oracle8i DBA dan Software Analyst di Pusat Teknologi Informasi Princeton, Glenside, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2003.
- S1 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung tahun 1994.
- Director of Marketing and Business Development of PT Abhirama Kresna – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- Director of PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo (Jul 2018 – Jan 2022).
- General Manager of PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda (Mar 2013 – Sep 2017).
- Expert Staff to the Board of Directors of PT Arkon Prima Indonesia (Mar 2013 – Feb 2014).

4. Kewenangan Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, dan informasi tentang pegawai, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Divisi yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS.
- d. Apabila diperlukan, Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- e. Apabila diperlukan, Komite dapat membentuk tim yang bersifat *ad-hoc* dengan kriteria dan periode pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.

4. Authority of the Company's Committees Under the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Company's Committees Under the Board of Commissioners have the following powers:

- a. Access all documents, records, and information about employees, funds, assets, and resources of the Company related to the implementation of their duties and functions.
- b. Communicating directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, BSS, Division that manages Human Resources (HR), employees, and other related parties.
- c. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors and or Board of Commissioners and or BSS.
- d. If necessary, the Committee may involve experts and or consultants/independent parties needed to assist in carrying out their duties, by obtaining written approval from the Board of Commissioners.
- e. If necessary, the Committee may form an *ad-hoc* team with the criteria and implementation period adjusted to the needs and type of work.

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan Di Bawah Direksi, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Direksi disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Direksi terdiri atas:

1. Komite Investasi;
2. Komite Penjaminan;
3. Komite Klaim; dan
4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan.

1. Komite Investasi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direktur Utama untuk nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Keuangan dan Umum; dan
 - c. Kepala Divisi dan/atau Kepala Bagian yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.

2. Komite Penjaminan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Penjaminan dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) serta Sertifikat Penjaminan berikut perubahannya, serta Keputusan Direksi Nomor: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 tentang Wewenang Memutuskan Kafalah dan Menandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kafalah (SP2K) serta Sertifikat Kafalah berikut perubahannya.

COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF COMPANY COMMITTEES UNDER THE DIRECTORS

Based on the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 concerning Company Committees Under the Board of Directors, Article 2 Components of Company Committees Under the Board of Directors states that:

The Company's Committees under the Board of Directors consist of:

1. Investment Committee;
2. Guarantee Committee;
3. Claims Committee; And
4. Employee Nomination and Remuneration Committee.

1. The Investment Committee consists of at least 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairperson doubles as a member, who is the Director of Finance, as well as other members who may come from:
 - a. President Director for an investment value of more than IDR 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah);
 - b. Division Heads and/or Section Heads in charge of Finance and General Affairs functions; And
 - c. Head of Division and/or Head of Section in charge of the Risk Management function.

2. The Guarantee Committee consists of at least 3 (three) members, with membership requirements as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0012/DIR/JJ/VII/2017 concerning Authority to Decide Guarantees and Sign Guarantee Principle Approval Letters (SP3) as well as Guarantee Certificates and their amendments, as well as Directors Decree Number: KEP-0013/DIR/JJ/VII/2017 concerning Authority to Decide on Kafalah and Sign Kafalah Principle Approval Letters (SP2K) as well as Kafalah Certificates and their amendments.

3. Komite Klaim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan anggota sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 tentang Wewenang Memutuskan dan Menandatangani Keputusan Klaim Kredit, yaitu:
 - a. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan:
 - 1) Sampai dengan jumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk semua jenis kredit, termasuk kredit pola potong gaji, baik kredit pola potong gaji secara langsung maupun melalui Kopkar/Koppeg yang disalurkan oleh Penerima Jaminan (Bank maupun Non Bank).
 - 2) Sampai dengan jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kredit konstruksi/pengadaan barang.

Komite Klaim diketuai oleh Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim dengan beranggotakan Kepala Divisi Penjaminan dan Kepala Divisi Keuangan & Umum.

- b. Bahwa permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim sebagaimana disebutkan pada poin a sampai dengan jumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Komite Klaim diketuai oleh Direktur Keuangan, dengan beranggotakan Direktur Operasional, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta Kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.
 - c. Bahwa Permohonan klaim kredit untuk setiap Terjamin dengan jumlah pengajuan klaim di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan masalah khusus lainnya yang memerlukan keputusan bersama Direksi, maka Komite Klaim

3. The Claims Committee consists of at least 3 (three) members, with the provisions of members as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0006/DIR/JJ/II/2016 concerning Authority to Decide and Sign Credit Claims Decisions, namely:
 - a. That the application for a credit claim for each Guaranteed with the number of submissions:
 - 1) Up to an amount of IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiahs) for all types of credit, including salary deduction credit, both direct salary deduction credit and through Kopkar/Koppeg disbursed by Collateral Recipients (Banks and Non-Banks)).
 - 2) Up to an amount of IDR 100,000,000.00 (one hundred million rupiahs) for construction/procurement loans.

The Claims Committee is chaired by the Head of the Risk & Claims Management Division and consists of the Head of the Guarantee Division and the Head of the Finance & General Affairs Division.

- b. Whereas the application for a credit claim for each Guaranteed with the number of claims submitted as mentioned in point up to an amount of IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs), the Claims Committee is chaired by the Director of Finance, with members consisting of the Director of Operations, Head of Guarantee Division, Head Finance & General Affairs Division, as well as Head of Risk & Claim Management Division.
 - c. Whereas the application for credit claims for each Guaranteed with a total claim submission of more than IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiahs) and other special issues that require a joint decision of

diketuai oleh Direktur Utama, dengan beranggotakan Direksi secara lengkap, Kepala Divisi Penjaminan, Kepala Divisi Keuangan & Umum, serta kepala Divisi Manajemen Risiko & Klaim.

4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Direksi;
 - b. Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.

5. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab Komite di bawah Direksi

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
 - 2) Menelaah dan memberikan saran kepala Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 3) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

the Board of Directors, the Claims Committee is chaired by the Main Director, with full members of the Board of Directors, Head Guarantee Division, Head of Finance & General Affairs Division, and head of Risk & Claim Management Division.

4. The Employee Nomination and Remuneration Committee consists of at least 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairperson also serves as a member, who is the Director of Finance, and other members may come from:
 - a. Directors;
 - b. Head of Division or Head of Section and or Staff in charge of the Human Resources (HR) management function;
 - c. Head of Division or Head of Section who represents each Division in the Company.

5. Work programs related to the duties and responsibilities of the Committees under the Board of Directors

Based on the Decree of the Board of Directors Number: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 concerning Company Committees under the Board of Directors, the duties and responsibilities of other committees are as follows:

- a. The duties and responsibilities of the Investment Committee include:
 - 1) Assisting the Board of Directors in formulating investment policies and supervising the implementation of the investment policies that have been set;
 - 2) Review and provide advice to the head of the Board of Directors regarding potential conflicts of interest in the Company;
 - 3) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.

- | | |
|--|--|
| <p>b. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan; 2) Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan; 3) Memberikan keputusan penjaminan; 4) Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur; 5) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. | <p>b. The duties and responsibilities of the Guarantee Committee include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Assisting the Board of Directors in formulating guarantee operational policies, supervising and implementing established guarantee operational policies; 2) Conduct feasibility analysis and risk management of each application for guarantee; 3) Provide guarantee decisions; 4) Sign SP3 and SP on behalf of the Guaranteed/Debtor; 5) Review and provide advice to the Board of Directors regarding potential conflicts of interest in the Company; 6) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information. |
| <p>c. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan; 2) Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim; 3) Memberikan keputusan klaim; 4) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan; 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan. | <p>c. The Claims Committee's duties and responsibilities include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Assisting the Board of Directors in formulating claim policies and supervising the implementation of established claim policies; 2) Perform feasibility analysis and risk management of each claim submission; 3) Provide a claim decision; 4) Review and provide advice to the Board of Directors regarding the potential conflict of interest of the Company; 5) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information. |
| <p>d. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a) Nominasi promosi, mutasi, demosi bagi Karyawan; | <p>d. The duties and responsibilities of the Employee Nomination and Remuneration Committee include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Provide recommendations to the Board of Directors regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Promotion nominations, transfers, and demotions for employees; |

- b) Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau *variable*;
 - c) Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
 - d) Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
- 2) Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- b) Remuneration structure for Employees which includes salaries, incentives, and or fixed and or variable benefits;
 - c) Policy on remuneration for employees;
 - d) Amount of remuneration for employees.
- 2) Assisting the Board of Directors in assessing target achievement and performance by the remuneration received by each employee;
 - 3) Evaluate the structure, policies, and amount of remuneration at least 1 (once) time in 1 (one) a year;
 - 4) Maintain the confidentiality of Company documents, data, and information.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. Fungsi kepatuhan

- a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Direktur Utama

- b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal

- c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

1) Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Petugas Kepatuhan).

IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE, INTERNAL AUDITOR, AND EXTERNAL AUDITOR FUNCTIONS

1. Compliance function

- a. Member of the Board of Directors in charge of the compliance function

President Director

- b. Work units or employees carrying out the compliance function

Corporate Secretary and Internal Supervisory Unit

- c. Implementation of compliance with laws and regulations

1) Corporate Secretary:

The intention of official position: Enforce compliance with industry authority regulations and the provisions of Good Corporate Governance (Compliance Officer).

Tugas dan Kewenangan:

- a) Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- b) Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.
- c) Menyelenggarakan Rapat Manajemen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- d) Mengikuti perkembangan bisnis inti perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan.
- e) Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

2) Satuan Pengawas Internal (SPI)

Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan:

- a) Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan SPI

Duties and Authorities:

- a) Publish the latest information about the Company in various media, both print and electronic
- b) Facilitate the recording and storage of minutes of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners meetings.
- c) Organizing Management Meetings, Board of Directors and Board of Commissioners meetings (Management Meetings) and General Shareholders Meetings.
- d) Follow the development of the company's core business, especially changes to laws and regulations.
- e) Provide advice to the Board of Directors regarding compliance with applicable regulatory provisions.

2) Internal Supervisory Unit (ISU)

The intention of the official position:

Assisting the Board of Directors in planning, managing, supervising, and controlling operational and financial audit activities as well as SOP preparation activities in the Company within the limits of applicable government standards and regulations to ensure compatibility between implementation and existing standards and or regulations.

Duties and Authorities:

- a) Designing, proposing, implementing, and evaluating SPI program/policy plans to

- dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
- b) Merencanakan dan membuat program audit, menjadualkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan.
 - c) Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi.
 - d) Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
 - e) Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya.
 - f) Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
 - g) Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan

support the achievement of company goals.

- b) Plan and create an audit program, and schedule audit implementation to ensure compliance with the expected regulations/procedures/efficiency/management control functions.
- c) Supervise and monitor operational activities, analyze, examine, report, and provide recommendations to ensure compliance with procedures and improve efficiency.
- d) Supervise and monitor financial activities, analyze, examine, report, and provide recommendations to ensure that the distribution of cash and its use is by procedures and efficiently.
- e) Coordinate with related departments in preparing standard operating procedures and procedures (SOP); manage and monitor its implementation to ensure the existence and suitability of its implementation.
- f) Control & monitor the implementation of program audits and report audit findings to management accompanied by recommendations for improvement.
- g) Formulating, compiling, proposing, and implementing policies, systems, and procedures, as well as SOP Work Unit ISU.
- h) Carry out and supervise the implementation of GCG in their respective fields of work.

melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP Unit Kerja SPI.

- h) Melaksanakan dan mengawasi penerapan GCG di bidang tugasnya.

a. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, *gearing ratio*, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

a. Company Financial Soundness Level

The company has an adequate level of financial soundness, with the parameters of liquidity ratios, gearing ratios, profitability ratios, and good corporate governance self-assessments, as stated in the table below:

No. No.	Jenis Rasio Ratio Type	Tahun 2022 Year 2022
1	LIKUIDITAS Liquidity	
a.	Current Ratio Current Ratio	415,03%
2.	GEARING RATIO	
a.	Gearing Ratio Produktif Productive Gearing Ratio	6,06 Kali/Times
b.	Total Gearing Ratio Total Gearing Ratio	26,16 Kali/Times
3.	RENTABILITAS Profitability	
a.	Rasio Return on Asset (ROA) Return on Assets (ROA) Ratio	4,43%
b.	Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income Ratio (BOPO)	79,42%
c.	Rasio Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa Claims to Compensation Revenue Ratio	60,16%
4.	Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance Self-Assessment	
Hasil penilaian sendiri tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar mendapatkan nilai 90,48 (sembilan puluh koma empat puluh delapan) dengan predikat "Sangat Baik", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin. The results of the self-assessment of good corporate governance PT Jamkrida Jabar scored 90.48 (ninety point forty-eight) with the title "Very Good", by the Financial Services Authority Circular Letter Number 54/SEOJK.05/2017 concerning Report on the Implementation of Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.		

- b. Unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen

- b. Work units or functions that handle and resolve consumer complaints

No. No.	Penanggung Jawab <i>Person Responsible</i>	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi <i>Head of Work Unit/Executor of Functions</i>
1	Catur Priyo Widodo	Kadiv. Manajemen Risiko & Klaim Head of Risk & Claim Management Division
2	Irwan Budhi Setiawan	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
3	Fahmi Jamiul Ulum	Kabag. Unit Usaha Syariah Head of Sharia Business Unit Section

2. Fungsi Auditor Internal (SPI)

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

2. Internal Auditor Function (ISU)

The effectiveness and scope of implementation of the duties of the internal auditors in assessing all aspects and elements of activities.

- a. Ruang lingkup pekerjaan audit
- 1) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
 - 2) Melaksanakan audit operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - 3) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (*fraud*).
 - 4) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan

- a. Scope of audit work
- 1) Examine and assess to ensure that the Company's internal control system is adequate, and functions effectively, efficiently, and economically in achieving the goals and objectives of the Company, ensuring the reliability of financial information and operational information as well as maintaining and protecting the Company's assets.
 - 2) Carry out operational and compliance audits of management activities aimed at assessing the efficiency and effectiveness of company operations, reliability of company information and reporting, and compliance with laws and regulations.
 - 3) Carry out follow-up audits (special audits) on cases that have indications of fraud.
 - 4) Carry out a performance audit on the work plan and program of each work unit and assess its

- penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
- 5) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
 - 6) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.
- b. Struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal
- 1) SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
 - 2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
 - 3) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- c. Independensi auditor internal
- 1) SPI secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:
 - a) Kepala SPI harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
- conformity with company goals and assess risk management.
- 5) Carry out special/additional assignments that are relevant to the scope of ISU tasks.
 - 6) The scope and frequency of audits conducted by ISU depend on certain situations and conditions such as the results of previous audits, the materiality of the risk level surrounding an activity, the adequacy of internal controls, and the availability of ISU resources.
- b. The structure or position of the internal audit work unit
- 1) ISU is directly under the President Director.
 - 2) ISU is led by a Head of SPI.
 - 3) The Head of ISU is appointed and dismissed by the President Director.
- c. Internal auditor independence
- 1) ISU organizationally and personally must be independent of the activity being audited so that it can provide impartial and prejudiced opinions and recommendations in the implementation and reporting of the audit. Independence can be achieved through position in the company and auditor objectivity, namely:
 - a) The Head of ISU must be placed in a position directly under the Main Director so that the implementation of the internal audit has the full support of the Board of Directors and the company's work units, without the interference of any party;

- b) SPI tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
 - c) SPI harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - d) SPI dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- 2) SPI dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
 - a) SPI harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - b) SPI harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait.
- 3) SPI harus menjaga integritas melalui:
 - b) ISU is not allowed to be involved in operational activities which include planning, development, implementation, and reporting of company work units to ensure the credibility of the results of their supervision.
 - c) ISU must be free from the intervention of any party in determining the scope of work, and execution of work, as well as in communicating audit results to the authorities.
 - d) ISU is prohibited from having a sense of fear, loyalty, and ambition that can affect the activities being carried out so that it can affect the responsibilities of the assignment.
- 2) ISU is said to act objectively when it is independent and unbiased and avoids the possibility of a conflict of interest.
 - a) ISU must have an objective mental attitude, be independent and avoid possible conflicts of interest in carrying out supervisory duties.
 - b) ISU must be sure that they can make professional decisions freely, their work results are reliable, trustworthy, and free from outside influence so that they can produce objective reports and can be used by all related parties.
- 3) ISU must be maintain integrity through:

- | | |
|--|--|
| <p>a) SPI dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.</p> <p>b) SPI harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.</p> <p>c) SPI tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.</p> | <p>a) ISU is prohibited from receiving compensation in any form from employees, clients, or company partners so that it can affect their professional judgment.</p> <p>b) ISU must show an honest and serious mental attitude in carrying out its duties and fulfilling its responsibilities.</p> <p>c) ISU may not knowingly engage in actions or activities that may damage the image.</p> |
| <p>d. Uraian tugas satuan kerja audit internal
Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan. 2) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya GCG, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis; 3) Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan | <p>d. Job description of the internal audit work unit
In carrying out its duties, SPI has duties and responsibilities to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Assist the Board of Directors in fulfilling their responsibilities in managing the company, by way of auditing compliance, operations, and performance of all activities of the company's work units in an integrated manner on compliance, completeness, and use of accounting, financial and other controls as well as providing suggestions for improvement towards on achieving the goals and objectives that have been set in each work unit and the company. 2) Assist the Board of Directors in efforts to improve the realization of GCG, encourage the effectiveness of the company's internal control system, improve risk management and company performance, and apply business ethics; 3) Helping the Board of Directors to pay attention to changes in the industrial environment, business risks that may arise, opportunities |

- industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
- 4) Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
 - 5) Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
 - 6) Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
 - 7) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
 - 8) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
 - 9) Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;
 - 10) Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA).

- for efforts to increase efficiency and effectiveness, and other matters that affect the company's performance;
- 4) Encouraging work units within the Company in increasing the effectiveness of the internal control system and achieving work unit performance targets to achieve the Company's vision, mission, goals, and objectives;
 - 5) Provide an assessment of the adequacy and effectiveness of the company's internal control system and risk management of the company's activities;
 - 6) Report on important matters relating to weaknesses and opportunities for improvement in the process of controlling the company's financial and operational activities;
 - 7) Identify the activities to be audited, evaluate and assess the level of risk of these activities about the audit plan;
 - 8) Provide regular reports on the results of the semester, annual and follow-up audits (special audits) as well as the adequacy of audit resources;
 - 9) Provide recommendations for improvements to the company's business processes and internal controls;
 - 10) Monitor the implementation and accuracy of the follow-up implementation of the Audit Report (AR).

e. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI Perusahaan belum memiliki Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI yang definitif di tahun 2022. f. Jumlah pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal/SPI Jumlah pegawai yang berada di bawah Unit Kerja SPI PT Jamkrida Jabar saat ini berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SPI dan staf. g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama. Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.	e. Profile of Head of Internal Audit Unit/ISU The company does not yet have a definitive Head of Internal Audit/ISU Work Unit in 2022. f. Number of employees in the Internal Audit Work Unit/ISU The number of employees under the PT Jamkrida Jabar ISU Work Unit currently amounts to 2 (two) people consisting of the Acting Head of ISU and staff. g. Report on the results of the implementation of internal audit tasks The report on the results of the implementation of the internal audit is submitted directly by the internal audit to the Main Director. The report contains recommendations and corrective actions, as well as responses from related sectors.
3. Fungsi auditor eksternal Efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku. Pada saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif.	3. The function of the external auditor The effectiveness of the implementation of the external auditor's duties and the compliance of the Guarantee Agency with the provisions, including among others regarding the provision of all accounting records and supporting data needed for the external auditor, so as to enable the external auditor to give his opinion regarding the fairness, compliance, and conformity of the Guarantee Institution's financial statements with the applicable auditing standards . At the time of the inspection by the External Auditor, good communication and cooperation between the External Auditor and Management had been carried out intensively.

Direksi mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK.
- b. Penunjukan AP dan KAP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
KAP yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c. Penunjukan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- d. Penugasan pemeriksaan kepada AP telah memenuhi aspek-aspek:
 - 1) Kapasitas KAP yang ditunjuk;
 - 2) Legalitas perjanjian kerja;
 - 3) Ruang lingkup audit;
 - 4) Standar profesional akuntan publik; dan
 - 5) Komunikasi antara OJK dengan KAP yang ditunjuk.
- e. AP yang ditunjuk telah:
 - 1) Menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada Perseroan tepat waktu.
 - 2) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

The Board of Directors supports findings related to accounting policies, interpretations of applicable accounting standards, developments in OJK regulations, and others.

The Board of Directors also actively monitors the follow-up of the External Auditor's audit findings so that it is hoped that similar findings will not be repeated in the future.

Implementation of the External Audit Function has been going well, which can be seen from the following:

- a. The company always appoints a Public Accountant (PA) and a Public Accounting Firm (PAF) that are registered with OJK.
- b. Appointment of the same PA and PAF by the Company for no more than 5 (five) consecutive financial years.
The PAF that has audited the Company's financial statements for the last 5 (five) years, can be seen in the table below.
- c. The appointment of PA and PAF has obtained approval and recommendation from the Board of Commissioners.
- d. Assignment of inspection to PA has fulfilled the following aspects:
 - 1) Capacity of appointed PAF;
 - 2) Legality of work agreements;
 - 3) The scope of the audit;
 - 4) Professional standards of public accountants; and
 - 5) Communication between OJK and the appointed PAF.
- e. The appointed PA has:
 - 1) Deliver audit results and management letters to the Company promptly.
 - 2) Able to work independently, and meet the professional standards of public accountants and work agreements as well as the established audit scope.

AP dan KAP yang melakukan audit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar selama 5 (lima) tahun terakhir:

PA and PAF who have audited the financial statements of PT Jamkrida Jabar for the last 5 (five) years:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Publik dan Nomor Registrasi OJK Name of Public Accountant and OJK Registration Number	Biaya Auditor Eksternal External Auditor Fee (Rp)
2022	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00
2021	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150.000.000,00
2019	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA AP.0739 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA AP.0411	82.500.000,00
2018	Bambang Sudaryono & Rekan	1. Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA AP.0739 2. Drs. Sudarmadji Herry Sutrisno, Ak., MM., CPA AP.0411	82.500.000,00

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Direksi bertanggung jawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.
 - b. Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT, INTERNAL CONTROL SYSTEM, AND INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners
 - a. The Board of Directors is responsible for implementing risk management strategies and policies, internal control systems, and information technology governance and provides reports to the Board of Commissioners.
 - b. The Board of Commissioners oversees the overall level of effectiveness and implementation of policies.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi
Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.</p> | <p>2. Adequacy of policies, procedures, and use of information technology
Risk management policies, procedures, and the use of information technology require the company to comply with the rules and regulations that have been set.</p> |
| <p>3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi
Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi.</p> | <p>3. Adequacy of the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling the risks of using information technology
This policy establishes risk management principles and processes which are carried out in stages: risk identification, risk assessment, risk management, and monitoring and evaluation.</p> |
| <p>4. Struktur organisasi sistem informasi
Organisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi PT Jamkrida Jabar terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Staf SMI sebagai penanggung jawab pengembangan operasional teknologi informasi.. b. Staf SMI sebagai penanggung jawab infrastruktur teknologi informasi.. | <p>4. Information system organizational structure
PT Jamkrida Jabar Information Management System Management Organization consists of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. IT staff as the person in charge of information technology operational development. b. IT staff as the person in charge of information technology infrastructure. |
| <p>5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi
Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman <i>Disaster Recovery Plan</i> Perseroan.</p> | <p>5. Internal control system for the use of information technology
The internal control system for the use of information technology refers to the SOP for Management Information Systems and the Company's Disaster Recovery Plan Guidelines.</p> |
| <p>6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara reguler dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.</p> | <p>6. Comprehensive internal control system
Compliance with risk policies and guidelines is regularly monitored by the work unit concerned.</p> |

PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN KARYAWAN

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

- a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.

Pada tahun 2022 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti (khusus Direksi), tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Pada tahun 2022 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti (khusus Direksi), tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

IMPLEMENTATION OF REMUNERATION POLICY AND OTHER FACILITIES FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF SHARIA SUPERVISORY, AND EMPLOYEES

1. Disclosure of remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory (BSS).

- a. Remuneration in non-natura forms, including salaries and other fixed income, including benefits, share-based compensation, bonus/incentive, and other forms of remuneration.

In 2022 the Company provides non-natura remuneration to the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, namely in the form of basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances (especially for Directors), holiday allowances, incentives, and bonus originating from the Company's net profit.

- b. Other facilities in kind/non-natura form, namely other non-fixed income, including allowances for housing, transportation, health insurance, and other facilities.

In 2022 the Company provides non-natura remuneration to the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, namely in the form of basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances (especially for Directors), holiday allowances, incentives, and tantieme originating from the Company's Earnings After Tax.

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS.

Pada tahun 2022, RUPS menetapkan kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS antara lain berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan.

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

2 Orang Direksi, 2 Orang Dewan Komisaris, dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah.

2. Disclosure of remuneration packages or policies within 1 (one) year

- a. Packages or remuneration policies and other facilities for members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS determined by the GMS.

In 2022, the GMS determines the remuneration policy in 1 (one) year for the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS, including basic salary, position allowances, tax allowances, leave allowances, holiday allowances, incentives, and bonus-originating from the Company's net profit.

- b. Remuneration and other facilities for all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS include at least the number of members of the Board of Directors, the number of members of the Board of Commissioners, the number of members of the BSS and the total number of remuneration policies and other facilities.

2 Directors, 2 Commissioners, and 2 Board of Sharia Supervisory.

Jumlah yang diterima dalam satu tahun <i>Amount received in one year</i>		Remunerasi *) <i>Remuneration *)</i>	Fasilitas lain dalam bentuk natura**) <i>Other facilities in kind natura form**)</i>
Direksi Board of Directors	Jumlah Direksi Number of Directors	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions of Rupiah)	4.476,8	558.5
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Dewan Komisaris Number of Board Commissioners	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions of Rupiah)	1.352,7	228.4
Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory	Jumlah DPS Number of BSS	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Millions of Rupiah)	96	21,4

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

Information:

*) Including salary and other fixed income, including benefits, share-based compensation, bonus, and other forms of non-natura remuneration

**) Housing, transportation, health insurance, and so on.

c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

c. The number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and BSS who receive remuneration packages in 1 (one) year are grouped according to income level as follows:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai <i>Total Remuneration per Person in 1 (one) year in cash</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>	Jumlah DPS <i>Number of BSS</i>
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Above IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)	2	0	0
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Above IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) up to IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)	0	0	0

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai <i>Total Remuneration per Person in 1 (one) year in cash</i>	Jumlah Direksi <i>Number of Directors</i>	Jumlah Komisaris <i>Number of Commissioners</i>	Jumlah DPS <i>Number of BSS</i>
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Above IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) up to IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)	0	2	0
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah IDR 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) and below	0	0	2

Jumlah yang tercantum diambil dari total Pendapatan (THP) Bruto per Tahun Buku 2022
The amount listed is taken from the total Gross Take Home Pay per Fiscal Year 2022

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
- b. rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- c. rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- d. rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

3. The ratio of the highest and lowest salaries

The salary that is compared in the salary ratio is the imbalance received by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees in the last month of the reporting year.

The ratio of salary and lowest, in the following comparison scale:

- a. the ratio of the highest and lowest employee salaries;
- b. the ratio of the salaries of the highest and lowest members of the Board of Directors;
- c. the ratio of the salaries of the highest and lowest members of the Board of Commissioners; and
- d. the highest salary ratio for members of the Board of Directors and employees.

Rasio gaji Salary ratio
a) 5,94 : 1
b) 1,17 : 1
c) 1,11 : 1
d) 3,22 : 1

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui *website* www.jamkrida-jabar.co.id dan media cetak.
3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada *website*.

TRANSPARENCY OF THE COMPANY'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS

The Company has prepared and presented reports by the provisions regarding the transparency of the Company's financial and non-financial conditions with the following details:

1. The Company has submitted Annual Financial Reports promptly to the Financial Services Authority and other interested parties.
2. The Company's Annual Financial Report is published through the website www.jamkrida-jabar.co.id and print media.
3. Information regarding guarantee service products issued by the company is available on the website.

RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN

1. Rencana strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - a. Memperkuat portofolio produk penjaminan eksisting dan baru.
 - b. Mendorong sinergi dengan BUMD lainnya yang berorientasi pada profitabilitas.
 - c. Memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar melalui investasi sebagai resiprokal.
 - d. Meningkatkan efektivitas dan standardisasi proses kerja serta efisiensi proses internal dalam layanan klaim.
 - e. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM.
 - f. Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan *risk management* yang *prudent*.
 - g. Meningkatkan pendapatan, *market share*, dan *profitability* dengan mengedepankan *underwriting* yang *prudent*.
 - h. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi secara berkelanjutan.

CORPORATE STRATEGIC PLAN

1. Short-term strategic plan for 1 (one) year.
 - a. Strengthen the portfolio of existing and new guarantee products.
 - b. Encouraging synergies with other profitability-oriented BUMDs.
 - c. Strengthen and develop partnership networks for market penetration & expansion through reciprocal investment.
 - d. Increase effectiveness and standardization of work processes and efficiency of internal processes in claims services.
 - e. Improving HR competency and productivity.
 - f. Improving risk awareness culture and implementing prudent risk management.
 - g. Increase revenue, market share, and profitability by prioritizing prudent underwriting.
 - h. Develop information technology applications on an ongoing basis.

2. Rencana strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
 - a. Memperluas jaringan pemasaran melalui penambahan kantor pemasaran/unit pelayanan di beberapa kabupaten/kota.
 - b. Mengintegrasikan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi secara terpadu.
3. Rencana strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
 - a. Memperluas layanan dan jangkauan pemasaran pada perbankan BUKU 3 dan 4.
 - b. Memperkuat dan memperluas jaringan pemasaran melalui pembukaan kantor perwakilan.
 - c. Melakukan *Spin Off* Unit Usaha Syariah dengan syarat bahwa kontribusi kinerja Penjaminan syariah mencapai minimal 30% dari total portofolio penjaminan.
4. Rencana Kerja & Anggaran Tahunan
 - a. Proyeksi Volume Penjaminan tahun 2023 adalah senilai Rp10,18 triliun atau naik sebesar 55,65% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp6,54 triliun. Perseroan optimis penjaminan sektor produktif tumbuh sebesar 122,12%, sedangkan sektor non produktif tumbuh sebesar 19,73%.
 - b. Proyeksi Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Accrual Basis tahun 2023 adalah senilai Rp213,35 miliar atau naik sebesar 22,49% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp174,18 miliar. Perseroan optimis IJP Accrual Basis sektor produktif tumbuh sebesar 42,33% sedangkan sektor non produktif tumbuh 15,14%.
 - c. Proyeksi Total Aset tahun 2023 adalah senilai Rp577,24 miliar atau naik sebesar 19,42% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp483,36 miliar.
2. Medium-term strategic plan for 3 (three) years.
 - a. Expanding the marketing network by adding marketing offices/service units in several districts/cities.
 - b. Integrated information technology infrastructure and applications in an integrated manner.
3. Long-term strategic plan for 5 (five) years.
 - a. Expanding services and marketing outreach to BUKU 3 and 4 banking.
 - b. Strengthening and expanding the marketing network through opening representative offices.
 - c. Perform Sharia Business Unit Spin-Off with the condition that the performance contribution of Sharia Guarantee reaches a minimum of 30% of the total guarantee portfolio.
4. Annual Work Plan & Budget
 - a. The Guarantee Volume Projection in 2023 is IDR 10.18 trillion, an increase of 55.65% when compared to the 2022 Prognosis of IDR 6.54 trillion. The company is optimistic that the guarantee for the productive sector will grow by 122.12%, while the non-productive sector will grow by 19.73%.
 - b. The Accrual Base Guarantee Fee (IJP) Projection in 2023 is IDR 213.35 billion, an increase of 22.49% compared to the 2022 Prognosis of IDR 174.18 billion. The company is optimistic that the IJP Accrual Base for the productive sector will grow by 42.33% while the non-productive sector will grow by 15.14%.
 - c. The Total Asset Projection in 2023 is IDR 577.24 billion, an increase of 19.42% compared to the 2022 Prognosis of IDR 483.36 billion.
 - d. The Total Equity Projection for 2023 is IDR 356.07 billion, an increase of

- d. Proyeksi Total Ekuitas tahun 2023 adalah senilai Rp356,07 miliar atau naik sebesar 39,62% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp255,03 miliar.
- e. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2023 adalah senilai Rp81,38 miliar atau lebih rendah sebesar 16,56% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp97,53 miliar.
- f. Proyeksi Total Liabilitas Jangka Panjang tahun 2023 adalah senilai Rp139,79 miliar atau naik sebesar 6,88% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp130,80 miliar.
- g. Proyeksi Laba Tahun Berjalan tahun 2023 adalah senilai Rp8,19 miliar atau naik sebesar 14,89% jika dibandingkan dengan Prognosa 2022 senilai Rp7,42 miliar.
- h. Proyeksi Management Fee tahun 2023 adalah senilai Rp13,00 miliar atau lebih rendah sebesar 33,97% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp19,66 miliar.
- i. Proyeksi Biaya Akuisisi tahun 2023 adalah senilai Rp32,06 miliar atau tumbuh sebesar 23,19% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp26,02 miliar.
- j. Proyeksi Pendapatan Investasi tahun 2023 adalah senilai Rp18,78 miliar atau tumbuh sebesar 45,05% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp12,94 miliar, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dana kelolaan investasi sebagai dampak dari adanya tambahan penyertaan modal dan pendapatan penjaminan.
- k. Proyeksi Pendapatan Subrogasi tahun 2023 adalah senilai Rp3,07 miliar atau tumbuh sebesar 7,13% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp2,87 miliar.
- l. Proyeksi Beban Klaim tahun 2023 adalah senilai Rp76,02 miliar atau tumbuh sebesar 37,48% dibandingkan Prognosa 2022 senilai 39.62% compared to the 2022 Prognosis of IDR 255.03 billion.
- e. The Total Short-Term Liabilities Projection in 2023 are worth IDR 81.38 billion or 16.56% lower compared to the 2022 Prognosis of IDR 97.53 billion.
- f. The Total Long-Term Liabilities Projection in 2023 are worth IDR 139.79 billion, an increase of 6.88% compared to the 2022 Prognosis of IDR 130.80 billion.
- g. The Profit Projection in 2023 is IDR 8.19 billion, an increase of 14.89% when compared to the 2022 Prognosis of IDR 7.42 billion.
- h. The Management Fee Projection in 2023 is IDR 13.00 billion or 33.97% lower than the 2022 Prognosis of IDR 19.66 billion.
- i. The Acquisition Cost Projection in 2023 is IDR 32.06 billion or a growth of 23.19% compared to the 2022 Prognosis of IDR 26.02 billion.
- j. The Investment Income Projection in 2023 is Rp. 18.78 billion, growing by 45.05% compared to the 2022 Prognosis of IDR 12.94 billion, this is due to the growth in investment-managed funds as a result of additional equity participation and guarantee income.
- k. The Subrogation Income Projection in 2023 is IDR. 3.07 billion or grows by 7.13% compared to the 2022 Prognosis of IDR 2.87 billion.
- l. The Claim Expense Projection in 2023 is IDR 76.02 billion or grew by 37.48% compared to the 2022 Prognosis of IDR 55.29 billion, this is due to the potential increase in claims based on linear forecasting of claim data history for the past 3 years and projected claims for Excludes Reinsurance Treaty (there are several treaty exceptions for non-productive loans).
- m. The Operating Expenses Projection in 2023 is IDR 5.89 billion, growing by 53.81% compared to the 2022

Rp55,29 miliar, hal ini disebabkan oleh potensi peningkatan klaim berdasarkan linier forecasting atas claim data history 3 tahun ke belakang dan proyeksi klaim atas Exclude Treaty Reasuransi (adanya beberapa pengecualian treaty atas kredit non produktif).

- m. Proyeksi Beban Operasional tahun 2023 adalah senilai Rp5,89 miliar atau tumbuh sebesar 53,81% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp3,83 miliar seiring dengan target pengembangan dan peningkatan pasar penjaminan, peningkatan target penerimaan subrogasi, dan verifikasi lapangan atas pengajuan klaim.
- n. Proyeksi Beban Regaransi tahun 2023 adalah senilai Rp84,87 miliar atau lebih rendah sebesar 7,07% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp91,33 miliar, hal ini sejalan dengan proyeksi treaty Reasuransi.
- o. Proyeksi Beban SDM tahun 2023 adalah senilai Rp22,72 miliar atau tumbuh sebesar 38,20% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp16,44 miliar. Pertumbuhan ini sejalan dengan adanya proyeksi penyesuaian SDM dan kenaikan harga BBM di masyarakat.
- p. Proyeksi Beban Administrasi dan Umum tahun 2023 adalah senilai Rp9,12 miliar atau tumbuh sebesar 25,54% dibandingkan Prognosa 2022 senilai Rp7,26 miliar. Hal ini dipengaruhi peningkatan aktivitas operasional Perseroan.

Prognosis of IDR 3.83 billion in line with the target of developing and increasing the guarantee market, increasing the target of subrogation receipts, and field verification of submitting claims.

- n. The Reinsurance Expense Projection in 2023 is IDR 84.87 billion or 7.07% lower than the 2022 Prognosis of IDR 91.33 billion, this is in line with the Reinsurance treaty projection.
- o. The HR Expense Projection in 2023 is IDR 22.72 billion or a growth of 38.20% compared to the 2022 Prognosis of IDR 16.44 billion. This growth is in line with the projected human resource adjustments and rising fuel prices in the community.
- p. The General and Administrative Expenses Projection in 2023 are valued at IDR 9.12 billion or a growth of 25.54% compared to the 2022 Prognosis of IDR 7.26 billion. This is influenced by the increase in the Company's operational activities.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% (LIMA PER SERATUS) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS WHICH ACHIEVE 5% (FIVE PER HUNDRED) OR MORE, WHICH COVERS TYPE AND NUMBER OF SHARE SHARE

No. No.	Nama Name	Kategori Kepemilikan Saham *) Category Ownership Share *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham Nominal Amount of Share Ownership	Persentase Kepemilikan Saham Percentage of Share Ownership
1	Tidak Ada None	A	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		B	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		C	Nihil Nothing	Nihil Nothing
		D	Nihil Nothing	Nihil Nothing

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
The guarantor institution concerned;
- B. Lembaga Penjamin lain;
Other Guarantee Institutions;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin; dan
Financial services companies other than Guarantee Institutions; and
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.
Other companies domiciled inside or outside the country, including shares acquired through the stock exchange.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

DISCLOSURE OF FINANCIAL RELATIONSHIPS AND FAMILY RELATIONSHIPS OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, AND MEMBERS OF THE BSS WITH OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, OTHER BSS MEMBERS, AND/OR SHAREHOLDERS OF PT JAMKRIDA JABAR

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

1. Financial relationships and family relationships of members of the Board of Directors with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, members of the BSS, and/or PT Jamkrida Jabar shareholders

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Yanti Rachmawati	Direksi Lainnya Other Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	
2	Agus Subrata	Direksi Lainnya Other Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

2. Financial relationships and family relationships between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, members of the BSS, and/or PT Jamkrida Jabar shareholders

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Muhammad Taufiq Budi Santoso	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya Other Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	
2	Dini Rosdini	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya Other Commissioners		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah Board of Sharia Supervisory		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar

3. Financial relationships and family relationships of BSS members with members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, other BSS members, and/or PT Jamkrida Jabar shareholders

No. No.	Nama Name	Hubungan dengan Relationship with	Bentuk Hubungan Relationship Form				Keterangan Information
			Keuangan Family		Keluarga Finance		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
1	Zaini Abdul Malik	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		DPS Lainnya Other BSS		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	
2	Khozin Abu Faqih	Direksi Board of Directors		√		√	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		√		√	
		DPS Lainnya Other BSS		√		√	
		Pemegang saham Shareholders		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendali adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

Information:

The financial relationship is when a person receives income, financial assistance, or loans from members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Guarantee Institution, Guarantee Institution whose controlling shareholders are members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors of the Guarantee Institution, and/or the controlling shareholder of the Institution Guarantor.

Family relationship is having a family relationship up to the second degree, both vertical and horizontal, including in-laws, son-in-law, and in-laws, so what is meant by family includes biological/step/adopted parents, siblings/step/adopted siblings and their husbands or wives, biological children /step/adoptive, biological/step/adopted grandparents, biological/step/adopted grandchildren, siblings/step/adopted parents and their husbands or wives, in-laws, in-laws, in-laws, husbands/wives of biological/step/adopted children, husband or wife's grandfather or grandmother, husband/wife of biological/step/adopted grandchildren, and biological/step/adopted siblings of husband or wife and their husband or wife

PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAINNYA
OTHER IMPORTANT DISCLOSURES

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
Resignation or dismissal of the external auditor

Tidak Ada None

2. Transaksi material dengan pihak terkait
Material transactions with related parties

Tidak Ada None

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi
Ongoing and/or potential conflicts of interest

No. No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position of Parties Having Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Position of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) <i>Transaction Value (Millions of Rupiah)</i>	Keterangan*) <i>Information*)</i>
1	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku
Not in accordance with applicable systems and procedures

Selama tahun 2022, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan During 2022, there were no transactions containing conflicts of interest in the Company
--

4. Informasi material lain mengenai PT Jamkrida Jabar
Other material information regarding PT Jamkrida Jabar

Tidak ada None

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen
Resignation or dismissal of the Independent Commissioner

Tidak ada None

6. Sertifikasi
Certification

No. No.	Materi Sertifikasi Certification Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Peserta Participant
1	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Guarantee Business Professional Certification	11 - 12 Juli 2022 July 11 – 12, 2022	PT Bintang Jamtama Sejahtera	Komisaris Independen Independent Commissioner
				Direktur Utama President Director
				Direktur Operasional Operational Director
2	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Guarantee Business Professional Certification	26 Juli 2022 July 26, 2022	LSP Penjaminan	Direktur Operasional Operational Director
3	Sertifikasi Profesi Bisnis Penjaminan Guarantee Business Professional Certification	05 Agustus 2022 August 05, 2022	LSP Penjaminan	Direktur Utama President Director
				Komisaris Independen Independent Commissioner
4	Sertifikasi Auditor Hukum Legal Auditor Certification	18 Agustus 2022 August 18, 2022	Lembaga Jimly School of Law and Government	Staf Hukum Legal Staff
5	Sertifikasi Nasional CRMO Level II CRMO Level II National Certification	21 - 23, 25 & 28 November 2022 November 21 - 23, 25 & 28, 2022	LSPMR - RAP Learning Center	Staf Pengendalian Control Staff

7. Tenaga kerja asing
Foreign workers

Selama tahun 2022, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing.
During 2022, the Company does not employ foreign workers.

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Nomor Uji Kepatutan & Kelayakan Number of Fit and Proper Test	KITAS Limited Stay Permit Card		IMTA Permit to Use Foreign Workers	
				Izin Kerja Work Permit	Masa Berlaku Validity Period	No. Izin No. Permit	Masa Berlaku Validity Period
1	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal
Total internal fraud

Selama tahun 2022, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Perseroan.

During 2022, there were no internal fraud committed by the management, permanent employees or non-permanent employees of the Company.

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun <i>Internal fraud within 1 (one) year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh <i>Number of cases committed by</i>		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS <i>Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Sharia Supervisory</i>	Pegawai Tetap <i>Permanent Employee</i>	Pegawai Tidak Tetap <i>Temporary Employees</i>
Total penyimpangan Total fraud	-	-	-
Telah diselesaikan Resolved	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal In the process of internal completion	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian No solution yet	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up through the legal process	-	-	-

9. Permasalahan hukum
Legal problems

Selama tahun 2022, Perseroan tidak memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

During 2022, the Company will not have legal problems, both civil and criminal.

Permasalahan Hukum <i>Legal Problems</i>	Jumlah Kasus <i>Number of Cases</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Has obtained a decision that has permanent legal force a. b.	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>

Permasalahan Hukum <i>Legal Problems</i>	Jumlah Kasus <i>Number of Cases</i>	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata <i>In the process of settlement in court and in alternative dispute resolution institutions for civil cases</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>
a.		
b.		
Total <i>Total</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>

10. Etika bisnis Perusahaan
Company business ethics

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar.

The business ethics that are used as a reference for the Company and all employees are contained in the PT Jamkrida Jabar Code of Conduct.



LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan dan masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Perseroan kepada lingkungan dan masyarakat, maka Perseroan secara rutin tiap tahunnya menyalurkan Dana CSR kepada sasaran yang tepat, baik itu kepada korban bencana alam, kepada yayasan yatim piatu, ataupun bantuan lainnya. Dana CSR diambil dari keuntungan Perseroan yang disisihkan setiap tahunnya.

Berikut ini adalah penyaluran dana CSR PT Jamkrida Jabar pada periode tahun 2022:

Corporate Social Responsibility (CSR) is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of the environment and society.

As a form of the Company's concern and social responsibility to the environment and society, the Company routinely distributes CSR Funds to the right targets every year, be it to victims of natural disasters, orphan foundations, or other assistance. CSR funds are taken from the Company's profits set aside annually.

The following is the distribution of PT Jamkrida Jabar's CSR funds in the 2022 period:

No. No.	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	Tanggal Pencairan Disbursement Date
1	Bantuan Kegiatan Tahunan Perayaan Festival Desa Jawa Barat Support for Annual West Java Village Festival Celebration Activities	10,000,000	1/3/2022
2	Bantuan Kegiatan KAMMI Bandung Support for KAMMI Bandung Activities	1,500,000	2/4/2022
3	Bantuan Kegiatan Pemulangan Migran Indonesia via Jabar Quick Response Support for Indonesian Migrant Return Activities via Jabar Quick Response	10,000,000	3/9/2022
4	Bantuan Kegiatan Pembangunan Balai Warga Komplek Taman Persada Residence Support for	5,000,000	3/9/2022
5	Bantuan Kegiatan Pengajian Menyambut Bulan Suci Ramadhan Support for	1,000,000	3/28/2022
6	Bantuan Kegiatan Yayasan Da'wah Islam Al-Fatwa Bandung Support for Al-Fatwa Bandung Islamic Da'wah Foundation Activities	1,500,000	3/28/2022

No. No.	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	Tanggal Pencairan Disbursement Date
7	Bantuan Kegiatan Yayasan Kelompok Perempuan Mandiri (KPM) Dewi Sartika Support for the Independent Women's Group Foundation (KPM) Dewi Sartika activities	2,500,000	3/28/2022
8	Bantuan Kegiatan Santunan Kepada Anak Yatim Piatu via Baznas Support for Compensation Activities for Orphans via Baznas	2,000,000	4/5/2022
9	Bantuan Kegiatan PC Salimah Buah Batu Support for Salimah Buah Batu PC Activities	2,000,000	4/6/2022
10	Bantuan Kegiatan BUBOS 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Barat Support for BUBOS 2022 Activities West Java Provincial Government	5,000,000	4/6/2022
11	Bantuan Kegiatan Bazar Ramadhan 1443 H Tahun 2022 Support for 1443 H Ramadhan Bazaar Activities in 2022	9,420,000	4/20/2022
12	Bantuan Kegiatan Forum Sepak Bola Generasi Indonesia (FORSGI) Support for Indonesian Generation Football Forum (FORSGI) Activities	5,000,000	5/31/2022
13	Bantuan Kegiatan Jagad UMKM Support for Jagad UMKM Activities	20,000,000	6/15/2022
14	Bantuan Kegiatan World Coffee Milan (Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Barat) - Komite Ekonomi Kreatif & Inovasi Support for World Coffee Milan Activities (West Java Province SME Cooperative Service) - Creative Economy & Innovation Committee	50,000,000	6/17/2022
15	Bantuan Kegiatan "Malam Tembang Kenangan" PP Polri Support for PP Polri "Memories Song Night" Activities	600,000	6/20/2022
16	Bantuan Kegiatan Outbond Dinas PUTRPRKP Kabupaten Pangandaran Support for Outbound Activities for PUTRPRKP Pangandaran Regency	10,000,000	7/29/2022
17	Bantuan Kegiatan Yayasan Al Fadilah Panongan Support for Al Fadilah Panongan Foundation Activities	5,000,000	8/2/2022
18	Bantuan Kegiatan PERTINA Jabar dalam Kejurnas Tinju Tahun 2022 Support for West Java PERTINA Activities in the 2022 Boxing National Championship	10,000,000	8/2/2022
19	Bantuan Kegiatan Jelajah Nusantara Support for Exploring the Archipelago Activities	5,000,000	8/8/2022
20	Bantuan Kegiatan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 Support for Commemoration of the 77th Indonesian Independence	5,000,000	8/8/2022
21	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 RW dekat kantor Support for Commemoration of the 77th Indonesian Independence Day RW near the office	1,000,000	8/16/2022
22	Bantuan Kegiatan Jelajah Investasi Support for Investment Exploration Activities	10,000,000	8/16/2022

No. No.	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	Tanggal Pencairan Disbursement Date
23	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat ke 77 Support for Commemoration of the 77th Anniversary of West Java Province	10,000,000	8/18/2022
24	Bantuan Kegiatan Green Fest 2022 Ika Alumni SMPN 2 Bandung Support for Green Fest 2022 Activities Ika Alumni of SMPN 2 Bandung	10,000,000	8/19/2022
25	Bantuan Kegiatan KNPI Kota Bandung Support for KNPI Bandung City Activities	2,000,000	8/26/2022
26	Bantuan Kegiatan Pembangunan Taman Gazebo dan Lapangan Bulutangkis Support for for Development of Gazebo Gardens and Badminton Courts	20,000,000	9/7/2022
27	Bantuan Kegiatan Rehabilitasi Bangunan kantor DPD APDESI Jabar Support for Building Rehabilitation Activities for the West Java DPD APDESI office	100,000,000	9/7/2022
28	Bantuan Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Bogor Support for Bogor Regency Disaster Emergency Response	35,000,000	9/7/2022
29	Bantuan Kegiatan Bandung Photography Triennale 2022 Support for Bandung Photography Triennale 2022 Activities	20,000,000	9/7/2022
30	Bantuan Kegiatan Pembangunan Rumah Tahfidz Quran Rabiyyun Support for the Construction of the Tahfidz Quran Arabiyyun House	50,000,000	9/7/2022
31	Bantuan Kegiatan Peringatan HUT Kota Bandung dan Menyambut Bulan Bakti Karang Taruna ke 62 Support for Bandung City Anniversary Commemoration Activities and Welcoming the 62nd Month of Youth Service	2,000,000	9/23/2022
32	Bantuan Kegiatan Jabar Quick Response River Rescue Challenge (JRRC) Support for Jabar Quick Response River Rescue Challenge (JRRC) Activities	2,000,000	9/28/2022
33	Bantuan Kegiatan Futsal Piala Kapolsek Buah Batu Support for Futsal Activities for the Buah Batu of Police Chief Trophy	1,500,000	10/13/2022
34	Bantuan Untuk Korban Gempa Cianjur via Jabar Quick Response Support for Cianjur Earthquake Victims via Jabar Quick Response	8,081,150	11/22/2022
35	Bantuan Kegiatan Penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang Berprestasi dalam Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional Provinsi Jawa Barat Support for Award Activities to Districts/Cities that Achieved in the West Java Province National Child Immunization Month Activities	23,700,000	12/2/2022
39	Bantuan Kegiatan TK Al-Ghifari Khoreun Walad Support for Al-Ghifari Khoreun Walad Kindergarten activities	2,500,000	12/7/2022
36	Bantuan Kegiatan Peringatan Hari Disabilitas Internasional Support for International Day of Disabilities Commemoration Activities	10,000,000	12/13/2022

No. No.	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	Tanggal Pencairan Disbursement Date
37	Bantuan Kegiatan Peresmian Masjid Al-Jabbar Support for the Inauguration of the Al-Jabbar Mosque	10,000,000	12/23/2022
38	Bantuan Kegiatan Panti Asuhan Al Hayat dan An Nida Support for Al Hayat and An Nida Orphanage Activities	16,060,600	12/30/2022
TOTAL		494,361,750	

Adapun capaian dan pertumbuhan Realisasi Dana CSR Tahun 2022 terhadap Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The achievements and growth of the Realization of CSR Funds in 2022 against the 2022 Budget are as follows:

Realisasi 2021 Realization 2021	Anggaran 2022 (*) Budget 2022	Realisasi 2022 Realization 2022	Capaian Achievement	Pertumbuhan Growth
172.000.000	802.907.429	494.361.750	61.57%	187.42%

*) Total Anggaran CSR Tahun 2022 adalah sebesar Rp802.907.429,- bersumber dari:

1. Sisa Anggaran CSR sebagai bagian dari penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp73.649.143,-;
2. Anggaran CSR sebagai bagian dari penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp529.258.286,-; dan
3. Anggaran CSR dalam RKAP 2022 sebesar Rp200.000.000,-.

*) Total CSR Budget for 2022 is IDR 802,907,429, - sourced from:

1. The remaining CSR Budget as part of the use of the Company's Net Profit for the 2020 Fiscal Year is IDR 73.649.143, -;
2. The CSR budget as part of the use of the Company's Net Profit for the 2021 Fiscal Year is IDR 529.258.286,-; and
3. The CSR budget in the BP 2022 is IDR 200,000,000,-.



LAPORAN AUDIT

AUDIT REPORT



PT JAMKRIDA JABAR



2022 AUDIT REPORT

Tanggal 31 Desember 2022
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

terdaftar dan diawasi oleh :





PT JAMKRIDA JABAR

Jl. Soekarno Hatta No. 592 Bandung
Telp. (022) 7504777, 7506307
Fax. (022) 7563333
E-mail : info@jamkrida-jabar.co.id
Website : www.jamkrida-jabar.co.id

**Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab
Atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2022
PT Jamkrida Jabar**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yanti Rachmawati

Alamat kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286

Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Jamkrida Jabar telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan PT Jamkrida Jabar tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Saya bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jamkrida Jabar.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandung, 16 Juni 2023

2. Direktur Utama

Yanti Rachmawati

**PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

	<u>Halaman</u>
Daftar Isi	
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3 - 4
Laporan Perubahan Ekuitas	5 - 6
Laporan Arus Kas	7
Catatan Atas Laporan Keuangan	8 - 44



No. 00130/2.1000/AU.1/08/1290-3/1/VI/2023

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Jamkrida Jabar**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar pada tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami.

Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015





Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (Lanjutan)

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan Perusahaan atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Aryo Wibisono, S.E., CPA.
Register Akuntan Publik No. 1290
Jakarta, 16 Juni 2023

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	191,272,939,970	156,208,333,827
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(878,876,521)	(4,405,112,016)
Surat Berharga	2d, 3a,	104,755,202,100	78,971,226,001
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	3b, 9	(20,857,963)	(136,839,191)
Piutang Re/Cogaranasi	2e, 5	83,488,976,172	63,283,024,935
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(5,226,122,382)	(4,560,598,252)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2d, 2j, 6	10,024,534,884	12,815,535,320
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(213,564,612)	(852,506,852)
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	2f, 8a	24,040,498,999	20,439,926,860
Piutang Lain-lain	7	672,904,055	152,336,038
Properti Investasi	10	2,495,100,000	2,495,100,000
Jumlah Aset Lancar		410,410,734,702	324,410,426,670
Aset Tidak Lancar			
Beban Dibayar Dimuka	2f, 8b	75,614,738,918	65,501,955,501
Aset Tetap - Bersih	2g, 3b, 11	13,361,215,515	13,246,954,273
Aset Pajak Tangguhan	2o, 20d	5,840,943,395	10,534,785,140
Aset Lain-Lain	2i, 2k, 12	272,278,302	229,610,850
Jumlah Aset Tidak Lancar		95,089,176,130	89,513,305,764
JUMLAH ASET		505,499,910,832	413,923,732,434

Catatan atas laporan keuangan merupakan
 bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak	2o, 20a	1,251,733,981	502,229,949
Utang Re/Cogarsansi	13	38,197,826,176	43,040,330,699
Beban yang Masih Harus Dibayar	14	4,158,532,265	514,272,643
Penampungan Sementara	15	17,652,888,693	11,793,690,936
Utang Lancar Lainnya	16	33,244,767	244,746
Pendapatan Diterima Dimuka	17a	43,996,687,948	35,709,287,859
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		105,290,913,830	91,560,056,832
Liabilitas Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka	17b	121,573,407,802	98,071,338,960
Cadangan Klaim	2r, 18	15,062,088,847	18,908,364,728
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2n, 19	1,975,738,918	2,126,352,620
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		138,611,235,567	119,106,056,308
JUMLAH LIABILITAS		243,902,149,397	210,666,113,140
EKUITAS			
Modal			
Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebanyak 20.320 dan 15.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 per lembar saham.	21	203,200,000,000	153,200,000,000
Cadangan Umum	21	44,817,709,373	40,139,066,131
Saldo Laba	21	15,202,050,435	10,585,165,700
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga			
Keuntungan pengukuran kembali	2d, 3a, 3b, 8	(1,340,127,293)	(569,214,323)
Selisih Pengukuran Kembali			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n, 19	(281,871,080)	(97,398,214)
JUMLAH EKUITAS		261,597,761,435	203,257,619,294
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		505,499,910,832	413,923,732,434

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa			
Penjaminan / Kafalah	2p, 22	166,944,974,562	183,093,487,470
Beban Akuisisi	2p, 22	(24,228,085,655)	(30,728,197,910)
Restitusi IJP	2p, 22	(5,039,817,944)	(3,202,339,341)
Manajemen Fee	2p, 22	19,458,760,127	17,534,896,772
Beban Regaransi	2p, 22	(73,770,797,298)	(90,364,193,737)
JUMLAH			
PENDAPATAN PENJAMINAN		83,365,033,792	76,333,653,254
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2t, 24	(50,775,513,607)	(63,389,134,331)
Pemulihan (Pembentukan)			
Cadangan Klaim	2t, 24	625,615,439	(3,637,832,410)
JUMLAH BEBAN KLAIM		(50,149,898,168)	(67,026,966,741)
PENDAPATAN			
PENJAMINAN BERSIH		33,215,135,624	9,306,686,513
PENDAPATAN INVESTASI	2d, 2j, 23	13,279,739,311	14,965,350,435
PENDAPATAN SUBROGASI	2r, 26	1,924,565,589	2,621,926,441
PENDAPATAN (BEBAN)			
LAINNYA	27	1,543,398,742	3,522,747,378
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	25	(3,936,842,774)	(2,872,876,377)
Beban Sumber Daya Manusia	25	(18,966,640,491)	(10,514,469,094)
Beban Administrasi dan Umum	25	(6,574,672,623)	(5,301,953,833)
JUMLAH BEBAN USAHA		(29,478,155,888)	(18,689,299,304)
LABA SEBELUM PAJAK		20,484,683,378	11,727,411,463
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2o, 21b	-	-
Manfaat Pajak Tangguhan	2o, 21d	(5,282,632,943)	(1,142,245,763)
JUMLAH			
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(5,282,632,943)	(1,142,245,763)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		15,202,050,435	10,585,165,700

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
LAIN YANG TIDAK AKAN			
DIREKLASIFIKASIKAN			
KE LABA RUGI			
Pengukuran Kembali			
Kewajiban Imbalan Kerja		(292,634,239)	231,904,116
Pajak Tangguhan Terkait			
Pengukuran Kembali			
Kewajiban Imbalan Kerja		108,161,373	(51,018,906)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
LAIN YANG AKAN			
DIREKLASIFIKASIKAN			
KE LABA RUGI			
Keuntungan (Kerugian)			
Aset Keuangan yang Diukur			
Pada Nilai Wajar Melalui			
Penghasilan Komprehensif		(1,251,542,797)	(2,899,656,960)
Pajak Tangguhan Terkait			
Keuntungan (Kerugian)			
Aset Keuangan yang Diukur			
Pada Nilai Wajar Melalui			
Penghasilan Komprehensif		480,629,827	(597,126,769)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF			
TAHUN BERJALAN		(955,385,837)	(3,315,898,519)
LABA KOMPREHENSIF		14,246,664,598	7,269,267,181

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi	Keuntungan (kerugian) Imbalan pasti setelah aset pajak tanggunghan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2020		153,200,000,000	35,601,299,677	2,927,569,407	(278,283,424)	8,730,878,772	200,181,464,433
Modal Disetor	21	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	21	-	4,537,766,454	-	-	(4,537,766,454)	-
Pembagian Dividen	21	-	-	-	-	(2,812,946,319)	(2,812,946,319)
Bonus dan Tantiem	21	-	-	-	-	(1,205,548,422)	(1,205,548,422)
CSR	21	-	-	-	-	(174,617,577)	(174,617,577)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	10,585,165,700	10,585,165,700
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	-	-	(3,496,783,730)	-	-	(3,496,783,730)
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja		-	-	-	-	-	-
setelah aset pajak tanggunghan	2n, 19	-	-	-	180,885,210	-	180,885,210
Saldo per 31 Desember 2021		153,200,000,000	40,139,066,131	(569,214,323)	(97,398,214)	10,585,165,700	203,257,619,294

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)						
	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi	Keuntungan (kerugian) Imbalan pasti setelah aset pajak tanggungan	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2021		153,200,000,000	40,139,066,131	(569,214,323)	(97,398,214)	203,257,619,294
Modal Disetor	21	50,000,000,000	-	-	-	50,000,000,000
Cadangan Umum	21	-	4,678,643,242	-	-	-
Pembagian Dividen	21	-	-	-	-	(3,059,112,887)
Bonus dan Tantiem	21	-	-	-	-	(2,318,151,286)
CSR	21	-	-	-	-	(529,258,285)
Laba Tahun Berjalan		-	-	-	-	15,202,050,435
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	-	-	(770,912,970)	-	(770,912,970)
Penghasilan komprehensif lain imbalan kerja setelah aset pajak tanggungan	2n, 19	-	-	-	(184,472,866)	(184,472,866)
Saldo per 31 Desember 2022		203,200,000,000	44,817,709,373	(1,340,127,293)	(281,871,080)	261,597,761,435

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan		202,727,690,425	170,068,655,535
Pembayaran Klaim		(53,996,174,050)	(54,601,198,755)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok		(141,826,351,637)	(139,175,644,222)
Pembayaran Pajak		160,712,833	137,029,118
Pendapatan Subrogasi		1,924,565,589	2,621,926,441
Utang Lancar Lainnya		33,000,023	-
Pendapatan lain-lain		(2,737,756,418)	(1,582,837,552)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK)			
AKTIVITAS OPERASI		6,285,686,766	(11,448,895,412)
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Aset Keuangan		(27,075,457,086)	(18,388,045,369)
Penerimaan Investasi		12,815,205,648	14,539,344,859
Properti Investasi		-	-
Pengeluaran Untuk			
Pengadaan Aset Tetap		(1,011,639,275)	(833,330,151)
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap		-	-
Pelepasan (Pengadaan) Aset Lain lain		(42,667,452)	(77,094,796)
Aset Dalam Penyelesaian		-	-
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK			
AKTIVITAS INVESTASI		(15,314,558,165)	(4,759,125,457)
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS PENDANAAN			
Tambahan Modal Disetor		50,000,000,000	-
Pembagian Dividen		(3,059,112,887)	(2,812,946,319)
Pembagian Bonus dan Tantiem		(2,318,151,286)	(1,205,548,422)
CSR		(529,258,285)	(174,617,577)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK)			
AKTIVITAS PENDANAAN		44,093,477,542	(26,743,096,196)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH			
KAS DAN SETARA KAS		35,064,606,143	(31,484,307,210)
KAS DAN SETARA KAS			
AWAL TAHUN		156,208,333,827	187,692,641,037
KAS DAN SETARA KAS			
AKHIR TAHUN		191,272,939,970	156,208,333,827
Kas dan Setara Kas terdiri atas :			
Kas		117,532,482	48,799,667
Giro Bank		14,968,904,855	14,293,509,122
Deposito		176,186,502,633	141,866,025,038
Jumlah Kas dan Setara Kas		191,272,939,970	156,208,333,827

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT JAMKRIDA JABAR, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT JAMKRIDA JABAR Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT JAMKRIDA JABAR.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisiner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT JAMKRIDA JABAR.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120304971535 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2019.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618463 tanggal 12 September 2018 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

b. Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan kepastian.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

b. Usaha (Lanjutan)

Kafalah Pembiayaan Syariah adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah, dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dan Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*). Namun demikian karena Kafalah Pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka PT Jamkrida Jabar melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan Kafalah Pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI.

c. Tempat Usaha

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286. Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah. Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Umum Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 25 November 2021, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Keuangan : Yanti Rachmawati
Direktur Operasional : Agus Subrata

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris Independen : Dini Rosdini

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota : Khozin Abu Faqih, Lc.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Umum Saham Tahunan No.11 pada tanggal 3 Juni 2022, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yanti Rachmawati
Direktur Operasional : Agus Subrata

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Taufiq Budi Santoso
Komisaris Independen : Dini Rosdini

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

d. Susunan Pengurus (Lanjutan)

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota	: Khozin Abu Faqih, Lc.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 26 November 2019, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Ny. Dini Rosdini sebagai Komisaris Independen untuk periode 2019-2023.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 74 tanggal 13 September 2021, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat Tuan Agus Subrata Direktur Operasional untuk periode 2021-2026.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 06 tanggal 29 November 2021, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat Muhammad Taufiq Budi Santoso sebagai Komisaris Utama untuk periode 2021-2026.

Sesuai Akta Penyertaan Keputusan Para pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.11 Tanggal 05 April 2022 memutuskan dan menyetujui Ny. Yanti Rachmawati selaku Direktur Utama periode 2022-2027

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT JAMKRIDA JABAR disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, manajemen Perusahaan menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan PSAK baru yang signifikan adalah PSAK 71 "Instrumen Keuangan", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Dampak dari penerapan PSAK baru tersebut dijelaskan di bawah ini.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menerapkan model baru kerugian ekspektasian dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan lainnya.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 71 pada tanggal 31 Desember 2019 akan diakui oleh Perusahaan sebagai penyesuaian saldo laba per 1 Januari 2020.

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022:

- Penyesuaian PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi kerangka konseptual"
- Penyesuaian PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontijensi dan aset kontijensi tentang kontrak memberatkan - biaya memenuhi kontrak."
- Amandemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan"
- Amandemen PSAK 73: "Sewa"

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

(i) Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Klasifikasi (Lanjutan)

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penerapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Perusahaan, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
 - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Perusahaan yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Perusahaan dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (Lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Reklasifikasi aset keuangan

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

(vi) Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(vii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(viii) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Kerugian kredit ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang pada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan).
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi.
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan

e. Piutang Regaransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee* dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee*.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat mitra *co-guarantee* mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra *co-guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

f. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban akuisisi dibayar di muka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah.

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

Bangunan Gedung	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Aset Tidak Berwujud

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tidak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tidak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

Jumlah tersusutkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual). Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun). Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya overhead yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari empat tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

i. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

j. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil

Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

j. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil (Lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

k. Aset Lain-Lain

Merupakan aset diluar *software* dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

l. Sewa

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* kepemilikan pada akhir masa sewa.

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("*sale-and-lease back*") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("*straight-line method*") selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

n. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 11/2020 tanggal 02 November 2020 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja".

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24, "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

n. Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

Perusahaan memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013) ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Untuk program iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan pasca kerja manfaat pasti ditentukan dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit* dan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui pada tahun dimana keuntungan dan kerugian terjadi dalam pendapatan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi sepanjang tahun sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit* dimana keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu langsung diakui dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

o. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

p. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui sejak Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK).

Batas waktu maksimal pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban regaransi diakui sesuai jangka waktu penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/ kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee*.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. *Fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan dijanjikan dalam kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu
Perusahaan mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, umumnya Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja Perusahaan saat Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut.
- b. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu
Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

p. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi (Lanjutan)

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

q. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah utang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

r. Cadangan Klaim

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Perusahaan telah membentuk cadangan klaim sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan. Cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

Estimasi klaim atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai piutang penjamin ulang dan diukur secara sistematis sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara total saldo penjaminan bruto dan total saldo penjaminan netto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi (Lanjutan)

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
- ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, dimana entitas lain tersebut
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
- vii. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

t. Beban Klaim

Beban klaim setelah dikurangi bagian penjamin ulang, dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Pertimbangan (Lanjutan)

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

d. Imbalan Kerja jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 19 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Cadangan Klaim dan Piutang Regaransi

Cadangan klaim dan Piutang Regaransi diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71, dan estimasian yang dibentuk dengan mempertimbangkan perkembangan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor ekonomi yang relevan dan terkorelasi, serta probabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas	117,532,482	48,799,667
Giro Bank		
Bank Umum	7,425,404,257	9,270,592,379
Bank BPR Syariah	2,138,374,089	2,076,350,728
Bank BPR	3,470,608,215	2,058,604,588
Bank Umum Syariah	1,934,518,294	887,961,427
Jumlah Giro Bank	14,968,904,855	14,293,509,122
Deposito		
Bank Umum	97,221,502,633	67,276,025,038
Bank BPR Syariah	26,750,000,000	26,775,000,000
Bank Umum Syariah	35,050,000,000	27,550,000,000
Bank BPR	17,165,000,000	20,265,000,000
Jumlah Deposito	176,186,502,633	141,866,025,038
Jumlah Kas dan Setara Kas	191,272,939,970	156,208,333,827
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(878,876,521)	(4,405,112,016)
Jumlah Kas dan Setara Kas - Bersih	190,394,063,449	151,803,221,811

Penempatan deposito PT Jamkrida Jabar pada tanggal 31 Desember 2022 di beberapa bank di Indonesia mendapatkan tingkat suku bunga dari 2,50% p.a. s/d 9,50% p.a dan per 31 Desember 2021 mendapatkan tingkat suku bunga dari 2,50% p.a. s/d 11,00% p.a.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	4,405,112,016	13,497,571,767
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	--	--
Pemulihan Tahun Berjalan	(3,526,235,495)	(9,092,459,751)
Penyisihan Tahun Berjalan	--	--
Saldo Akhir	878,876,521	4,405,112,016

5. PIUTANG RE/COGARANSI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Re/Cogaranasi	83,488,976,172	63,283,024,935
Jumlah Piutang Re/Cogaranasi	83,488,976,172	63,283,024,935
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(5,226,122,382)	(4,560,598,252)
Jumlah Piutang Re/Cogaranasi - Bersih	78,262,853,790	58,722,426,683

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	4,560,598,252	--
Pemulihan Tahun Berjalan	665,524,130	--
Penyisihan Tahun Berjalan	--	4,560,598,252
Saldo Akhir	5,226,122,382	4,560,598,252

Piutang Re/Cogaranasi merupakan tagihan atas klaim dan restitusi kepada broker PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE), PT Jamkrida Banten dan PT Igna Asia Broker and Insurance (IGNA)

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, piutang estimasian atas Re/Cogaranasi masing-masing sebesar Rp9.324.486.657 dan Rp12.545.147.099 (Lihat catatan 18).

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan <i>Management Fee</i>	8,444,160,459	11,699,694,558
Pendapatan Bunga Investasi	1,580,374,425	1,115,840,762
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	10,024,534,884	12,815,535,320
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(213,564,612)	(852,506,852)
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima - Bersih	9,810,970,272	11,963,028,468

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga investasi yang berasal dari deposito, pendapatan kupon obligasi atas investasi, komisi atas Re/Cogaranasi (*management fee*).

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	852,506,852	--
Pemulihan Tahun Berjalan	(638,942,240)	--
Penyisihan Tahun Berjalan	--	852,506,852
Saldo Akhir	213,564,612	852,506,852

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian merupakan cadangan atas pendapatan *management fee*

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Karyawan	666,139,746	149,170,358
Piutang Lainnya	6,764,309	3,165,680
Jumlah Piutang Lain-lain	672,904,055	152,336,038

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

a. Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
IJP Re/Cogaranasi	18,354,472,145	14,317,857,394
Biaya Akuisisi	5,036,098,677	5,945,917,872
Beban Operasional Dibayar Dimuka	519,509,842	138,794,094
Uang Muka	130,418,335	37,357,500
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek	24,040,498,999	20,439,926,860

b. Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
IJP Re/Cogaranasi	54,118,007,551	48,348,635,864
Biaya Akuisisi	21,496,731,367	17,153,319,637
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang	75,614,738,918	65,501,955,501

Beban operasional dibayar dimuka dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP Re/Cogaranasi, Biaya Akuisisi diamortisasi sesuai dengan pola pengakuan Imbal Jasa Penjaminan dengan menggunakan pola risiko.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA (LANJUTAN)

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

Beban dibayar dimuka Re/Cogaransi merupakan pembayaran IJP dan IJK tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra Re/Cogaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP dan IJK Re/Cogaransi dan fee based income bank telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

9. SURAT BERHARGA

Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2022	31 Desember 2021
FR 72	8.25%	15/05/2036	--	34,000,000,000	32,000,000,000
FR 68	8.38%	15/03/2034	--	24,000,000,000	7,000,000,000
FR 76	7.38%	15/05/2048	--	9,000,000,000	5,000,000,000
FR 80	7.50%	15/06/2035	--	7,000,000,000	-
PBS 012	8.60%	15/04/2034	--	7,000,000,000	5,000,000,000
FR 92	7.13%	15/06/2042	--	3,000,000,000	-
FR 89	6.88%	15/05/2051	--	5,000,000,000	5,000,000,000
PBS 025	8.38%	15/05/2033	--	2,000,000,000	--
PT PP THP I 2020	9.90%	27/02/2023	idA	1,000,000,000	1,000,000,000
Waskita Karya THP II TH 2018	8.25%	23/02/2023	idA	--	3,000,000,000
PLN Th 2019 SERI C	8.70%	06/06/2027	idAAA	--	2,000,000,000
PT Bank BJB	8.15%	06/12/2022	idAA-	--	1,000,000,000
Harga Perolehan				92,000,000,000	61,000,000,000
Amortisasi Nilai Premium (Diskonto)				8,452,099,375	--
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga				(1,718,111,915)	5,811,843,460
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif				98,733,987,460	66,811,843,460
Reksadana					
Reksadana MNC Dana SBN				--	1,000,000,000
Harga Perolehan				--	1,000,000,000
Selisih Nilai Wajar Reksadana				--	126,205,716
Jumlah Reksadana				--	1,126,205,716

Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Surat Berharga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Hutama Karya	8.07%	06/06/2027	idAAA	6,000,000,000	6,000,000,000
Waskita Karya THP I TH 2017	8.50%	06/10/2022	idA	--	5,000,000,000
Harga Perolehan				6,000,000,000	11,000,000,000
Diskonto Obligasi				--	--
Premium Obligasi				21,214,640	33,176,825
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi				6,021,214,640	11,033,176,825
Jumlah Aset Keuangan				104,755,202,100	78,971,226,001
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian				(20,857,963)	(136,839,191)
Jumlah Aset Keuangan - Bersih				104,734,344,137	78,834,386,810

Laporan Audit Audit Report

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

9. SURAT BERHARGA (LANJUTAN)

Aset Keuangan Perusahaan merupakan Investasi dalam bentuk Obligasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif dan obligasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penentuan kategori aset keuangan dilakukan oleh manajemen.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	136,839,191	1,563,069,474
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	--	--
Pemulihan Tahun Berjalan	(115,981,228)	1,666,500,000
Penyisihan Tahun Berjalan	--	240,269,717
Saldo Akhir	20,857,963	136,839,191

10. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	2,495,100,000	2,495,100,000
Penambahan	--	--
Keuntungan atas perubahan nilai wajar	--	--
Saldo Akhir	2,495,100,000	2,495,100,000

Akun properti investasi merupakan investasi dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan, tetapi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Perusahaan berupa pendapatan sewa.

Aset-aset tersebut telah dilakukan penilaian ulang oleh penilai independen pada tanggal 13 Maret 2023 dengan laporan yang diterbitkan oleh KJPP Patuh Ansori Rahman & Rekan No. 00001/2.0174-02/PI/09/0580/1/III/2023 dengan nilai sebesar Rp2.626.966.820.

11. ASET TETAP

	31 Desember 2022			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	2,919,270,578	1,011,639,276	--	3,930,909,854
Kendaraan	4,205,575,000	--	--	4,205,575,000
Gedung	7,528,000,029	--	3,803	7,527,996,226
Tanah	3,463,500,000	--	--	3,463,500,000
Aset dalam Penyelesaian	--	--	--	--
Jumlah	18,116,345,607	1,011,639,276	3,803	19,127,981,080
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(2,122,570,530)	(317,974,335)	--	(2,440,544,865)
Kendaraan	(1,716,769,251)	(403,746,687)	--	(2,120,515,938)
Gedung	(1,030,051,553)	(175,653,209)	--	(1,205,704,762)
Jumlah	(4,869,391,334)	(897,374,231)	--	(5,766,765,565)
Nilai buku	13,246,954,273			13,361,215,515

Laporan Audit Audit Report

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2021			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	2,682,103,127	237,167,451	--	2,919,270,578
Kendaraan	3,757,590,000	447,985,000	--	4,205,575,000
Gedung	7,379,822,329	148,177,700	--	7,528,000,029
Tanah	3,463,500,000	--	--	3,463,500,000
Aset dalam Penyelesaian	--	--	--	--
Jumlah	17,283,015,456	833,330,151	--	18,116,345,607
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(1,852,006,827)	(270,563,703)	--	(2,122,570,530)
Kendaraan	(1,236,826,313)	(479,942,938)	--	(1,716,769,251)
Gedung	(856,880,398)	(173,171,155)	--	(1,030,051,553)
Jumlah	(3,945,713,538)	(923,677,796)	--	(4,869,391,334)
Nilai buku	13,337,301,918			13,246,954,273

Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp18.447.704.000 pada PT Asuransi Jasa Raharja Putera.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungan.

12. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
<i>Software</i>	1,076,474,755	912,388,255
Aset Dalam Penyelesaian	--	63,177,000
Aset Lainnya	46,200,000	22,000,000
Harga Perolehan Aset Lain-Lain	1,122,674,755	997,565,255
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	(823,858,953)	(745,954,405)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(26,537,500)	(22,000,000)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(850,396,453)	(767,954,405)
Nilai Buku Aset Lain-lain	272,278,302	229,610,850

Software merupakan lisensi perangkat lunak komputer dan diamortisasi selama 4 tahun.

Aset lainnya merupakan pemeringkatan atas PT Jamkrida Jabar dan sistem SDM PT Jamkrida Jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

13. UTANG RE/COGARANSI

Utang Re/Cogaranasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Regaransi:		
<i>Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE)</i>	--	41,843,888,104
<i>PT Igna Asia Reinsurance Broker & Consultant (IGNA)</i>	37,001,290,686	--
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE)	1,196,535,490	1,196,442,595
Utang Co-garansi:		
PT Jamkrida Jakarta	--	--
Jumlah Utang Re/Cogaranasi	38,197,826,176	43,040,330,699

Utang kepada broker *Best One Asia Reinsurance Broker* (BOARE), PT Jamkrida Jakarta PT Igna Asia Reinsurance Broker & Consultant (IGNA) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) merupakan utang premi IJP dan IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akrual sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Umum yang masih harus dibayar	44,822,218	306,042,218
Biaya Pegawai Yang Masih Harus dibayar	3,950,503,029	85,194,924
Cadangan CSR	107,045,679	73,649,143
Biaya Komisi Agen	56,161,339	49,386,358
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	4,158,532,265	514,272,643

Merupakan kewajiban Perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, biaya keamanan, insentif dan uang makan, transport, bonus dan tantiem, uang lembur karyawan serta biaya komisi agen bulan Desember 2022 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

15. PENAMPUNGAN SEMENTARA

Penampungan sementara per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penampungan IJP Bank Umum	12,951,830,607	9,014,335,193
Penampungan IJP Bank BPR	1,315,663,011	996,177,163
Penampungan IJP Bank Syariah	901,305,060	680,830,495
Jumlah Penampungan Sementara IJP	15,168,798,678	10,691,342,851
Penampungan Sementara Subrogasi	2,484,090,015	1,102,348,085
Jumlah Penampungan Sementara	17,652,888,693	11,793,690,936

Akun Penampungan IJP terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK)-nya, serta kelebihan pembayaran IJP dan IJK.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak Re/Cogaranasi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

16. UTANG LANCAR LAINNYA

Utang lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Lancar Lain-lain	33,244,767	244,746
Jumlah Utang Lancar Lainnya	33,244,767	244,746

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

a. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Pendek	40,025,992,551	32,601,809,176
Imbal Jasa Kafalah Jangka Pendek	3,970,695,397	3,107,478,683
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	43,996,687,948	35,709,287,859

b. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Panjang	117,456,394,815	94,938,140,222
Imbal Jasa Kafalah Jangka Panjang	4,117,012,987	3,133,198,738
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	121,573,407,802	98,071,338,960

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka merupakan pembayaran IJP dan IJK penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

18. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	18,908,364,728	6,482,596,741
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71		
Cadangan Klaim	--	--
Pembentukan Cadangan Klaim	--	12,425,767,987
Pemulihan Cadangan Klaim	(3,846,275,881)	--
Jumlah Cadangan Klaim	15,062,088,847	18,908,364,728

Piutang Estimasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	12,545,147,099	3,757,211,523
Pembentukan Piutang Estimasi	(3,220,660,443)	8,787,935,576
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71 pembentukan piutang estimasi	--	--
Jumlah Piutang Estimasi	9,324,486,657	12,545,147,099

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

18. CADANGAN KLAIM (LANJUTAN)

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim minimal yang dibentuk telah sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan, cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1,627,086,117	1,834,011,406
Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	348,652,801	292,341,214
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1,975,738,918	2,126,352,620

Standar akuntansi PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode *"Projected Unit Credit"*.

Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berikut didasarkan pada Laporan Aktuaria yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

Imbalan Pasca Kerja

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1,627,086,117	1,834,011,406
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	1,627,086,117	1,834,011,406
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	1,627,086,117	1,834,011,406

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban awal periode	1,834,011,406	1,967,916,012
Penyesuaian metode atribusi	(177,337,070)	--
Beban yang diakui di laba/rugi	9,338,316	15,859,479
Kerugian (keuntungan) komprehensif lainnya	21,751,465	(39,291,085)
Penyesuaian atas koreksi	--	--
Pembayaran Manfaat	(60,678,000)	(110,473,000)
Kewajiban akhir periode	1,627,086,117	1,834,011,406

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Biaya jasa kini	246,749,158	265,020,873
Biaya bunga	119,497,236	111,288,134
Biaya jasa lalu vested	(356,908,078)	(360,449,528)
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	9,338,316	15,859,479

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)

d. Pengakuan (Keuntungan) Kerugian Aktuaria

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Keuntungan) kerugian aktuarial yang belum diakui pada awal periode akuntansi	--	--
(Keuntungan) kerugian aktuarial - kewajiban	21,751,465	(39,291,085)
Jumlah (keuntungan) kerugian aktuarial yang diakui	21,751,465	(39,291,085)

e. Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari kewajiban	21,751,465	(39,291,085)
Perubahan lainnya	--	--
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui	21,751,465	(39,291,085)

f. Akumulasi Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya awal periode	339,621,715	378,912,800
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	21,751,465	(39,291,085)
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya akhir periode	361,373,180	339,621,715

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Program Imbalan Kerja jangka Panjang Lainnya berdasarkan Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk cuti besar.

Perusahaan memberikan 2 (dua) bulan cuti panjang bagi karyawan yang masih aktif selama 6 (enam) tahun masa kerja dan kelipatannya yang akan diberikan di tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan), masing-masing selama 1 (satu) bulan.

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	348,652,801	292,341,214
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	348,652,801	292,341,214
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	348,652,801	292,341,214

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (Lanjutan)

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban awal periode	292,341,214	379,237,367
Beban yang diakui di laba/rugi	56,311,587	(86,896,153)
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan		
Kewajiban akhir periode	348,652,801	292,341,214

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Biaya jasa kini	87,905,074	79,170,261
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(19,921,715)	(192,613,030)
Biaya Jasa lalu	(32,421,805)	
Biaya bunga	20,750,033	26,546,616
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	56,311,587	(86,896,153)

Asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2022 dan 2021 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tingkat Diskonto	7.25%	7.25%
Kenaikan Gaji per Tahun	6%	6%
Tabel Mortalita	100% TMI4	100% TMI4
Tingkat Cacat	10% TMI4	10% TMI4
Usia Pensiun Normal	58 tahun	58 tahun

20. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PPh 4 ayat 2	182,153,305	126,181,671
PPh Pasal 21	1,037,987,551	331,399,152
PPh Pasal 23	31,593,125	44,649,126
Jumlah Utang Pajak	1,251,733,981	502,229,949

Utang pajak PPh Pasal 21 adalah utang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2022 yang menjadi tanggungan perusahaan dan pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan. Utang pajak Pasal 23 adalah utang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Laba Sebelum Pajak	20,484,683,378	11,727,411,463
Perbedaan Temporer:		
Beban Imbalan Pasca Kerja	(172,365,158)	11,103,356
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(124,847,989)	3,238,986
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(3,615,634,833)	(5,140,568,567)
Kenaikan Cadangan Klaim	(625,615,439)	3,637,832,410
Jumlah	(4,538,463,419)	(1,488,393,815)
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	1,846,679,177	1,771,273,749
Beban Perjalanan Dinas	1,132,983,490	665,318,590
Tunjangan Kesehatan	356,209,879	403,374,036
Beban Umum Lainnya	1,024,626,132	627,996,915
Beban Representasi	833,199,851	528,595,747
Tunjangan Baju	177,132,331	102,525,700
Beban Diklat Karyawan	381,365,331	190,930,358
Pemeliharaan Kendaraan	182,012,954	134,909,182
Jumlah	5,934,209,145	4,424,924,277
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Bunga Deposito Dan Bagi Hasil	(5,841,200,691)	(8,191,259,132)
Pendapatan Obligasi	(6,751,354,652)	(5,436,346,683)
Pendapatan Jasa Giro	(368,684,226)	(344,879,204)
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	(308,528,841)	(1,335,861,584)
PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	1,147,065,206	1,641,800,301
PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	671,010,581	686,102,169
PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	73,832,926	69,943,901
PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	15,462,768	176,885,687
Jumlah	(11,362,396,930)	(12,733,614,545)
Jumlah koreksi fiskal	(9,966,651,203)	(9,797,084,083)
Laba (Rugi) Fiskal Tahun Berjalan	10,518,032,175	1,930,327,380
Laba (Rugi) (dibulatkan)	10,518,032,000	1,930,327,000
Kerugian Pajak Tahun 2017		(8,520,565,000)
Kerugian Pajak Tahun 2018	(7,826,711,000)	(7,826,711,000)
Kerugian Pajak Tahun 2019	(5,030,548,000)	(5,030,548,000)
Kerugian Pajak Tahun 2020	(10,541,446,000)	(10,541,446,000)
Laba Pajak Tahun 2021	1,930,327,000	1,930,327,000
Laba Pajak Tahun 2022	10,518,032,000	--
Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi	(10,950,346,000)	(29,988,943,000)

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

d. Pajak Tangguhan

31 Desember 2022				
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(10,258,472)	—	(27,466,558)	(37,725,030)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasi	1,399,907,877	—	(137,635,397)	1,262,272,480
Beban Imbal Pasca Kerja	467,797,576	108,161,373	(141,296,386)	434,662,563
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	(102,645,206)	480,629,827	—	377,984,621
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	2,182,415,988	—	(787,743,263)	1,394,672,725
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	6,597,567,376	—	(4,188,491,340)	2,409,076,036
Jumlah	10,534,785,140	588,791,199	(5,282,632,943)	5,840,943,395

31 Desember 2021				
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(10,971,049)	—	712,577	(10,258,472)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasi	599,584,747	—	800,323,130	1,399,907,877
Beban Imbal Pasca Kerja	516,373,744	(51,018,906)	2,442,738	467,797,576
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	494,481,563	(597,126,769)	—	(102,645,206)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	3,313,341,073	—	(1,130,925,085)	2,182,415,988
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	7,412,366,500	—	(814,799,124)	6,597,567,376
Jumlah	12,325,176,578	(648,145,675)	(1,142,245,763)	10,534,785,140

21. EKUITAS

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penyertaan Modal	203,200,000,000	153,200,000,000
Cadangan Umum	44,817,709,373	40,139,066,131
Saldo Laba	15,202,050,435	10,585,165,700
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	(1,340,127,293)	(569,214,323)
Selisih pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja	(281,871,080)	(97,398,214)
Jumlah Ekuitas	261,597,761,435	203,257,619,294

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan:

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp 145.000.000.000 dengan dua tahap penyetoran yaitu:
 - a. Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp 25.000.000.000.
 - b. Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 75.000.000.000.
 - c. Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 45.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp 200.000.000.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

21. EKUITAS (LANJUTAN)

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT Jamkrida Jabar.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap kedua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000.000.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ketiga Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 25.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap keempat pada tanggal 10 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1987/PM/LS/KEU dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp45.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap kelima pada tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/5/PM/LS/KEU dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 8.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap keenam pada tanggal 1 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 02.00/04.0/3/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.06/12/2022 dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp50.000.000.000,-. Komposisi modal ditempatkan dan disetor. PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

2022				
Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	20,300	10,000,000	203,000,000,000	99.90%
YKP Bank BJB	20	10,000,000	200,000,000	0.10%
Jumlah	20,320	20,000,000	203,200,000,000	100%

2021				
Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	15,300	10,000,000	153,000,000,000	99.87%
YKP Bank BJB	20	10,000,000	200,000,000	0.13%
Jumlah	15,320	20,000,000	153,200,000,000	100%

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 11 tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat oleh notaris Yanti Yulianti, SH., M.Kn. para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2021 sebesar Rp 10.585.165.700, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 46,70%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2,50%, Dividen sebesar 28,90%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 11 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn. para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2019 sebesar Rp 3.907.910.588, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah penuh)

22. PENDAPATAN PENJAMINAN

Imbal jasa penjaminan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	166,944,974,562	183,093,487,470
Beban Akuisisi	(24,228,085,654)	(30,728,197,910)
Restitusi IJP	(5,039,817,944)	(3,202,339,341)
Management Fee	19,458,760,127	17,534,896,772
Beban Regaransi	(73,770,797,298)	(90,364,193,737)
Jumlah Jasa Penjaminan Kredit	83,365,033,792	76,333,653,254

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dan IJK dihitung dari tarif IJP dan IJK, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

Untuk kredit *eksisting*, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan.

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Nomor: 6/ POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Tarif biaya komisi agen dan *fee based income* bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan.

Mulai tahun 2019 Komisi Agen/Broker dan Fee Based Income Bank dijadikan satu menjadi biaya akuisisi.

23. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan investasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Bunga Deposito Bruto	4,505,038,408	6,589,379,106
Pendapatan Kupon Obligasi Bruto	6,751,354,652	5,436,346,683
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Bruto	1,336,162,283	1,601,880,026
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	308,528,841	1,335,861,584
Pendapatan Sewa Properti	35,495,000	10,100,000
Beban Amortisasi Diskonto	343,160,127	(8,216,964)
Jumlah Pendapatan Investasi	13,279,739,311	14,965,350,435

24. BEBAN KLAIM

Beban klaim pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Klaim	50,775,513,607	63,389,134,331
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Klaim	(625,615,439)	3,637,832,410
Jumlah Beban Klaim	50,149,898,168	67,026,966,741

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

25. BEBAN USAHA

Beban usaha pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Sumber Daya Manusia	18,966,640,491	10,514,469,094
Beban Administrasi Kantor dan Umum	6,574,672,623	5,301,953,833
Beban Operasional	3,936,842,774	2,872,876,377
Jumlah Beban Usaha	29,478,155,888	18,689,299,304

Rincian Beban Operasional

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Promosi	1,905,905,025	1,771,273,749
Beban Perjalanan Dinas	1,132,983,490	665,318,590
Beban Kendaraan Dinas	563,535,088	433,105,873
Beban Penagihan Subrogasi	334,419,171	3,178,165
Jumlah Beban Operasional	3,936,842,774	2,872,876,377

Rincian Beban Sumber Daya Manusia

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Gaji dan Tunjangan Karyawan	7,367,457,992	6,106,271,306
Beban Bonus dan Tantiem	3,329,249,042	--
Gaji dan Tunjangan Direksi	2,204,253,561	1,192,175,606
Beban PPH 21	2,116,245,274	988,100,752
Beban Insentif	1,911,528,413	1,296,906,203
Gaji dan Tunjangan Komisaris	929,194,012	260,023,475
Beban Purna Jabatan	693,210,000	213,000,000
Beban Pengembangan SDM	418,709,255	218,900,358
Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas Syariah	96,800,000	96,515,038
Pembentukan (Pemulihan) Beban Imbal Pasca Kerja	(111,687,158)	121,576,356
Tunjangan SDM Lainnya	11,680,100	21,000,000
Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	18,966,640,491	10,514,469,094

Rincian Beban Administrasi Kantor dan Umum

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Umum	3,860,103,876	3,015,029,613
Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset	897,374,231	923,677,796
Beban Pemeliharaan dan Asuransi Aset	880,375,516	491,452,497
Beban Administrasi	401,689,615	394,652,587
Beban Komunikasi dan Energi	425,726,690	349,225,098
Beban Amortisasi <i>Software</i> dan Aset Lainnya	80,379,542	96,667,204
Beban Sewa	15,949,922	20,081,888
Beban Pajak - Pajak	13,073,232	11,167,150
Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum	6,574,672,623	5,301,953,833

26. PENDAPATAN SUBROGASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Subrogasi		
Pendapatan Subrogasi Penjaminan Bank	1,924,565,589	2,621,926,441
Jumlah Pendapatan Subrogasi	1,924,565,589	2,621,926,441

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Lain-lain		
Pemulihan CKKE Aset Keuangan	4,281,158,963	10,553,673,671
Pendapatan Jasa Giro	368,684,226	344,879,204
Pendapatan Lainnya	12,213,635	621,116,913
Jumlah Pendapatan Lain-lain	4,662,056,823	11,519,669,788
Beban Lain-lain		
- Beban Kenaikan CKKE Management Fee	--	(852,506,852)
- PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	(15,462,768)	(176,885,687)
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	(73,832,926)	(69,943,901)
- Beban Bukan Usaha Lainnya	(545,762,471)	(9,085,248)
- Beban Kenaikan CKKE Piutang Regar	(665,524,130)	(4,560,598,252)
- PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	(671,010,581)	(686,102,169)
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	(1,147,065,206)	(1,641,800,301)
Jumlah Beban Lain-lain	(3,118,658,081)	(7,996,922,410)
Jumlah (Pendapatan) Beban Lain-lain	1,543,398,742	3,522,747,378

28. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

29. INFORMASI TAMBAHAN

a. Kerja sama dengan perusahaan Asuransi

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan pihak asuransi untuk melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit multiguna/pembiayaan murabahah/mudharabah bagi penerima kredit/pembiayaan, kerugian yang ditanggung adalah kerugian akibat risiko kematian.

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah telah melakukan perjanjian kerja sama dengan:

- Bank BJB Syariah
- BPRS HIK Parahyangan
- BPRS Al Masoem
- BPRS Patriot Kota Bekasi
- BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya

b. Jenis-Jenis Produk Penjaminan Syariah

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Kontra Bank Garansi

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

29. INFORMASI TAMBAHAN

c. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2022 dan 2021

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Penjaminan		
Imbal Jasa Kafalah	13,667,037,289	12,004,094,916
Beban Akuisisi	(2,200,316,022)	(2,013,346,934)
Manajemen Fee	1,309,580,285	618,786,989
Restitusi IJP	(244,644,402)	(117,105,077)
Beban Re/Cogaran	(4,947,691,570)	(4,563,504,201)
Jumlah Pendapatan Penjaminan	7,583,965,580	5,928,925,693
Beban Klaim		
Beban Klaim	(2,879,246,361)	(3,675,603,788)
Pemulihan Cadangan Klaim	(265,356,089)	106,932,362
Jumlah Beban Klaim	(3,144,602,450)	(3,568,671,426)
Pendapatan Penjaminan Bersih	4,439,363,129	2,360,254,267
Pendapatan Investasi	2,229,270,534	2,645,707,850
Pendapatan Subrogasi	221,891,632	213,937,338
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(931,444,385)	(354,053,984)
Beban Usaha	(1,794,786,230)	(902,687,523)
Laba Sebelum Pajak	4,164,294,681	3,963,157,948
Beban Pajak Kini	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	101,835,505	--
Laba Bersih Unit Syariah	4,266,130,186	3,963,157,948
Penghasilan Komprehensif Lain Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi		
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang	(477,206,571)	--
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Keuntungan	203,482,323	--
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(273,724,248)	--
Laba Komprehensif	3,992,405,938	3,963,157,948

30. PERJANJIAN DAN PERIKATAN

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit mikro dan kecil, penjaminan kredit usaha.
- PT Nusantara Insurance Broker perihal Progran Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit modal kerja konstruksi, dan pengadaan barang/jasa.
- PT Brocade Insurance Broker tentang Program Tanggungan Asuransi BJB Kredit Konsumer.
- PT Jamkrida Banten perihal Kafalah Bersama (KOGARANSI)
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT Rawikara Sembawa Mandiri tentang Mitra Keagenan Penjaminan pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Konsumtif.
- PT Jakarta Inti Bersama Insurance Brokers perihal Jasa Konsultan dan Keperantaraan Penjaminan Kredit Konsumtif yang disalurkan oleh LKM.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

30. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (LANJUTAN)

- PT Bank Jabar Banten Syariah perihal Kafalah Pembiayaan (*Cash Loas & Non Cash Loan*)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung perihal Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Pasundan perihal Penjaminan Kredit Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot Bekasi tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- Koperasi Simpan Pinjam (Kospin Jasa) dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penjaminan Bersama Pinjaman Produktif.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Pembiayaan Konsumtif pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Fresnel Perdana Mandiri perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Produktif.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PT Igna Asia Reinsurance Brokers perihal Jasa Keperantaraan Pertanggungan Ulang (Reasuransi) Untuk Produk Penjaminan PT Jamkrida Jabar sebagai pengganti dari PT Best One Asia Reinsurance Brokers. Berdasarkan Berita Acara Pengalihan Portofolio Penjaminan Ulang PT Jamkrida Jabar, tanggal 11 Mei 2023 dan 10 maret 2023 peralihan portofolio tersebut sudah diketahui oleh PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) dan PT Reasuransi Syariah Indonesia sebagai pihak penjaminan ulang.

31. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 16 Juni 2023.



PT JAMKRIDA JABAR
SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT